LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN

2025

KATA PENGANTAR

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mengemban amanah menjadi organisasi pemerintah yang profesional, yang dapat memfasilitasi dan mendukung mobilitas masyarakat, melalui suatu layanan transportasi darat. Sebagai institusi publik, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsi secara akuntabel. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merupakan perwujudan akuntabilitas dan transparansi kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan yang didalamnya menguraikan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian atas rencana kinerja tersebut dan realisasi anggaran.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun isi dari laporan ini mencakup Rencana Strategis Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025-2029, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Pengukuran Kinerja Tahun 2025 serta tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja Tahun 2025.

Kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini dapat memberikan penjelasan pertanggungjawaban terhadap berbagai pelaksanaan kegiatan serta dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun mendatang.

Jakarta, 13 Januari 2026

Direktur Prasarana Transportasi Jalan

Toni Tauladan, S.Si., M.T.
NIP. 19700910 199703 1 002

BAB I
PENDAHULUAN

I. 1 Latar Belakang

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dituntut untuk menyelenggarakan Sistem Pemerintahan dengan Prudent, Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien sesuai dengan prinsip - prinsip Good Governance sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, sehingga itu diperlukan Akuntabilitas Publik sebagai landasan bagi proses penyelenggaraanya.

I. 2 Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 17 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana transportasi jalan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang terminal penumpang, terminal Barang penimbangan kendaraan bermotor, dan Jaringan dan kepengusahaan Transportasi Jalan;
2. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang terminal penumpang, terminal Barang penimbangan kendaraan bermotor, dan Jaringan dan kepengusahaan Transportasi Jalan;
3. Penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang terminal penumpang, terminal Barang penimbangan kendaraan bermotor, dan Jaringan dan kepengusahaan Transportasi Jalan;
4. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang terminal penumpang, terminal Barang penimbangan kendaraan bermotor, dan Jaringan dan kepengusahaan Transportasi Jalan;
5. Penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang terminal penumpang, terminal Barang penimbangan kendaraan bermotor, dan Jaringan dan kepengusahaan Transportasi Jalan; dan;
6. Penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, dan rumah tangga Direktorat.

   Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, terdiri dari:

   1. Sub Direktorat Terminal Penumpang;
   2. Sub Direktorat Terminal Barang;
   3. Sub Direktorat Penimbangan Kendaraan Bermotor;
   4. Sub Direktorat Jaringan dan Kepengusahaan Transportasi Jalan;

I.2.1 Bagan Struktur Organisasi

Gambar I. 1 Bagan Struktur Organisasi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

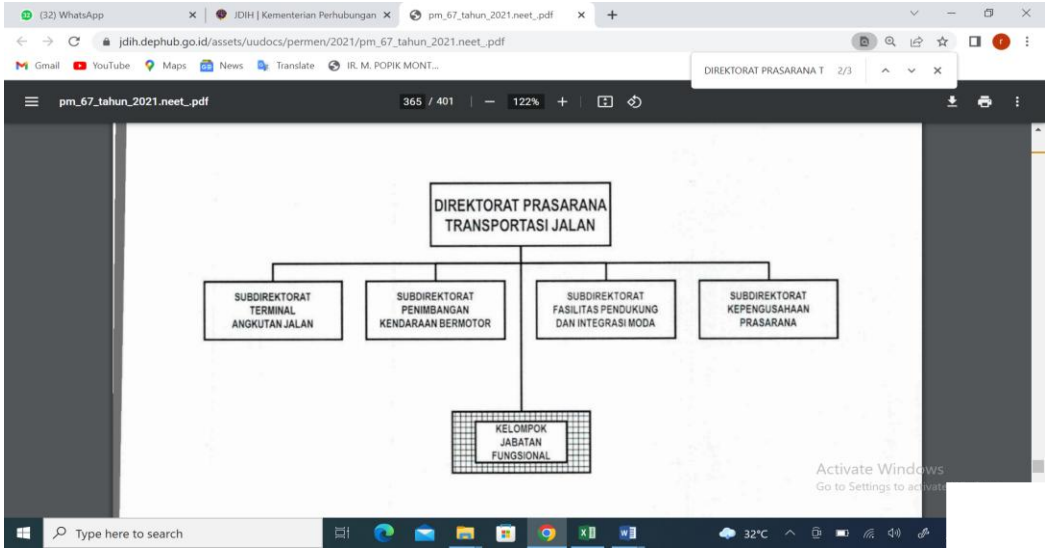

I. 3 Sumber Daya Manusia

Pegawai Direktorat Prasarana Transportasi Jalan posisi Tahun 2024 diklasifikasikan menurut sub unit kerja sebanyak 91 orang pegawai, Untuk rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

NO.	SUB UNIT KERJA	PNS	CPNS	PPPK	PPNPN	JUMLAH
1.	Kelompok Tata Usaha	9	-	6	4	**19**
2.	Sub Direktorat Terminal Penumpang	12	-	4	-	**16**
3.	Sub Direktorat Penimbangan Kendaraan Bermotor	14	-	5	1	**20**
4.	Sub Direktorat Terminal Barang	15	1	1	4	**20**
5.	Sub Direktorat Jaringan dan Kepengusahaan Transportasi Jalan	12	1	5	1	**19**
Jumlah		**62**	**2**	**21**	**8**	**93**

Tabel I. 1 Jumlah Pegawai di Lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

I. 4 Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan

1. Kewenangan

a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
   - i Terkait prasarana merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan;
   - ii Terkait jalan merupakan kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (sekarang bernama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat);
   - iii Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
     Berbagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah dapat diselesaikan sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan. Namun demikian masih terdapat Petunjuk Teknis yang masih harus diselesaikan di tahun-tahun mendatang.

b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
   - i Pembagian urusan pemerintahan Bidang Perhubungan, untuk Pemerintah Pusat yaitu Penyelenggaraan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dan Pengalihan P3D (Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen).
   - ii Komitmen Pemda dalam mendukung Pembangunan Prasarana Sub Sektor Perhubungan Darat, seperti ketersediaan/pembebasan lahan untuk jalan akses.

2. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan kegiatan untuk mencapai target, sasaran dan tujuan organisasi, perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompeten di bidangnya, meliputi ketersediaan SDM yang ideal sesuai dengan beban kerja yang ada pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

3. Anggaran

Terdapat perbedaan yang cukup besar antara pagu kebutuhan usulan dengan alokasi anggaran, sementara tugas yang diamanahkan begitu besar sehingga Direktorat Prasarana Transportasi Jalan hanya dapat memenuhi sebagian kebutuhan terhadap prasarana dan sarana perhubungan darat dengan DIPA Awal Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada T.A. 2025 sebesar Rp67.733.026.000,- dan DIPA Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) T.A. 2025 sebesar Rp 60.988.000.000,-.

4. Isu Strategis

Isu Strategis Direktorat Prasarana Transportasi Jalan adalah:

a. Pengoperasian Jembatan Timbang (UPPKB);
b. Pengoperasian Terminal Penumpang;
c. ODOL (*Over Dimension Over Loading*);

5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025 adalah:

- Rencana Strategis;
- Perjanjian Kinerja;
- Indikator Kinerja Program;
- Pengukuran Kinerja;
- Evaluasi Kinerja

I. 5 Sistematika Laporan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN KINERJA
KATA PENGANTAR
RINGKASAN EKSEKUTIF
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN
BAB I PENDAHULUAN
I. 1. Latar Belakang
I. 2. Tugas Pokok dan Fungsi
I.2.1 Bagan Struktur Organisasi
I. 3. Sumber Daya Manusia
I. 4. Potensi, Isu Strategis dan Permasalahan
I. 5. Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA
II.1 Uraian Singkat Perencanaan Strategis
II.1.1 Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025
II.2 Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025
II.2.1 Uraian Revisi Perjanjian Kinerja I Tahun 2025
II.2.2 Uraian Revisi Perjanjian Kinerja II Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
III.1. Tahapan Pengukuran Kinerja
III.2. Pengukuran Capaian Kinerja
III.2.1 SK 3 Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Trayek antar Kota dengan Terminal, Pusat kegiatan (KEK, KSN & KI), Lintas Negara, Nan Pedesaan antar Provinsi
1) IKK 3.2.3 Rasio Beroperasinya Layanan Terminal Tipe A Untuk Mendukung Konektivitas
1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025
3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
I. 6 Narasi Dasar Hukum
I. 7 Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
I. 8 Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
I. 9 Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
I. 10 Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
I. 11 Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
I. 12 Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

III.2.2 SK 4 Meningkatnya rasio konektivitas layanan angkutan barang dengan terminal angkutan barang
1. **IKK 4.2.3 Rasio Beroperasinya Pelayanan Terminal Barang Untuk Mendukung Konektivitas**
a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan
a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025
a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan
a. Narasi Dasar Hukum
b. Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
c. Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
d. Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
e. Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
f. Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
g. Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan
a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

III.2.3 SK 7 Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi jalan

1. IKK 7.1.3.A Persentase Beroperasinya Layanan Terminal Tipe A dengan Kapasitas Sesuai SPM

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025

a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a. Narasi Dasar Hukum

b. Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja

c. Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)

d. Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)

e. Narasi dan Perhitungan Realisgasi Kinerja

f. Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja

g. Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

2. **IKK 7.1.3.B Persentase ketersediaan dokumen penyiapan KPBU oleh simpul KPBU**

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025

a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a. Narasi Dasar Hukum

b. Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja

c. Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)

d. Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)

e. Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja

f. Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja

g. Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

3. **IKK 7.1.3.C Persentase Tindak Lanjut Kerjasama Pengusahaan Prasarana LLAJ Sesuai Pedoman**

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025

a3. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a.1. Narasi Dasar Hukum

a.2. Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja

a.3. Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)

a.4. Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)

a.5. Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja

a.6. Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja

a.7. Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

III.2.4 SK 9 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang

a.2. IKK 9.4.3.A Terlaksananya Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di Fasilitas Penimbangan Sesuai SPM

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025

a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a. Narasi Dasar Hukum

b. Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja

c. Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)

d. Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)

e. Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja

f. Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja

g. Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

a.3. IKK9.4.3.B Rasio Beroperasinya Fasilitas Penimbangan Untuk Mendukung Keselamatan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025

a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a.1. Narasi Dasar Hukum

a.2. Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja

a.3. Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)

a.4. Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)

a.5. Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja

a.6. Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja

a.7. Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

III.2.5 SK 13 Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal

1. 1.IKK 13.1.3.A Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

a.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025

a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

- Narasi Dasar Hukum
- Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
- Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
- Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
- Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
- Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
- Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

2. **IKK 13.1.3.B Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025

a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a. Narasi Dasar Hukum
b. Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
c. Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
d. Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
e. Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
f. Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
g. Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

3. **IKK 13.1.3.C Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran**

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025

a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a. Narasi Dasar Hukum
b. Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja
c. Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)
d. Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)
e. Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja
f. Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja
g. Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

4. **IKK 13.1.3.D Indeks Pengelolaan Aset**

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025

a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a. Narasi Dasar Hukum

b. Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja

c. Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)

d. Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)

e. Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja

f. Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja

g. Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

III.2.6 SK 14 Meningkatnya Layanan Perkantoran

- **IKK 14.1.3 Tingkat Digitalisasi Arsip**

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

a.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Terhadap Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025

a.3 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

a. Narasi Dasar Hukum

b. Narasi Kronologi Target, Revisi Target (Jika Ada) pada Perjanjian Kinerja

c. Narasi Faktor Keberhasilan (minimal 3)

d. Narasi Faktor Kegagalan atau Potensi Kegagalan (minimal 3)

e. Narasi dan Perhitungan Realisasi Kinerja

f. Narasi dan Perhitungan Capaian Kinerja

g. Narasi Pagu, Realisasi, dan Capaian Keuangan

a.4. Upaya untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang

III.3. Realisasi Anggaran

III.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2025

III. 3.1.1 Pagu Anggaran

a.1. Rincian Per Sumber Dana Tahun 2025

a.2. Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2025

a.3. Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran

III. 3.1.2 Refocusing Anggaran Tahun 2025

a.1. Rincian Revisi Per Sumber Dana Tahun 2025

a.2. Rincian Revisi Per Jenis Belanja Tahun 2025

a.3. Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun 2025

a.4. Rincian Realokasi Per Sasaran Kegiatan dan Kegiatan Tahun 2025

III. 3.1.3 Perbandingan Pagu dan Realisasi Tahun 2020 – 2025

III.3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2025

III. 3.2.1. Realisasi Anggaran Per Sasaran Kegiatan dan Kegiatan Tahun 2024

III. 3.2.2. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2025

III. 3.2.3. Realisasi Anggaran Per Sumber Dana Tahun 2025

III. 3.2.4. Analisis Dana Yang Tidak Terserap Oleh Unit Kerja

III.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

III. 3.2.1. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya keuangan

III. 3.2.2. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya manusia (tabel perbandingan jumlah kebutuhan dan jumlah eksisting SDM)

III.4. Hambatan dan Kendala

BAB IV PENUTUP

IV. 1. Penutup

IV.1.1. Ringkasan Capaian

IV. 2. Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Lampiran

1. Rencana Kerja Tahunan Tahun 2025 (scan dokumen yang telah ditanda tangani pimpinan);
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (scan dokumen yang telah ditanda tangani pimpinan);
3. Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (scan dokumen yang telah ditanda tangani pimpinan);
4. Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (scan dokumen yang telah ditanda tangani pimpinan);
5. Rencana Aksi Tahun 2025 (scan dokumen yang telah ditanda tangani pimpinan);
6. Revisi I Rencana Aksi Tahun 2025 (scan dokumen yang telah ditanda tangani pimpinan);
7. Revisi II Rencana Aksi Tahun 2025 (scan dokumen yang telah ditanda tangani pimpinan);
8. Monitoring Rencana Aksi Tahun 2025
9. Lain – lain yang dianggap perlu.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II. 1. Uraian Singkat Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2025 - 2029 merupakan rencana yang disusun untuk memberikan gambaran tentang Visi, Misi, Tujuan Sasaran, Strategi, Kebijakan dan Program Ditjen Perhubungan Darat dalam kurun waktu 2025 - 2029 sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan 2025 - 2029 agar bersinergi dan mempunyai kesatuan arah dan tujuan pengembangan Ditjen Hubdat.

Rencana Strategis Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025 - 2029 disusun berdasarkan target indikator Kinerja Kegiatan dari Sasaran Kegiatan yang mengacu pada Sasaran Program Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat agar dapat bersinergi dalam mendukung tercapainya Sasaran Strategis Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang transportasi darat.

Guna mencapai sasaran, maka sebagai acuan ukuran kinerja ditetapkan indikator kinerja program Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktotat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025 - 2029, sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel II. 1 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2025 - 2029 Sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2025 - 2029

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
GA Program Infrastruktur Konektivitas										
1	SK 01	Meningkatnya coverage area transportasi perkotaan yang door-to-door dan seamless pada kawasan perkotaan	IKK 02	Kapasitas operasi fasilitas pendukung dan integrasi moda sesuai SPM/ kapasitas fasilitas pendukung dan integrasi moda	%	60	-	-	24	46
2	SK 02	Meningkatnya konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN, & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi	IKK 01	Kapasitas operasi layanan terminal tipe A sesuai SPM/kapasitas operasi layanan terminal tipe A	%	60	25	34	43	51
			IKK 02	Jumlah dokumen penyiapan KPBU diterima oleh simpul KPBU / Jumlah dokumen penyiapan KPBU	%	100	100	100	100	100
			IKK 04	Jumlah tindak lanjut kerjasama pengusahaan prasarana LLAJ sesuai pedoman / jumlah kerjasama pengusahaan prasarana LLAJ	%	60	-	93	93	91
3	SK 18	Meningkatnya kepatuhan angkutan umum yang berkeselamatan	IKK 26	Kapasitas layanan penimbangan UPPKB sesuai SPM / kapasitas layanan penimbangan UPPKB	%	50.0	35.0	30.0	25.0	20.0

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target				
						2025	2026	2027	2028	2029
WA Program Dukungan Manajemen										
4	SKp04	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKKp16	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran, Kearsipan, dan Pengelolaan Aset dengan Tata Usaha di Setiap Direktorat	%	75	100	100	100	100

II.1.1. Uraian Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025

Rencana Kerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ini ditetapkan capaian kinerja tahun 2025 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025 terdiri dari Indikator Kinerja Kegiatan guna mencapai sasaran dengan target yang akan dicapai. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II. 2 Rencana Kinerja Tahunan 2025

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target 2025
1	SK 3	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi	IKK 3.2.3	Rasio beroperasinya layanan terminal tipe A untuk mendukung konektivitas	Rasio	0,852
2	SK 4	Meningkatnya rasio konektivitas layanan angkutan barang dengan terminal angkutan barang	IKK 4.2.3	Rasio beroperasinya pelayanan terminal barang untuk mendukung konektivitas	Rasio	0,014
3	SK 02	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi jalan	KK 7.1.3.A	Persentase beroperasinya layanan terminal tipe A dengan kapasitas sesuai SPM	%	90,47
			IKK 7.1.3.B	Persentase ketersediaan dokumen penyiapan KPBU oleh simpul KPBU	%	60
			IKK 7.1.3.C	Persentase tindak lanjut kerjasama pengusahaan prasarana LLAJ sesuai pedoman	%	21
4	SK 9	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 9.4.3.A	Terlaksananya pengawasan kendaraan angkutan barang di fasilitas penimbangan sesuai SPM	%	1,12
			IKK 9.4.3.B	Rasio beroperasinya fasilitas penimbangan untuk mendukung keselamatan	Rasio	0,636
5	SK 13	Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal	IKK 13.1.3.A	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,38
			IKK 13.1.3.B	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	82,30
			IKK 13.1.3.C	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	94,10
			IKK 13.1.3.D	Indeks Pengelolaan Aset	Nilai	3,20
6	SK 14	Meningkatnya Layanan Perkantoran	IKK 14.1.3	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai	85,51

II. 2. Uraian Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merupakan kontrak kinerja antara Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2025 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang

dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan melalui Program Infrastruktur Konektifitas dan Program Dukungan Manajemen dengan Total Anggaran per 1 Januari 2025 sebesar Rp.67.733.026.000,- adalah sebagai berikut:

Tabel II. 3 Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target 2025
1	SK 01	Meningkatnya coverage area transportasi perkotaan yang door-to-door dan seamless pada kawasan perkotaan	IKK 01	Kapasitas operasi fasilitas pendukung dan integrasi moda sesuai SPM/ kapasitas fasilitas pendukung dan integrasi moda	%	60
2	SK 02	Meningkatnya konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN, & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi	IKK 01	Kapasitas operasi layanan terminal tipe A sesuai SPM/kapasitas operasi layanan terminal tipe A	%	60
			IKK 02	Jumlah dokumen penyiapan KPBU diterima oleh simpul KPBU / Jumlah dokumen penyiapan KPBU	%	100
			IKK 04	Jumlah tindak lanjut kerjasama pengusahaan prasarana LLAJ sesuai pedoman / jumlah kerjasama pengusahaan prasarana LLAJ	%	60
3	SK 18	Meningkatnya kepatuhan angkutan umum yang berkeselamatan	IKK 26	Kapasitas layanan penimbangan UPPKB sesuai SPM / kapasitas layanan penimbangan UPPKB	%	60
4	SKp04	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKKp16	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran, Kearsipan, dan Pengelolaan Aset dengan Tata Usaha di Setiap Direktorat	%	75

Kegiatan	**Anggaran**
1. Pelayanan transportasi darat	Rp 46.489.102.000,00
2. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp 610.670.000,00
3. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp 20.633.254.000,00

II.2.1 Uraian Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Revisi I Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merupakan kontrak kinerja antara Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dengan Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan harus dilaksanakan dalam Tahun 2025 dan merupakan indikator yang didukung melalui pendanaan APBN. Hal ini disebabkan adanya kewenangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Indikator kinerja yang akan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan melalui Program Infrastruktur Konektifitas dan Program Dukungan Manajemen dengan Total Anggaran per 1 Juni 2025 sebesar Rp67.733.026.000,- adalah sebagai berikut:

Tabel II. 4 Revisi I Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target 2025
1	SK 3	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi	IKK 3.2.3	Rasio beroperasinya layanan terminal tipe A untuk mendukung konektivitas	Rasio	0,852
2	SK 4	Meningkatnya rasio konektivitas layanan angkutan barang dengan terminal angkutan barang	IKK 4.2.3	Rasio beroperasinya pelayanan terminal barang untuk mendukung konektivitas	Rasio	0,077
3	SK 7	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi jalan	IKK 7.1.3.A	Persentase beroperasinya layanan terminal tipe A dengan kapasitas sesuai SPM	%	90,47
			IKK 7.1.3.B	Persentase ketersediaan dokumen penyiapan KPBU oleh simpul KPBU	%	60
			IKK 7.1.3.C	Persentase tindak lanjut kerjasama pengusahaan prasarana LLAJ sesuai pedoman	%	60
4	SK 9	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 9.4.3.A	Terlaksananya pengawasan kendaraan angkutan barang di fasilitas penimbangan sesuai SPM	%	60
			IKK 9.4.3.B	Rasio beroperasinya fasilitas penimbangan untuk mendukung keselamatan	Rasio	0,636
5	SK 13	Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal	IKK 13.1.3.A	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,38
			IKK 13.1.3.B	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	82,30
			IKK 13.1.3.C	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	94,10
			IKK 13.1.3.D	Indeks Pengelolaan Aset	Nilai	3,20
6	SK 14	Meningkatnya Layanan Perkantoran	IKK 14.1.3	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai	85,51

Kegiatan	**Anggaran**
1. Penunjang teknis transportasi darat	Rp 46.489.102.000,00
2. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp 610.670.000,00
3. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp 20.633.254.000,00

II.2.2 Uraian Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Revisi II Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada prinsipnya sama seperti Perjanjian Kinerja. Sehubungan dengan adanya DIPA Satker Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Nomor: DIPA-022.03.1.352597/2025 tanggal 21 November 2025 serta adanya nomenklatur seusai PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan maka perlu ditetapkan Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.

Program yang akan digunakan untuk mencapai Indikator Kinerja Kegiatan sesuai dengan Sasaran Kegiatan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan adalah Program Infrastruktur Konektivitas dengan pagu awal sebesar Rp38.090.076.000,00 dan program Dukungan Manajemen masih dengan pagu sebesar Rp.22.897.924.000,00.

Sama seperti dokumen Perjanjian Kinerja, dokumen Revisi II Perjanjian Kinerja juga merupakan suatu dasar untuk penilaian pelaksanaan kegiatan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan untuk menggantikan dokumen Perjanjian Kinerja ketika terdapat perubahan pimpinan ataupun perubahan anggaran. Revisi II Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

Tabel II. 5 Revisi II Perjanjian Kinerja Tahunan Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target 2025
1	SK 3	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi	IKK 3.2.3	Rasio beroperasinya layanan terminal tipe A untuk mendukung konektivitas	Rasio	0,852
2	SK 4	Meningkatnya rasio konektivitas layanan angkutan barang dengan terminal angkutan barang	IKK 4.2.3	Rasio beroperasinya pelayanan terminal barang untuk mendukung konektivitas	Rasio	0,14
3	SK 7	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi jalan	IKK 7.1.3.A	Persentase beroperasinya layanan terminal tipe A dengan kapasitas sesuai SPM	%	90,47
			IKK 7.1.3.C	Persentase tindak lanjut kerjasama pengusahaan prasarana LLAJ sesuai pedoman	%	21
4	SK 9	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 9.4.3.A	Terlaksananya pengawasan kendaraan angkutan barang di fasilitas penimbangan sesuai SPM	%	1,12
			IKK 9.4.3.B	Rasio beroperasinya fasilitas penimbangan untuk mendukung keselamatan	Rasio	0,636
5	SK 13	Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal	IKK 13.1.3.A	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,38
			IKK 13.1.3.B	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	82,30
			IKK 13.1.3.C	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	94,10
			IKK 13.1.3.D	Indeks Pengelolaan Aset	Nilai	3,20
6	SK 14	Meningkatnya Layanan Perkantoran	IKK 14.1.3	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai	79,11

Kegiatan	Anggaran
1. Penunjang teknis transportasi darat	Rp 38.090.076.000,00
2. Pengelolaan Sistem Informasi dan Teknologi Transportasi Darat	Rp 610.670.000,00
3. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp 22.287.254.000,00

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- **Tahapan Pengukuran Kinerja**

Akuntabilitas Kinerja adalah Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

- **Pengukuran Capaian Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Tahapan Pengukuran Kinerja dilakukan melalui sistem aplikasi berbasis web *e-Performance* yang menyediakan fasilitas Inputing, updating dan monitoring pengukuran kinerja per bulan maupun triwulan yang dapat dimanfaatkan unit kerja Eselon I, II dan III mandiri di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, dengan alamat http://www.eperformance.dephub.go.id dimana dengan menggunakan sistem aplikasi ini pelaksanaan monitoring dapat dilakukan secara intensif sehingga penyelenggaraan manajemen kinerja organisasi menjadi optimal.

Guna memudahkan penggunaan sistem aplikasi tersebut, terus dilakukan upaya penyempurnaan atas sistem aplikasi tersebut agar para operator pada unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat lebih mudah menggunakan sistem aplikasi, di samping itu diupayakan pula bagi setiap operator yang bertugas menjalankan/melaksanakan sistem aplikasi dapat diberikan reward atas hasil kerjanya dan penilaian unit kerja masing-masing.

Melalui penggunaan aplikasi ini dapat dijadikan evaluasi rutin atas capaian kinerja secara periodik tiap bulannya, di mana hal ini menjadi salah satu materi yang direkomendasikan Tim Evaluator SAKIP dari Kementerian PAN dan RB, dimana gilirannya dapat meningkatkan nilai capaian hasil evaluasi SAKIP Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dimasa mendatang.

- **Metode Pengukuran**

Dalam menentukan nilai pengukuran kinerja, hasil pengukuran kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Prosentase. Adapun rumus yang digunakan dalam pengukuran kinerja Persentase pencapaian untuk Indikator Kinerja Kegiatan adalah sebagai berikut:

Persentase Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah ditetapkan cara perhitungan Persentase capaian kinerja sebagai berikut:

a. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin baik, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

b. Apabila realisasi pencapaian semakin tinggi menunjukkan kinerja yang semakin buruk, maka perhitungan pengukuran kinerja menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

- **Pengukuran Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025**

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran terhadap realisasi kinerja dan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya. Pengukuran capaian kinerja meliputi://

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024;
2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan;
3. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
4. Upaya untuk meningkatkan capaian dimasa yang akan datang.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing Indikator Kinerja Kegiatan.

Hasil pengukuran kinerja digunakan Analisis dan Evaluasi kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan Aplikasi *E-Performance*, Laporan Monitoring Capaian Kinerja Triwulanan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil pengukuran kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, diperoleh berdasarkan data realisasi masing-masing indikator kinerja. Untuk mewujudkan 3 (tiga) tujuan Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2025-2029, bermuara pada terwujudnya 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) yang ingin dicapai pada periode 2025-2029.

Tabel III. 1 Pengukuran Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	Q1			Q2			Q3			Q4		
				T	R	C	T	R	C	T	R	C	T	R	C
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)									
SK 3	**Meningkatnya rasio konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi**					**0,0%**			**100,00 %**			**100,00 %**			**100%**
IKK 3.2.3	Rasio beroperasinya layanan terminal tipe A untuk mendukung konektivitas	Rasio	0,852	0,852	0	0,00%	0,852	0,852	100,00 %	0,852	0,852	100,00 %	0,852	0,852	100,00 %
SK 4	**Meningkatnya rasio konektivitas layanan angkutan barang dengan terminal angkutan barang**					**0,00%**			0,00%			0,00%			**100%**
IKK 4.2.3	Rasio beroperasinya pelayanan terminal barang untuk mendukung konektivitas	Rasio	0,077	0,077	0	0,00%	0,077	0	0,00%	0,077	0	0,00%	0,14	0,14	100%
SK 07	**Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi jalan**					**52,78 %**			**52,78 %**			**52,78 %**			**100%**
IKK 7.1.3.A	Persentase beroperasinya layanan terminal tipe A dengan kapasitas sesuai SPM	%	90,47	90,47	90,47	100,00 %	90,47	90,47	100,00 %	90,47	90,47	100,00 %	90,47	90,47	100,00 %
IKK 7.1.3.B	Persentase ketersediaan dokumen penyiapan KPBU oleh simpul KPBU	%	60	60	0	0,00%	60	0	0,00%	60	0	0,00%	60	0	0,00%
IKK 7.1.3.C	Persentase tindak lanjut kerjasama pengusahaan prasarana LLAJ sesuai pedoman	%	60	60	35	58,33%	60	35	58,33%	60	35	58,33%	21	21	100%
SK 9	**Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang**					**0,0%**			**50,00 %**			**50,00 %**			**100%**
IKK 9.4.3.A	Terlaksananya pengawasan kendaraan angkutan barang di fasilitas penimbangan sesuai SPM	%	60	60	0	0,00%	60	0,0	0,00%	60	0,0	0,00%	1,12	1,2	100%
IKK 9.4.3.B	Rasio beroperasinya fasilitas penimbangan untuk mendukung keselamatan	Rasio	0,636	0,636	0	0,00%	0,636	0,636	100,00 %	0,636	0,636	100,00 %	0,636	0,636	100%
SK 13	**Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal**					**76,72 %**			**76,44 %**			**101,76 %**			**103,59 %**
IKK 13.1.3.A	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,38	3,38	3,382	100,06 %	3,38	3,382	100,06 %	3,38	3,382	100,06 %	3,38	3,382	100,06 %
IKK 13.1.3.B	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	82,30	82,30	82,76	100,56 %	82,30	82,76	100,56 %	82,30	82,76	100,56 %	82,30	82,76	100,56 %
IKK 13.1.3.C	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	94,10	94,10	100,00	106,27 %	94,10	98,92	105,12 %	94,10	98,48	104,65 %	94,10	96,12	102,15 %
IKK 13.1.3.D	Indeks Pengelolaan Aset	Nilai	3,20	3,20	0	0,00%	3,20	0	0,00%	3,20	3,56	111.25 %	3,20	3,56	111.25 %
SK 14	**Meningkatnya Layanan Perkantoran**					**0,0%**			**0,00%**			**40,35 %**			**100%**

IKK 14.1.3	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai	85,51	75	0	0,00%	75	0	0,00%	85.51	34.50	40.35%	79,11	79,11	100%
Rata-Rata Persentase Capaian Sasaran Kegiatan						**21,58 %**			**46,54 %**			**57,48 %**			**101,20 %**
Rata-Rata Persentase Capaian Indikator Kinerja Kegiatan						**35,79 %**			**51,08 %**			**60,33 %**			
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% (IKP≥100%)						**4**			**6**			**8**			
Jumlah Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 100% (0%≤IKP<100%)						**8**			**6**			**4**			

Sumber: Data diolah dari Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;

Jika dilihat lebih detail, pada Tahun 2025, berdasarkan Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025, pada Triwulan III Tahun 2025 dari 12 IKK Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, terdapat 8 (delapan) IKK dengan status hijau dengan kondisi lebih besar atau sama dengan 100% (IKP≥100%) dan 4 (empat) IKK dengan status merah dengan kondisi kurang dari 100% (0%≤IKP<100%).

Selama Tahun 2025, terdiri 6 (Enam) Sasaran Kegiatan (SK) dan di dalamnya terdapat 12 (Dua Belas) IKK Direktorat Prasarana Transportasi Jalan. Penjelasan capaian IKK untuk setiap Sasaran Kegiatan adalah sebagai berikut:

III.2.1. SK 3 Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Trayek Antar Kota dengan Terminal, Pusat Kegiatan (KEK, KSN & KI), Lintas Negara, dan Pedesaan Antar Provinsi

- **Uraian Kegiatan**

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merupakan salah satu direktorat di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025-2029. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mengawal dan memastikan kegiatan prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dalam IKK membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut, strategi yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka mewujudkan konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi.

Tabel III. 2 Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Trayek Antar Kota Dengan Terminal, Pusat Kegiatan (KEK, KSN & KI), Lintas Negara, dan Pedesaan antar Provinsi)

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	Q1	Q2	Q3	Q4
SK 3 Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Trayek Antar Kota Dengan Terminal, Pusat Kegiatan (KEK, KSN & KI), Lintas Negara, dan Pedesaan Antar Provinsi							
IKK 3.2.3	Rasio Beroperasinya Layanan Terminal Tipe A Untuk Mendukung Konektivitas	rasio	0,852				
		Target		0,852	0,852	0,852	0,852
		Realisasi		0	0,852	0,852	0,852
		Capaian		0,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Pencapaian Sasaran Kegiatan 01 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu: IKK 3.2.3. Rasio Beroperasinya Layanan Terminal Tipe A Untuk Mendukung Konektivitas;

III.2.1.1 IKK 3.2.3 Rasio Beroperasinya Layanan Terminal Tipe A Untuk Mendukung Konektivitas

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Rasio Konektivitas Jaringan Trayek Antar Kota Dengan Terminal, Pusat Kegiatan (KEK, KSN & KI), Lintas Negara, dan Pedesaan Antar Provinsi, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada IKK 3.2.3. Rasio Beroperasinya Layanan Terminal Tipe A Untuk Mendukung Konektivitas, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 3 Capaian Rasio Beroperasinya Layanan Terminal Tipe A Untuk Mendukung Konektivitas

SK 3	**Meningkatnya rasio konektivitas jaringan trayek antar kota dengan terminal, pusat kegiatan (KEK, KSN & KI), lintas negara, dan pedesaan antar provinsi**			
IKK 3.2.3	**Rasio Beroperasinya Layanan Terminal Tipe A Untuk Mendukung Konektivitas**			Satuan: Rasio
Target/Realisasi/Capaian	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**
Target	0,852	0,852	0,852	0,852
Realisasi	0	0,852	0,852	0,852
Capaian	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

IKK Rasio Beroperasinya Layanan Terminal Tipe A untuk Mendukung Konektivitas merupakan perbandingan antara Jumlah Terminal Tipe A beroperasi dengan Target Jumlah Terminal Tipe A beroperasi, sehingga rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

Rasio beroperasinya layanan terminal tipe A untuk mendukung konektivitas = Jumlah Terminal Tipe A beroperasi / Target Jumlah Terminal Tipe A beroperasi

Adapun *baseline* Jumlah Terminal Tipe A beroperasi sebanyak 121 pada awal tahun 2025 dan Target Terminal Tipe A beroperasi sebanyak 142 Terminal Tipe A dengan rincian 129 merupakan Terminal Tipe A eksisting berdasarkan Penetapan Lokasi dan Penetapan Kode Terminal Tipe A baik yang dikelola oleh Ditjen Perhubungan Darat maupun Pemerintah Daerah, sedangkan 13 diantaranya merupakan jumlah Terminal Tipe A yang direncanakan untuk dibangun berdasarkan inventarisasi kebutuhan pembangunan terminal pada *longlist* awal konsep Rencana Strategis Ditjen Perhubungan Darat Tahun 2025-2029.

a.4. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025

Realisasi kinerja Rasio Beroperasinya Layanan Terminal Tipe A Untuk Mendukung Konektivitas pada Tahun 2025 sebesar 0,852, jika dibandingkan dengan target Revisi II PK Tahun 2025 sebesar 0,852 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.1**. Grafik Capaian IKK 3.2.3 Rasio Beroperasinya Layanan Terminal Tipe A Untuk Mendukung Konektivitas.

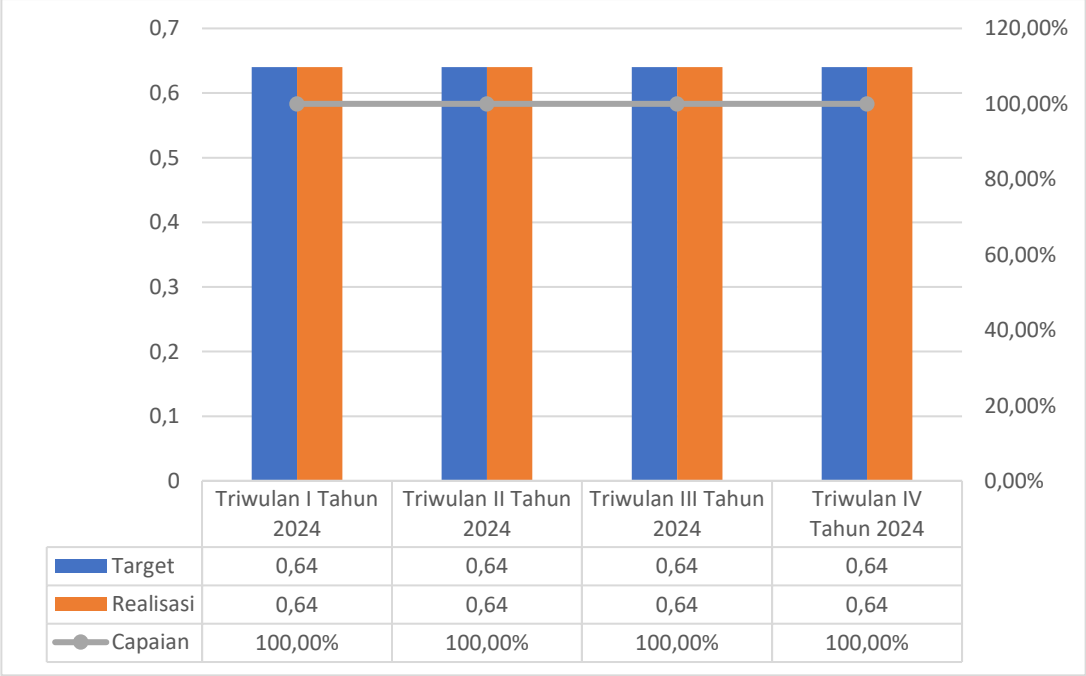

Gambar III. 1 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2025 terhadap Target Kinerja Tahun 2025 pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan IKK 1 Rasio Beroperasinya Layanan Terminal Tipe A Untuk Mendukung Konektivitas Tahun 2025)

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- **Narasi Dasar Hukum**

  Operasional Terminal Penumpang Tipe A dilaksanakan berdasarkan beberapa acuan peraturan dan keputusan antara lain :

  1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
  2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A Seluruh Indonesia;
  3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 150 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A Seluruh Indonesia;
  4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 100 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A Seluruh Indonesia.

- **Narasi Kronologi Target**

  Pada triwulan pertama, terdapat perubahan pada target indikator kinerja program Rasio Konektivitas Transportasi Jalan, yang awalnya ditetapkan berdasarkan proyeksi awal dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) sementara. Perubahan ini terjadi karena dokumen Renstra masih dalam tahap penyusunan, sehingga penyesuaian dilakukan untuk memastikan target yang lebih realistis dan sesuai dengan perkembangan terkini.

  Awalnya, target Rasio Konektivitas Transportasi Jalan ditetapkan dengan target yang tinggi, namun setelah mempertimbangkan kapasitas anggaran, infrastruktur yang tersedia, dan kebijakan baru yang sedang disusun, target tersebut disesuaikan agar lebih dapat dicapai dalam jangka waktu yang ditentukan.

Seiring berjalannya proses penyusunan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Tahun 2025-2029, terjadi penyesuaian terhadap rumus perhitungan IKK Rasio Beroperasinya Layanan Terminal Tipe A Untuk Mendukung Konektivitas. Dengan belum ditetapkannya Rencana Induk Terminal seluruh Indonesia, target Jumlah Terminal Tipe A beroperasi ditentukan berdasarkan perencanaan pembangunan Terminal Tipe A yang diinventarisir pada *longlist* awal *draft* Renstra Ditjen Perhubungan Darat dimana didapatkan jumlah 142 Terminal Tipe A (129 Terminal Tipe A eksisting dan 13 Terminal Tipe A yang direncanakan untuk dibangun).

Penyesuaian ini juga mengakomodasi faktor–faktor eksternal seperti potensi peningkatan volume kendaraan, kondisi geografis, dan prioritas pembangunan jalan yang tengah disiapkan dalam Renstra. Dengan perubahan tersebut, diharapkan indikator kinerja ini dapat lebih mencerminkan kondisi aktual dan lebih realistis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

- **Narasi Faktor Keberhasilan**

Keberhasilan terhadap operasional Terminal Penumpang Tipe A yaitu:

- Realisasi kinerja Rasio Beroperasinya Layanan Terminal Tipe A Untuk Mendukung Konektivitas pada Tahun 2025 sebesar 0,852, jika dibandingkan dengan target Revisi II PK Tahun 2025 sebesar 0,852 maka capaian kinerja mencapai 100%.
- Direktorat Prasarana Transportasi Jalan telah meningkatkan operasional Terminal Penumpang Tipe A melalui digitalisasi sistem informasi terminal dan pelaksanaan *excellent service*.
- Mengoptimalkan kegiatan Monitoring Operasional Terminal Penumpang Tipe A dengan melakukan pemantauan secara periodik terkait kegiatan operasional di Terminal Tipe A.

- **Narasi Faktor Kegagalan dan Potensi Kegagalan**

Adapun beberapa **kendala yang dihadapi dalam pengoperasian Terminal Penumpang Tipe A** antara lain:

1. Peningkatan Rasio Beroperasinya Layanan Terminal Tipe A Untuk Mendukung Konektivitas dilakukan dengan pengoperasian Terminal Tipe A melalui pembangunan terminal baru atau revitalisasi/peningkatan terminal yang sebelumnya tidak beroperasi;
2. Pembangunan Terminal Tipe A baru pada T.A. 2025 belum dapat terlaksana dikarenakan terkena efisiensi sehingga belum ada penambahan jumlah Terminal Tipe A yang beroperasi;
3. Revitalisasi/peningkatan terminal yang sebelumnya tidak beroperasi mengalami beberapa kendala antara lain status aset yang belum *clean and clear* dan jalan akses yang tidak memadai.

- **Narasi Realisasi Kinerja**

Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan realisasi tahun 2025 sebagai berikut:

- Jumlah Terminal Tipe A beroperasi = 121 terminal
- Target Jumlah Terminal Tipe A beroperasi = 142 terminal

Rasio Beroperasinya Layanan Terminal Tipe A Untuk Mendukung Konektivitas =

Jumlah Terminal Tipe A beroperasi / Target Jumlah Terminal Tipe A beroperasi = 121 / 142 = 0,852.

- **Narasi Capaian Kinerja**

  Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Rasio Beroperasinya Layanan Terminal Tipe A Untuk Mendukung Konektivitas pada Triwulan pada Tahun 2025 terhadap target PK Tahun 2025 yaitu sebesar:

  % capaian = 0,852 / 0,852 = 100%

  Pada Tahun 2025 masih belum terdapat penambahan jumlah Terminal tipe A yang beroperasi dikarenakan beberapa terminal masih dalam proses serah terima dan pembangunan terminal baru yang terkena efisiensi

- **Narasi Realisasi Anggaran**

  Adapun anggaran untuk kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Kegiatan Rasio Beroperasinya Layanan Terminal Tipe A Untuk Mendukung Konektivitas pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 10.002.313.000,- dengan realisasi anggaran senilai Rp. 333.473.325,- atau mencapai 94,53%.

Tabel III. 4 Realisasi Anggaran

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Pagu Awal	Pagu TW IV	Realisasi TW I		Realisasi TW II		Realisasi TW III		Realisasi TW IV	
			Keuangan (Rp)	Pagu (%)	Keuangan (Rp)	Pagu (%)	Keuangan (Rp)	Pagu (%)	Keuangan (Rp)	Pagu (%)
GA Program Infrastruktur Konektivitas										
SK 1. **Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi**										
IKK 1. Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	Rp865.307.000,00	Rp387.505.000	Rp270.854.096,00	31,30%	Rp442.515.529,00	45,94%	Rp805.840.040	74,22%	Rp374.124.470	96,55%
1. Monitoring Identifikasi Simpul dan Lokasi Terminal Angkutan Jalan;										

Berdasarkan tabel di atas, dijelaskan bahwa terdapat perubahan anggaran pada triwulan IV sebesar Rp.477.802.000,- yaitu adanya pemindahan kegiatan Monitoring Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan/ Rehabilitasi Terminal Angkutan Jalan ke IKK Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi karena Kegiatan Rehabilitasi termasuk dalam implementasi kegiatan pengoperasian Terminal.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Meningkatkan jumlah Terminal Tipe A yang beroperasi melalui pembangunan terminal baru, revitalisasi dan rehabilitasi terminal eksisting;
2. Meningkatkan kualitas layanan terminal melalui pemenuhan SPM Terminal Tipe A, dan pelaksanaan *excellent service* untuk meningkatkan minat pengguna terminal maupun operator bus untuk menaik-turunkan penumpang di terminal;
3. Mengusulkan kegiatan pembangunan dengan mempertimbangkan skala prioritas sesuai dengan target pada sasaran strategis yang telah ditetapkan;
4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020

Realisasi kinerja Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan tahun 2024 sebesar 0,64 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Revisi II Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan tahun 2024 sebesar 0,64 maka capaian kinerja mencapai 100% sedangkan pada tahun sebelumnya realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 0,64 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 dalam Revisi II Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan tahun 2023 sebesar 0,62 maka capaian kinerja mencapai 103,23%. Pada tahun 2022 capaian kinerja Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan sebesar 0,62 dengan target 0,61 maka capaian kinerja mencapai 101,64%. Pada tahun 2021 realisasi kinerja sebesar 0,61 dengan target 0,61 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pada tahun 2020 realisasi kinerja sebesar 0,58 dengan target 0,58 maka capaian kinerja mencapai 100% Sehingga realisasi kinerja Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,02 dari tahun 2022 dan mengalami kenaikan sebesar 0,03 dari tahun 2021 serta kenaikan sebesar 0,06 dari tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini:

Tabel III. 5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020

SK.1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi						
No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik/Turun
1	2020	IKK 1	0,58	0,58	100%	Tetap
2	2021	IKK 1	0,61	0,61	100%	Tetap
3	2022	IKK 1	0,61	0,62	101,64%	Naik
4	2023	IKK 1	0,62	0,64	103,23%	Naik
5	2024	IKK 1	0,64	0,64	100%	Tetap

Gambar III. 2 Perbandingan Target Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, 2022, 2021, dan 2020

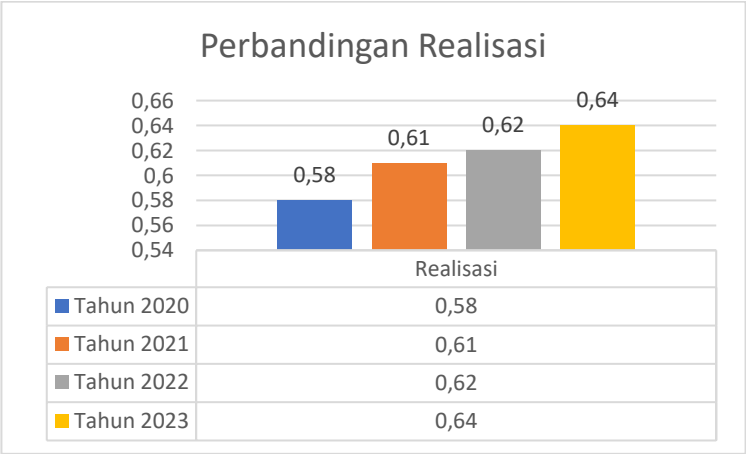

Gambar III. 3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, 2022, 2021, dan 2020

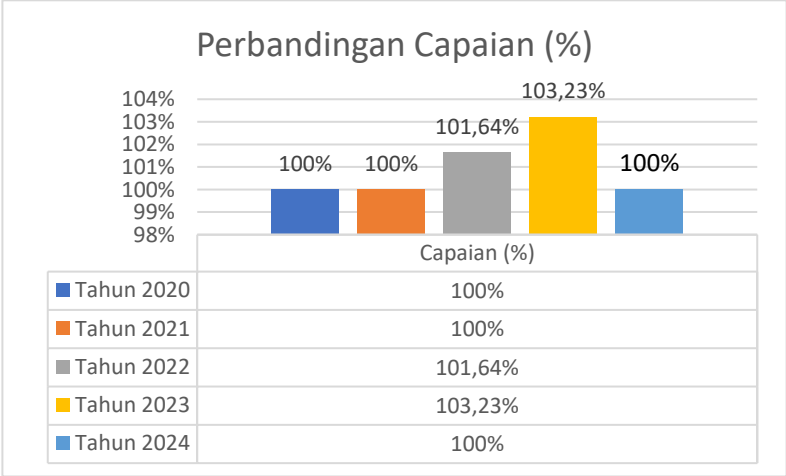

Gambar III. 4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, 2022, 2021, dan 2020

Capaian Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan pada tahun 2024 merupakan komitmen terhadap ketersediaan simpul prasarana transportasi jalan

antara lain Terminal Penumpang Tipe A, Terminal Barang Umum, dan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda pada Kawasan Strategis Nasional. Sehingga capaian Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan tahun 2024 adalah 100,00% atau mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu sebesar 103,23% karena target meningkat dari 0,62 menjadi 0,64 dengan realisasi yaitu 0,64 pada IKK Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan.

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020 – 2024

Realisasi Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan tahun 2024 sebesar 0,64 jika dibandingkan dengan target dalam Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024 sebesar 0,70 maka capaian kinerja mencapai 91%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.2**.

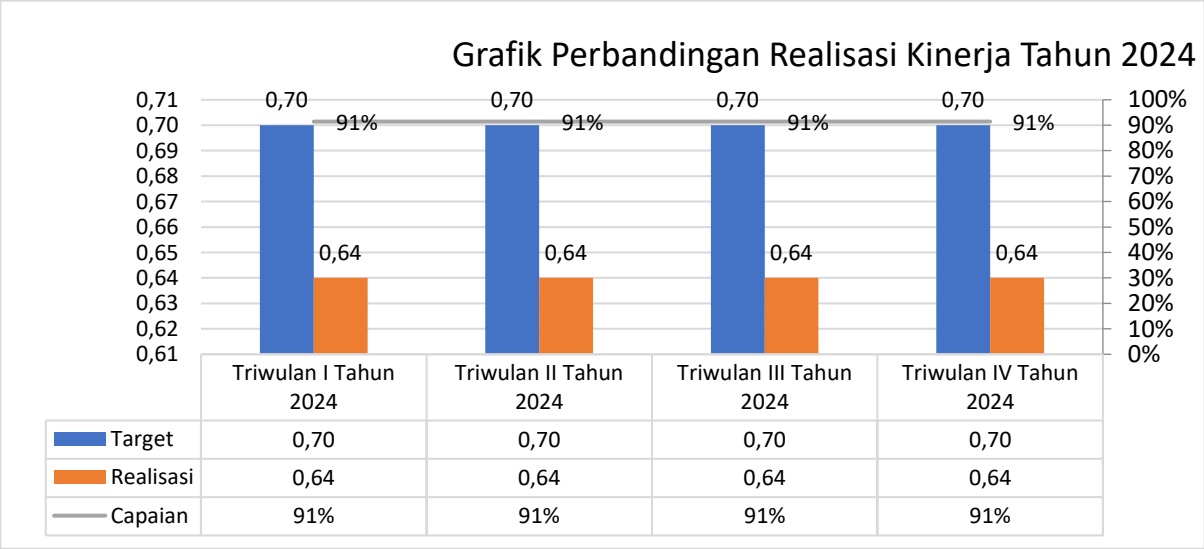

Gambar III.5 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020 - 2024 (IKK 1 Rasio Kawasan Strategis Nasional yang terlayani Simpul Prasarana Transportasi Jalan)

a.7. Benchmark Nasional

Benchmark untuk Rasio Kawasan Strategis Nasional yang terlayani Terminal Penumpang Tipe A menggunakan data dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan RI. Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2024, terdapat 49 Pusat Kegiatan Nasional (PKN)/Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)/Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang telah terhubungan dengan jaringan jalur Kereta Api pada tahun 2023. Jika dibandingkan dengan target Rencana Induk Perkeretaapian Nasional sebanyak 104 lokasi PKN/PKW/KSN maka capaiannya sebesar 47,12%. Untuk Terminal Penumpang Tipe A, jumlah Kawasan Strategis Nasional (KSN) Prioritas yang sudah terlayani sebanyak 41 KSN dari total 69 KSN yang direncanakan untuk dilayani, sehingga rasio capaiannya sebesar 59,42%. Dari perbandingan tersebut dapat disimpulkan bahwa dari segi persentanse kawasan strategis yang dilayani, Terminal Penumpang Tipe A lebih baik dibanding kereta api, akan tetapi menjadi catatan bahwa untuk kereta api target kawasan strategis yang dilayani memang lebih banyak dibanding terminal.

Benchmark nasional untuk Persentase Penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda menggunakan data dari BPTJ pada tahun 2024. Di BPTJ, penyediaan halte untuk melayani operasional angkutan perkotaan Bis Kita Trans Pakuan. Sama seperti Halte di wilayah KSPN yang disediakan untuk melayani angkutan umum yang ada disekitar wilayah tersebut. Terdapat 67 fasilitas pendukung dan integrasi moda berupa halte permanen, portable dan bus stop yang berlokasi di wilayah operasional Trans Pakuan. Sebagai perbandingan, jumlah halte di wilayah KSPN yang telah disediakan di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berjumlah 24 yang tersebar di 2 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia.

III.2.1.2 SK 4 Meningkatnya Rasio Konektivitas Layanan Angkutan Barang dengan Terminal Angkutan Barang

- **Uraian Kegiatan**

  Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merupakan salah satu direktorat di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025-2029. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mengawal dan memastikan kegiatan prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dalam IKK membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut, strategi yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan transportasi darat.

Tabel III. 6 Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya Rasio Konektivitas Layanan Angkutan Barang dengan Terminal Angkutan Barang

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	Q1	Q2	Q3	Q4
SK 4 Meningkatnya Rasio Konektivitas Layanan Angkutan Barang Dengan Terminal Angkutan Barang							
IKK 4.2.3	Rasio Beroperasinya Pelayanan Terminal Barang Untuk Mendukung Konektivitas	rasio	0,14				
		Target		0,077	0,077	0,077	0,14
		Realisasi		0	0	0	0,14
		Capaian		0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Pencapaian Sasaran KEgiatan 4 diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu IKK 4.2.3 Rasio Beroperasinya Pelayanan Terminal Barang untuk mendukung Konektivitas;

1. **IKK 1 4.2.3 Rasio Beroperasinya Pelayanan Terminal Barang Untuk Mendukung Konektivitas**

   Keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya Rasio Konektivitas Layanan Angkutan Barang Dengan Terminal Angkutan Barang pada IKK Rasio Beroperasinya Pelayanan Terminal Barang Untuk Mendukung Konektivitas, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 7 Capaian Rasio Beroperasinya Pelayanan Terminal Barang Untuk Mendukung Konektivitas

SK 4	**Meningkatnya Rasio Konektivitas Layanan Angkutan Barang Dengan Terminal Angkutan Barang**			
IKK 4.2.3	**Rasio Beroperasinya Pelayanan Terminal Barang Untuk Mendukung Konektivitas**			**Satuan: Rasio**
Target/Realisasi/Capaian	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**
Target	0,077	0,077	0,077	0,14
Realisasi	0	0	0	0,14
Capaian	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Rasio Beroperasinya Pelayanan Terminal Barang Untuk Mendukung Konektivitas merupakan perbandingan antara Jumlah Terminal Barang yang dioperasionalkan oleh Ditjen Hubdat dengan Target Terminal Barang beroperasi 2025-2029, sehingga rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

Rasio beroperasinya layanan terminal barang untuk mendukung konektivitas = Jumlah Terminal Barang yang dioperasionalkan oleh Ditjen Hubdat / Target Terminal Barang beroperasi 2025-2029.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024

Realisasi kinerja IKK Rasio beroperasinya pelayanan terminal barang untuk mendukung konektivitas pada Tahun 2025 sebesar 100% jika dibandingkan dengan target Revisi II PK Tahun 2025 sebesar 0,14 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.4**. Grafik Capaian IKK Rasio beroperasinya pelayanan terminal barang untuk mendukung konektivitas.

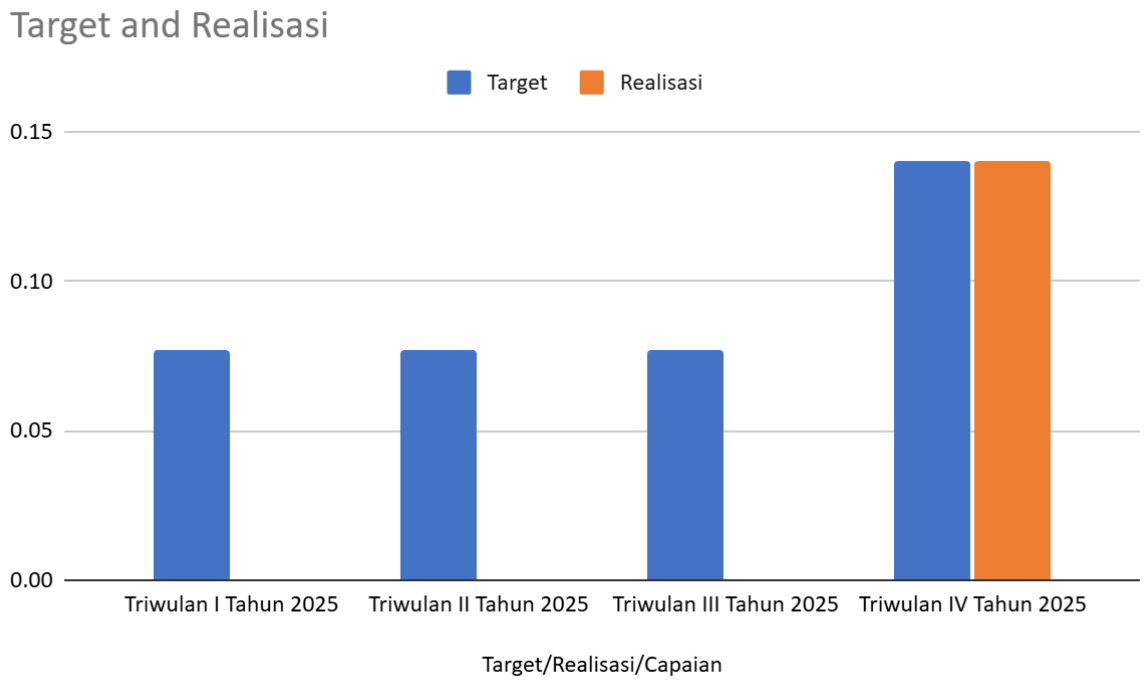

Gambar III. 6 Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 4.2.3 Rasio beroperasinya pelayanan terminal barang untuk mendukung konektivitas)

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- **Narasi Dasar Hukum**

  Dalam rangka memberikan pedoman bagi penyelenggara terminal barang dalam memberikan pelayanan dan jasa kepada seluruh pengguna terminal, ditetapkanlah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 102 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Terminal Barang. Peraturan ini memuat standar pelayanan yang wajib disediakan dan dilaksanakan oleh penyelenggara terminal yang meliputi :

  1. Pelaksanaan standar operasional prosedur Terminal Barang untuk Umum;
  2. Kinerja dan kompetensi sumber daya manusia;
  3. Pemanfaatan fasilitas utama dan fasilitas penunjang;
  4. Keamanan dan kebersihan lingkungan kerja;
  5. Pemanfaatan teknologi informasi;
  6. Penerapan standar keselamatan kerja;
  7. Kelancaran lalu lintas di dalam dan di sekitar Terminal Barang untuk Umum.

- **Narasi Kronologi Target**

  Pada triwulan pertama, terdapat perubahan pada target indikator kinerja kegiatan Rasio beroperasinya pelayanan terminal barang untuk mendukung konektivitas, yang awalnya ditetapkan berdasarkan proyeksi awal dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) sementara. Perubahan ini terjadi karena dokumen Renstra masih dalam tahap penyusunan, sehingga penyesuaian dilakukan untuk memastikan target yang lebih realistis dan sesuai dengan perkembangan terkini.

Awalnya, target indikator kinerja kegiatan Rasio beroperasinya pelayanan terminal barang untuk mendukung konektivitas ditetapkan dengan target yang tinggi, namun setelah mempertimbangkan kapasitas anggaran, infrastruktur yang tersedia, dan kebijakan baru yang sedang disusun, target tersebut disesuaikan agar lebih dapat dicapai dalam jangka waktu yang ditentukan. Dengan perubahan tersebut, diharapkan indikator kinerja ini dapat lebih mencerminkan kondisi aktual dan lebih realistis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

- **Narasi Faktor Keberhasilan**
  - Mengoperasikan Terminal Barang Untuk Umum yang telah selesai dibangun meskipun kendaraan barang belum ada yang masuk terminal supaya bangunan tetap terawat dengan baik;
  - Tetap melanjutkan progres pembangunan Terminal Barang Untuk Umum sesuai Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015, akan tetapi karena terdapat keterbatasan anggaran sehingga pembangunan lanjutan diprioritaskan pada Terminal Barang Untuk Umum yang memiliki permintaan/demand yang cukup besar;
  - Koordinasi dengan pihak terkait khususnya instansi yang membidangi Customs, Quarantine, Immigration and Security (CQIS) dikarenakan operasional Terminal Barang Untuk Umum yang menangani kegiatan ekspor impor harus memiliki fasilitas CQIS.

- **Narasi Faktor Kegagalan dan Potensi Kegagalan**

  Sedangkan beberapa kendala yang dihadapi dalam beroperasinya pelayanan terminal barang untuk mendukung konektivitas antara lain :

  1. Terdapat kendala operasional kendaraan barang belum masuk ke terminal dikarenakan kesepakatan dengan negara lain masih dalam proses administrasi, pembangunan jalan khusus belum selesai dibangun dan penetapan pengelola yang terkendala masalah lahan.
  2. Terdapat backlog kegiatan pembangunan Terminal Barang Untuk Umum lanjutan karena keterbatasan anggaran sehingga pembangunan lanjutan tidak dapat dilaksanakan pada semua terminal yang belum selesai dibangun.
  3. Operasional kendaraan barang masuk ke Terminal Barang Untuk Umum tergantung pada kesepakatan antara 2 negara terkait Standar Operasional Prosedur ekspor-impor komoditi.

- **Narasi Realisasi Kinerja**

  Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan realisasi Pada tahun 2025 sebagai berikut :

  1. Jumlah Terminal Barang yang dioperasionalkan oleh Ditjen Hubdat = 0 terminal
  2. Target Terminal Barang beroperasi 2025-2029 = 7 terminal

  Rasio Beroperasinya Layanan Terminal Barang Untuk Mendukung Konektivitas =

  Jumlah Terminal Barang yang dioperasionalkan oleh Ditjen Hubdat / Target Terminal Barang beroperasi 2025-2029 = 0/7 = 0,00

- **Narasi Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Rasio beroperasinya pelayanan terminal barang untuk mendukung konektivitas Triwulan III Tahun 2025 terhadap target Revisi I PK Tahun 2025 yaitu sebesar:

% *capaian* = 0,14 / 0,14 = 100 %

- **Realisasi Anggaran**

Realisasi anggaran untuk Kegiatan yang mendukung indikator kinerja Rasio beroperasinya pelayanan terminal barang untuk mendukung konektivitas pada Tahun 2025 dengan Pagu anggaran sebesar Rp449.896.000,- dengan posisi pada tahun 2025 terdapat realisasi senilai Rp.449.895.144,- atau mencapai 100%;

Tabel III. 7 Realisasi Anggaran

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW IV	REALISASI TW I		REALISASI TW II		REALISASI TW III		REALISASI TW IV	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
GA Program Infrastruktur Konektivitas										
Meningkatnya Rasio Konektivitas Layanan Angkutan Barang Dengan Terminal Angkutan Barang										
IKK 4.2.3. Rasio beroperasinya pelayanan terminal barang untuk mendukung konektivitas 1. Monitoring dan Evaluasi Terminal Barang.	Rp269.332.000	Rp449.896.000	Rp0,00	0%	Rp0,00	0%	Rp199.888.156	44,42 %	Rp449.896.144	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada pagu tahun 2025 terdapat perubahan anggaran sebesar Rp449.896.000,-, karena adanya tambahan kegiatan terminal barang, yaitu Monitoring dan Evaluasi Terminal Barang, semula Rp. 269.332.000,- menjadi Rp449.896.000,-.

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Meningkatkan jumlah Terminal Barang yang siap beroperasi melalui percepatan terhadap pemenuhan administrasi sesupai persyaratan;
2. Meningkatkan kapasitas operasi layanan Terminal barang melalui revitalisasi dan rehabilitasi terminal eksisting;
3. Meningkatkan pemenuhan SPM Terminal barang melalui peningkatan fasilitas melalui revitalisasi, rehabilitasi dan pemeliharaan;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan di Terminal barang melalui sertifikasi dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di Terminal barang.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020

Realisasi kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi tahun 2024 sebesar 108 lokasi jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Revisi II Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024 sebesar 108 lokasi maka capaian kinerja mencapai 100,00%. Realisasi kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi tahun 2023 sebesar 108 lokasi jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 dalam Revisi II Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun benchmark sebelumnya tahun 2022 realisasi kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi sebesar 105 lokasi dengan target 104 lokasi maka capaian kinerja mencapai 100,96%. Pada tahun 2021 realisasi kinerja sebesar 104 dengan target 104 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pada tahun 2020 realisasi kinerja sebesar 104 dengan target 104 maka capaian kinerja mencapai 100%. Sehingga realisasi kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 3 dari tahun 2022 dan mengalami kenaikan sebesar 4 dari tahun 2021 dan tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini:

Tabel III. 8 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2023, 2022, 2020 dan 2021

SK.1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi						
No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik/Turun
1	2020	IKK 2	104	104	100%	Tetap
2	2021	IKK 2	104	104	100%	Tetap
3	2022	IKK 2	104	105	100,96%	Naik
4	2023	IKK 2	108	108	100%	Tetap
5	2024	IKK 2	108	108	100%	Tetap

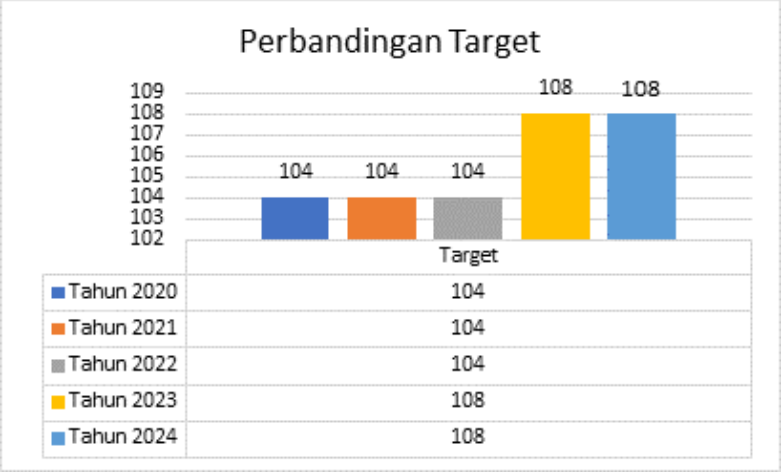

Gambar III. 7 Perbandingan Target Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020

Gambar III. 8 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020

Gambar III. 9 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020

Capaian Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi pada tahun 2024 merupakan komitmen terhadap pengoperasian Terminal Penumpang Tipe A dan Terminal Barang Umum yang sesuai dengan kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Sehingga realisasi Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi tahun 2024 adalah 108 lokasi atau capaian kinerjanya turun yaitu 100%, dibanding dengan capaian pada tahun 2023 adalah 108 lokasi atau capaian kinerjanya tetap yaitu 100%. Dibanding dengan capaian pada tahun 2022 yaitu sebesar 100,96% dimana target pada Tahun 2023 naik dari 105 lokasi menjadi 108 lokasi.

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 Pada Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020 – 2024

Realisasi Kinerja Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi tahun 2024 sebesar 108 lokasi jika dibandingkan dengan target dalam Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2024 sebesar 114 lokasi maka capaian kinerja mencapai 95%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.4**.

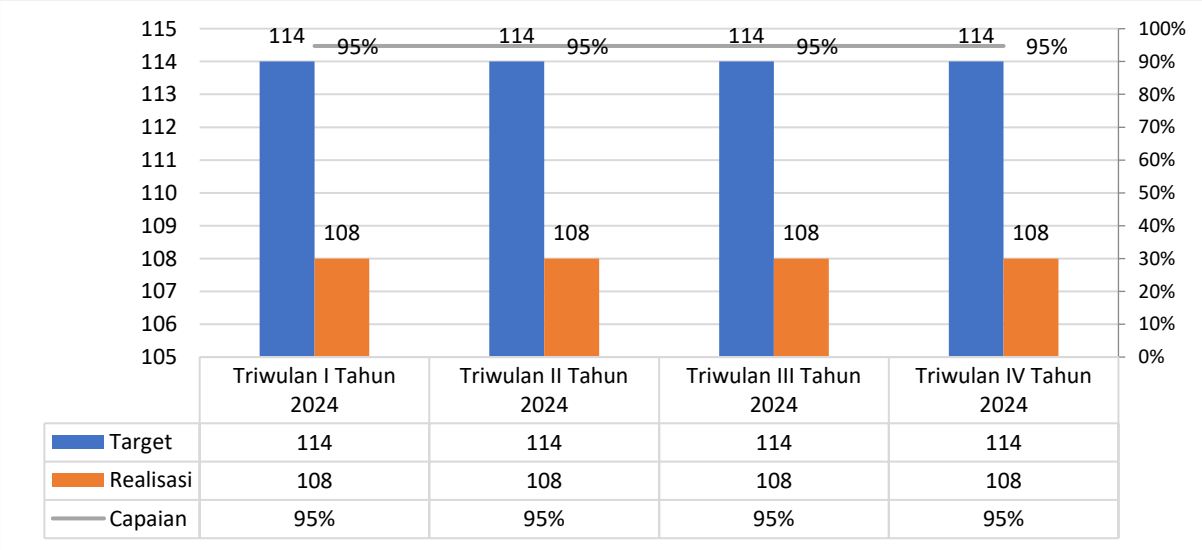

Gambar III.10 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020 - 2024 (IKK 2 Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi)

a.7. Benchmark Internasional

Benchmark Internasional untuk Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang Beroperasi menggunakan data dari negara India. Di India, Terminal Tipe A atau terminal yang melayani trayek antar provinsi (negara bagian dan union territories) disebut sebagai *Inter-State Bus Terminal* (ISBT). Sama seperti Terminal Tipe A di Indonesia, ISBT juga melayani trayek dalam provinsi (negara bagian). Terdapat 62 ISBT yang berlokasi di 18 negara bagian dari total 28 negara bagian dan 8 union territories (36 daerah setingkat provinsi). Sebagai perbandingan, jumlah Terminal Tipe A yang beroperasi di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berjumlah 107 yang berlokasi di 28 dari total 38 provinsi di Indonesia.

Dari data tersebut dapat disimpulkan beberapa hal diantaranya dari segi persentase jumlah provinsi/negara bagian yang dilayani terhadap jumlah total provinsi/negara bagian, Indonesia memiliki angka yang lebih baik yaitu 73,68% dibandingkan India diangka 50%. Begitupun dari rasio/perbandingan jumlah terminal terhadap jumlah total provinsi/negara bagian dimana untuk Indonesia diangka 2,82 (107 terminal dibagi 38 provinsi) sedangkan untuk India di angka 1,72 (62 terminal dibagi 36 daerah setingkat provinsi). Namun yang perlu menjadi catatan adalah

persebaran Terminal Tipe A di Indonesia yang masih belum merata dimana mayoritas berlokasi di pulau Jawa dan Sumatera.

III.2.2.3 SK 7 Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan merupakan salah satu direktorat di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat yang mempunyai peran strategis dalam mendorong pemangku kepentingan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan di bidang transportasi darat yang dirumuskan dalam RPJMN dan Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025-2029. Kegiatan pembangunan dan pelayanan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mengawal dan memastikan kegiatan prioritas pembangunan nasional direncanakan, dan dilaksanakan, memiliki daya saing dan nilai tambah serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sehingga hasil pembangunan dan pelayanan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dalam IKK membangun negara sesuai tugas dan wewenangnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan negara. Untuk mendukung kebijakan tersebut, strategi yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan adalah dengan mewujudkan pelayanan transportasi darat yang handal, berdaya saing dan memberikan nilai tambah dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan transportasi darat.

Tabel III. 9 Sasaran Kegiatan 7 Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	Q1	Q2	Q3	Q4
SK 7 Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan							
IKK 7.1.3. A	Persentase beroperasinya layanan terminal tipe A dengan kapasitas sesuai SPM	%	60				
		Target		90,47	90,47	90,47	90,47
		Realisasi		90,47	90,47	90,47	90,47
		Capaian		100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
IKK 7.1.3. B	Persentase Ketersediaan Dokumen Penyiapan KPBU Oleh Simpul KPBU	%	60				
		Target		60	60	60	60
		Realisasi		0	0	0	0
		Capaian		0%	0%	0%	0%
IKK 7.1.3. C	Persentase Tindak Lanjut Kerjasama Pengusahaan Prasarana LLAJ Sesuai Pedoman	%					
		Target		60	60	60	21
		Realisasi		35	35	35	21
		Capaian		58,33 %	58,33 %	58,33 %	100%

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Pencapaian Sasaran Kegiatan 4 diukur melalui Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:

1. IKK 7.1.3.A Persentase beroperasinya layanan terminal tipe A dengan kapasitas sesuai SPM;
2. IKK 7.1.3.B Persentase Ketersediaan Dokumen Penyiapan KPBU Oleh Simpul KPBU
3. IKK 7.1.3.C Persentase Tindak Lanjut Kerjasama Pengusahaan Prasarana LLAJ Sesuai Pedoman

1. IKK 7.1.3.A Persentase Beroperasinya Layanan Terminal Tipe A Dengan Kapasitas Sesuai SPM

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Beroperasinya Layanan Terminal Tipe A Dengan Kapasitas Sesuai SPM, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 10 Capaian Persentase Beroperasinya Layanan Terminal Tipe A Dengan Kapasitas Sesuai SPM

SK 7	**Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi jalan**			
IKK 7.1.3.A	**Persentase Beroperasinya Layanan Terminal Tipe A Dengan Kapasitas Sesuai SPM**			**Satuan: %**
Target/Realisasi/Capaian	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**
Target	90,47%	90,47%	90,47%	90,47%
Realisasi	90,47%	90,47%	90,47%	90,47%
Capaian	100%	100%	100%	100%

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Rasio Beroperasinya layanan terminal tipe A dengan kapasitas sesuai SPM merupakan perbandingan antara kapasitas operasi layanan Terminal Tipe A sesuai SPM dengan kapasitas operasi layanan Terminal Tipe A dalam satuan persen (%). Adapun formula perhitungannya sebagai berikut :

Rasio Beroperasinya layanan terminal tipe A dengan kapasitas sesuai SPM = Jumlah Peron Keberangkatan Bus x Jam Operasi Terminal per Hari x Kapasitas Maksimal Peron per Jam x Jumlah Hari Operasi per Tahun

Rasio Beroperasinya layanan terminal tipe A dengan kapasitas sesuai SPM = Kapasitas operasi layanan Terminal Tipe A dari terminal-terminal yang memenuhi SPM jalur keberangkatan. Adapun kriteria pemenuhan SPM jalur keberangkatan bus sebagai berikut :

1. Letak Jalur pemberangkatan kendaraan tetap dan teratur;
2. Letak jalur pemberangkatan kendaraan terpisah dengan jalur penurunan penumpang;
3. Letak jalur pemberangkatan kendaraan tidak boleh terdapat crossing dengan kendaraan lain

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024

Realisasi kinerja Persentase Beroperasinya Layanan Terminal Tipe A Dengan Kapasitas Sesuai SPM sebesar 90,47% jika dibandingkan dengan target Revisi II PK Tahun 2025 sebesar 90,47% maka capaian kinerja mencapai 100%. Pencapaian ini digambarkan pada Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.5**. Grafik Capaian IKK Persentase Beroperasinya Layanan Terminal Tipe A Dengan Kapasitas Sesuai SPM.

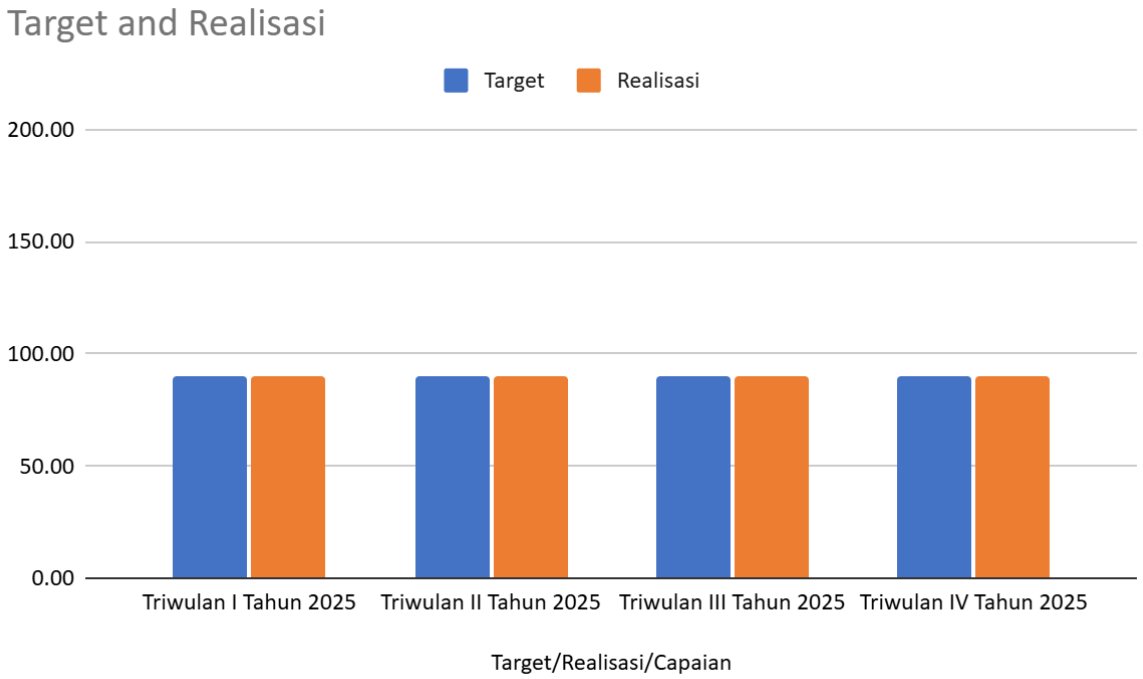

Gambar III. 11 Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 2 Jumlah Persentase beroperasinya layanan terminal tipe A dengan kapasitas sesuai SPM)

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- **Narasi Dasar Hukum**
  Dalam rangka memberikan pedoman bagi penyelenggara terminal angkutan jalan dalam memberikan pelayanan jasa kepada seluruh pengguna terminal, ditetapkanlah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan. Peraturan ini memuat standar pelayanan yang wajib disediakan dan dilaksanakan oleh penyelenggara terminal yang meliputi :
  1. Pelayanan keselamatan;
  2. Pelayanan keamanan;
  3. Pelayanan kehandalan/keteraturan;
  4. Pelayanan kenyamanan;
  5. Pelayanan kemudahan/keterjangkauan;
  6. Pelayanan kesetaraan.

- **Narasi Kronologi Target**

Pada triwulan pertama, terdapat perubahan pada target indikator kinerja program Rasio Konektivitas Transportasi Jalan, yang awalnya ditetapkan berdasarkan proyeksi awal dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) sementara. Perubahan ini terjadi karena dokumen Renstra masih dalam tahap penyusunan, sehingga penyesuaian dilakukan untuk memastikan target yang lebih realistis dan sesuai dengan perkembangan terkini.

Awalnya, target Rasio Konektivitas Transportasi Jalan ditetapkan dengan target yang tinggi, namun setelah mempertimbangkan kapasitas anggaran, infrastruktur yang tersedia, dan kebijakan baru yang sedang disusun, target tersebut disesuaikan agar lebih dapat dicapai dalam jangka waktu yang ditentukan. Penyesuaian ini juga mengakomodasi faktor–faktor eksternal seperti potensi peningkatan volume kendaraan, kondisi geografis, dan prioritas pembangunan jalan yang tengah disiapkan dalam Renstra. Dengan perubahan tersebut, diharapkan indikator kinerja ini dapat lebih mencerminkan kondisi aktual dan lebih realistis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

- **Narasi Faktor Keberhasilan**

1. Realisasi kinerja Persentase Beroperasinya Layanan Terminal Tipe A Dengan Kapasitas Sesuai SPM sebesar 90,47% yang tergolong cukup tinggi dipengaruhi oleh terminal-terminal yang memenuhi SPM jalur keberangkatan memiliki kapasitas yang operasional yang besar jika dibandingkan dengan terminal-terminal yang tidak memenuhi SPM jalur keberangkatan;
2. Peningkatan implementasi zonasi pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Pengoperasian Terminal berkontribusi dalam pemenuhan SPM jalur keberangkatan.

- **Narasi Faktor Kegagalan**

1. Masih cukup banyak Terminal Tipe A yang belum memenuhi kriteria SPM jalur keberangkatan namun sebagian besar diantaranya memiliki kapasitas yang rendah sehingga tidak terlalu berpengaruh pada perhitungan rasio;
2. Peraturan terkait standar pelayanan terminal perlu diperbarui mengingat belum memuat mekanisme perhitungan atau penilaian pemenuhan SPM;
3. Peningkatan kapasitas terminal sesuai SPM pada tahun ini terkendala adanya efisiensi anggaran.

- **Narasi Realisasi Kinerja**

Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan realisasi Triwulan IV tahun 2025 sebagai berikut:

a) Kapasitas operasi layanan Terminal Tipe A = 36.456.565 kendaraan/tahun
b) Kapasitas operasi layanan Terminal Tipe A sesuai SPM = 33.622.340 kendaraan/tahun

Rasio Beroperasinya layanan terminal tipe A dengan kapasitas sesuai SPM =

Kapasitas operasi layanan Terminal Tipe A sesuai SPM / Kapasitas operasi layanan Terminal Tipe A = 33.622.340 / 37.166.125 x 100% = 90,47%.

- **Narasi Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Rasio Beroperasinya layanan terminal tipe A dengan kapasitas sesuai SPM pada Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\%\ Capaian = \frac{90{,}47}{90{,}47}\ x\ 100\% = 100\%$$

- **Narasi Realisasi Anggaran**

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025 untuk mendukung capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Beroperasinya Layanan Terminal Tipe A Dengan Kapasitas Sesuai SPM adalah melalui:

Tabel II 10 Realisasi Anggaran

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW IV	REALISASI TW IV	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
GA Program Infrastruktur Konektivitas				
SK 7. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan				
IKK 7.1.3.A Persentase beroperasinya layanan terminal tipe A dengan kapasitas sesuai SPM Kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan ini yaitu: 1. Sertifikasi Kompetensi Pengelolaan Terminal Angkutan Jalan; 2. Monitoring Pelaksanaan Excellent Service Terminal Angkutan Jalan; 3. Monitoring dan Evaluasi Terminal Penumpang 4. Sosialisasi Implementasi TOS dalam dukungan Nataru	Rp352.749.000,-	Rp1.004.231.000,-	Rp180.725.212,-	18,00%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas operasi layanan Terminal Tipe A melalui pembangunan terminal baru, revitalisasi dan rehabilitasi terminal eksisting;
2. Meningkatkan pemenuhan SPM Terminal Tipe A melalui peningkatan fasilitas melalui revitalisasi, rehabilitasi dan pemeliharaan terminal;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan di Terminal Tipe A misalnya dengan pelaksanaan excellent service untuk meningkatkan minat pengguna terminal maupun operator bus untuk menaik-turunkan penumpang di terminal.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020

Realisasi kinerja Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda tahun 2024 sebesar 13 lokasi jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Revisi II Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024 sebesar 13 lokasi maka capaian kinerja mencapai 100%. Realisasi kinerja Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda tahun 2023 sebesar 12 lokasi jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 dalam Revisi II Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023 sebesar 12 lokasi maka capaian kinerja mencapai 100% sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2022 realisasi kinerja Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda sebesar 12 dengan target 11 maka capaian kinerja mencapai 109,09%. Pada tahun 2021 realisasi kinerja sebesar 8 dengan target 8 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pada tahun 2020 realisasi kinerja sebesar 4 dengan target 4 maka capaian kinerja mencapai 100%. Sehingga realisasi kinerja Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda tahun 2023 tetap apabila dibandingkan dengan tahun 2022, namun mengalami kenaikan sebesar 4 dari tahun 2021 serta mengalami kenaikan sebesar 8 dari tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini:

Tabel III. 11 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2023, 2022, 2021, dan 2020

SK.1 Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi						
No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik/Turun
1	2020	IKK 3	4	4	100,00%	Tetap
2	2021	IKK 3	8	8	100,00%	Tetap
3	2022	IKK 3	11	12	109,09%	Naik
4	2023	IKK 3	12	12	100,00%	Tetap
5	2024	IKK 3	13	13	100,00%	Tetap

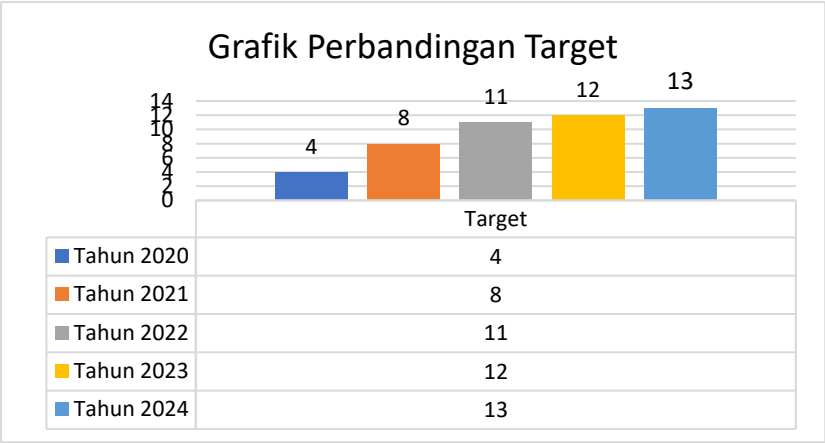

Gambar III. 12 Perbandingan Target Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020

Gambar III. 13 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020

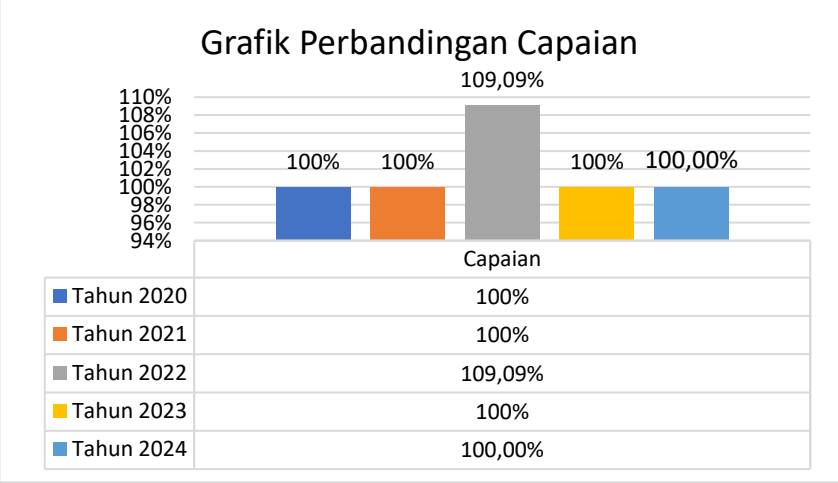

Gambar III. 14 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020

Capaian Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda pada tahun 2024 merupakan komitmen terhadap Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda yang sesuai

dengan kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Sehingga realisasi Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda tahun 2024 adalah 13 atau capaian kinerjanya tetap sebesar 100%. Sehingga realisasi Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda tahun 2023 adalah 12 atau capaian kinerjanya turun sebesar 100% dari capaian pada tahun 2022, dan capaian tetap dibanding dengan capaian pada tahun 2021 dan 2020 yaitu sebesar 100%.

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 Pada Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020 – 2024

Realisasi Kinerja Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda tahun 2024 sebesar 13 lokasi jika dibandingkan dengan target dalam Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2024 sebesar 25 lokasi maka capaian kinerja mencapai 52%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.15**.

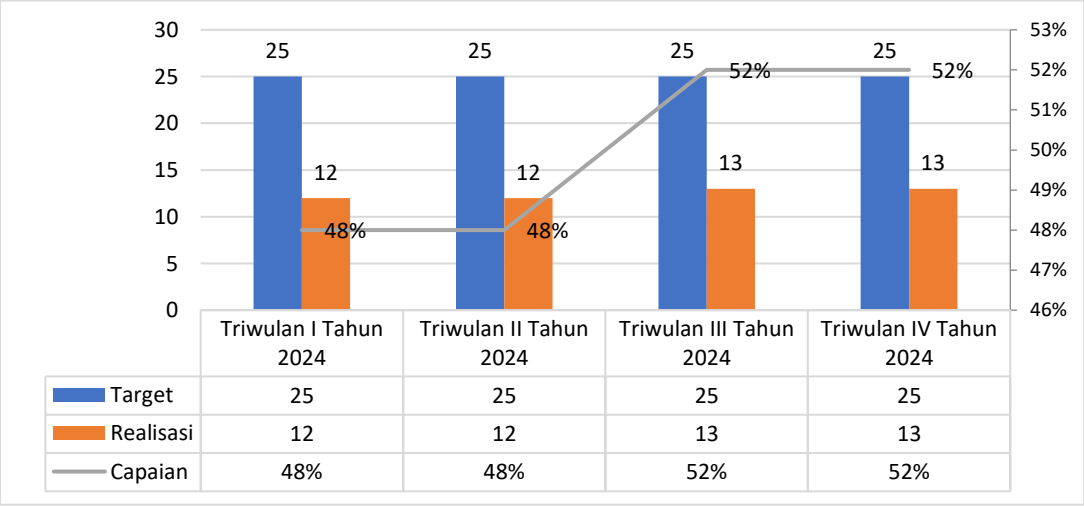

Gambar III.15 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020 - 2024 (IKK 3 Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda tahun 2024)

a.7. Benchmark Nasional

Benchmark nasional untuk Persentase Penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda menggunakan data dari BPTJ pada tahun 2024. Di BPTJ, penyediaan halte untuk melayani operasional angkutan perkotaan Bis Kita Trans Pakuan. Sama seperti Halte di wilayah KSPN yang disediakan untuk melayani angkutan umum yang ada disekitar wilayah tersebut. Terdapat 67 fasilitas pendukung dan integrasi moda berupa halte permanen, portable dan bus stop yang berlokasi di wilayah operasional Trans Pakuan. Sebagai perbandingan, jumlah halte di wilayah KSPN yang telah disediakan di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berjumlah 24 yang tersebar di 2 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa jumlah penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda yang disediakan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan tidak lebih banyak dari BPTJ, namun hal ini tidak dapat menjadi penilaian yang mutlak terhadap capaian kinerja organisasi dikarenakan lokus pada penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda dari Direktorat Prasarana Transportasi Jalan berada di wilayah KSPN sedangkan BPTJ berada di wilayah perkotaan dimana kedua lokasi tersebut memiliki karakteristik layanan angkutan dan pergerakan orang yang berbeda.

2. IKK 7.1.3.B Persentase Ketersediaan Dokumen Penyiapan KPBU Oleh Simpul KPBU

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada IKK Persentase Ketersediaan Dokumen Penyiapan KPBU Oleh Simpul KPBU, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 13 Capaian Persentase Ketersediaan Dokumen Penyiapan KPBU oleh Simpul KPBU

SK 7	**Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi jalan**			
IKK 7.1.3.B	**Persentase Ketersediaan Dokumen Penyiapan KPBU Oleh Simpul KPBU**			**Satuan: %**
Target/Realisasi/Capaian	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**
Target	60%	60%	60%	60%
Realisasi	0%	0%	0%	0%
Capaian	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Persentase Ketersediaan Dokumen Penyiapan KPBU oleh Simpul KPBU merupakan perbandingan antara realisasi jumlah dokumen penyiapan KPBU dengan target dokumen penyiapan KPBU dalam satuan persen (%). Adapun formula perhitungannya sebagai berikut:

P*ersentase Ketersediaan Dokumen Penyiapan KPBU oleh Simpul KPBU = Realisasi Jumlah dokumen penyiapan KPBU / Target Jumlah dokumen penyiapan KPBU*

Dokumen penyiapan KPBU dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024

Realisasi kinerja Persentase Ketersediaan Dokumen Penyiapan KPBU oleh Simpul KPBU sebesar 0% jika dibandingkan dengan target Revisi II PK Tahun 2025 sebesar 60% maka capaian kinerja mencapai 0%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.5**. Grafik Capaian IKK 7.1.3.B Persentase Ketersediaan Dokumen Penyiapan KPBU oleh Simpul KPBU.

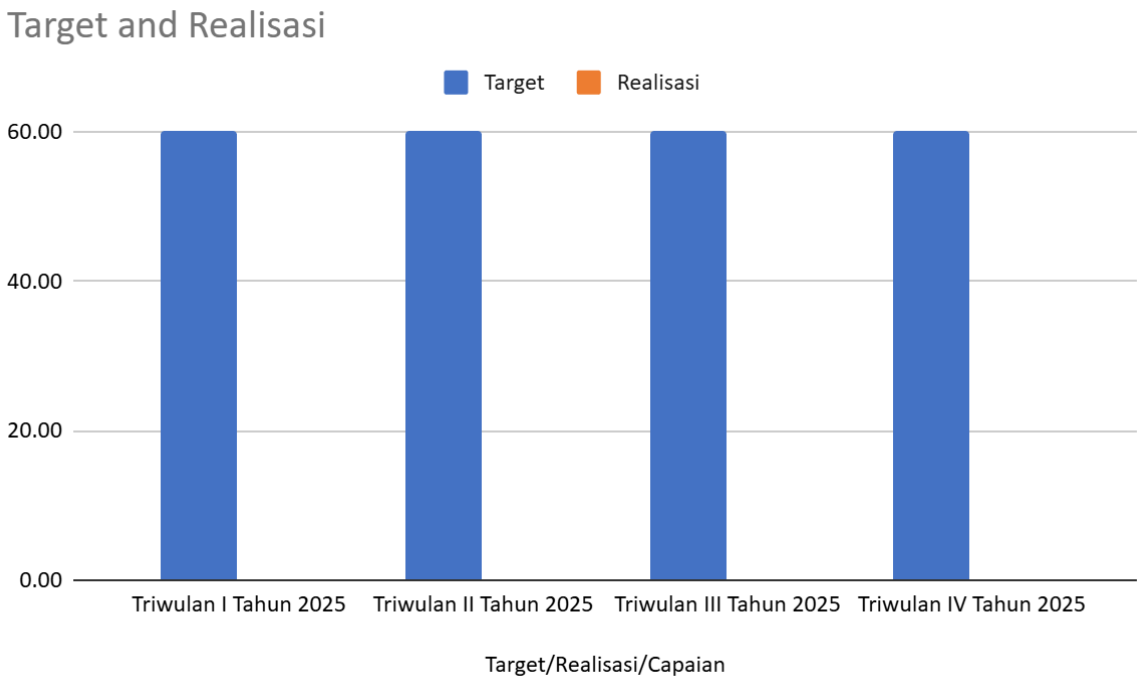

Gambar III. 16 Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 7.1.3.B Persentase ketersediaan dokumen penyiapan KPBU oleh simpul KPBU)

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- **Narasi Dasar Hukum**

  Persentase Ketersediaan Dokumen Penyiapan KPBU oleh Simpul KPBU disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Adapun muatan dalam dokumen penyiapan KPBU yaitu:

  1. kajian strategis
  2. kajian ekonomi
  3. kajian komersial
  4. kajian finansisl
  5. kajian manajemen

- **Narasi Kronologi Target**

  Pada triwulan pertama, terdapat perubahan pada target indikator kinerja kegiatan Persentase Ketersediaan Dokumen Penyiapan KPBU oleh Simpul KPBU, yang awalnya ditetapkan berdasarkan proyeksi awal dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) sementara. Perubahan ini terjadi karena dokumen Renstra masih dalam tahap penyusunan, sehingga penyesuaian dilakukan untuk memastikan target yang lebih realistis dan sesuai dengan perkembangan terkini.

  Target indikator kinerja kegiatan Persentase Ketersediaan Dokumen Penyiapan KPBU oleh Simpul KPBU ditetapkan dengan target yang tinggi, namun setelah mempertimbangkan kapasitas anggaran, infrastruktur yang tersedia, dan kebijakan baru yang sedang disusun, target tersebut disesuaikan agar lebih dapat dicapai dalam jangka waktu yang ditentukan.

Dengan perubahan tersebut, diharapkan indikator kinerja ini dapat lebih mencerminkan kondisi aktual dan lebih realistis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pada triwulan ketiga, diharapkan terdapat realisasi pelaksanaan jika dibandingkan dengan triwulan kedua. Namun demikian dengan kondisi efisiensi anggaran, saat ini indikator kinerja sulit untuk mencapai realisasi sesuai dengan target.

- **Narasi Faktor Keberhasilan**

Dari beberapa faktor kendala, unit penyelenggara layanan telah melakukan langkah – langkah yang menjadi faktor keberhasilan sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas terkait muatan dalam dokumen penyiapan KPBU agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Melakukan koordinasi dengan simpul KPBU terkait dokumen pendukung penyiapan KPBU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Meningkatkan kualitas SDM melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis ataupun *Training*.

- **Narasi Faktor Kegagalan**

Dalam mencapai indikator kinerja kegiatan Persentase Ketersediaan Dokumen Penyiapan KPBU oleh Simpul KPBU masih di temukan banyak permasalahan, yang selama Tahun 2025 masih belum sepenuhnya teratasi, adapun permasalahan yang banyak ditemukan sebagai berikut:

a. Masih terkendala efisiensi pelaksanaan anggaran sehingga dokumen penyiapan KPBU belum dapat terealisasi sesuai dengan target yang diharapkan;
b. Terdapat muatan dalam dokumen penyiapan KPBU belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. Masih terdapat kekurangan SDM yang mumpuni dalam penyusunan dokumen penyiapan KPBU.

- **Narasi Realisasi Kinerja**

Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan realisasi pada tahun 2025 sebagai berikut :

Persentase Ketersediaan Dokumen Penyiapan KPBU oleh Simpul KPBU = Realisasi Jumlah dokumen penyiapan KPBU / Target Jumlah dokumen penyiapan KPBU

Realisasi Jumlah dokumen penyiapan KPBU = 0 dokumen, Target Jumlah dokumen penyiapan KPBU = 2 dokumen

Jumlah dokumen penyiapan KPBU = 0/2 x 100% = 0%

- **Narasi Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Ketersediaan Dokumen Penyiapan KPBU oleh Simpul KPBU Triwulan III Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\%\ Capaian = \frac{0}{2}\ x\ 100\% = 0\%$$

- **Narasi Realisasi Anggaran**

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025 untuk mendukung capaian indikator kinerja kegiatan Jumlah dokumen penyiapan KPBU diterima oleh simpul KPBU / Jumlah dokumen penyiapan KPBU Tahun 2025 adalah melalui:

Tabel II 12 Realisasi Anggaran indikator kinerja kegiatan Jumlah dokumen penyiapan KPBU diterima oleh simpul KPBU / Jumlah dokumen penyiapan KPBU

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW II	PAGU TW III	PAGU TW IV	REALISASI TW IV	
					KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
GA Program Infrastruktur Konektivitas						
SK 7. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan						
IKK 7.1.3.B Persentase ketersediaan dokumen penyiapan KPBU oleh simpul KPBU Kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan ini yaitu: 1. Dukungan dalam Tahap Perencanaan, Penyiapan dan Transaksi Kegiatan KPBU Prasarana Transportasi Jalan; 2. Monitoring Pendampingan Dukungan Kerjasama Pemerintah dengan Swasta; 3. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU Pengembangan Terminal Tipe A di Jawa Timur (Purabaya) (Prioritas Nasional); 4. Pendampingan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha atau KPBU Pengembangan Terminal Tipe A di Lampung (Betan Subing) (Prioritas Nasional);	Rp6.540.000.000	Rp6.080.000.000	Rp5.654.750.000		Rp140.372.904	2,48%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan koordinasi secara intensif dan berkala dengan Kementerian PPN/Bappenas terkait muatan dalam penyusunan dokumen penyiapan KPBU;
2. Melakukan koordinasi dengan Setditjen Perhubungan Darat maupun stakeholders lainnya terkait dengan relaksasi maupun realokasi anggaran sehingga indikator kinerja dapat tercapai;
3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara rutin terkait pelaksanaan kegiatan, kendala dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang;

4. Melakukan bimbingan teknis ataupun training bagi SDM yang berkompeten.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020

Realisasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A tahun 2024 sebesar 96,34 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Revisi II Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024 sebesar 96,34 maka capaian kinerja mencapai 100,00%. Realisasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A tahun 2023 sebesar 94,61 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 dalam Revisi II Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023 sebesar 81,00 maka capaian kinerja mencapai 116,80% sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2022 realisasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A sebesar 93,43 dengan target 80,50 maka capaian kinerja mencapai 116,06%. Pada tahun 2021 realisasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A sebesar 86,51 dengan target 80,00 maka capaian kinerja mencapai 108,14%. Pada tahun 2020 realisasi kinerja sebesar 79,50 dengan target 79,50 maka capaian kinerja mencapai 100%. Sehingga realisasi kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,18 dari tahun 2022 dan mengalami kenaikan sebesar 8,1 dari tahun 2021, serta sebesar 15,11 dari tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini:

Tabel III. 16 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020

SK.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat						
No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik/Turun
1	2020	IKK 1	79,50	79,50	100,00%	Naik
2	2021	IKK 1	80,00	86,51	108,14%	Naik
3	2022	IKK 1	80,50	93,43	116,06%	Naik
4	2023	IKK 1	81,00	94,61	116,80%	Naik
5	2024	IKK 1	96,34	96,34	100,00	Tetap

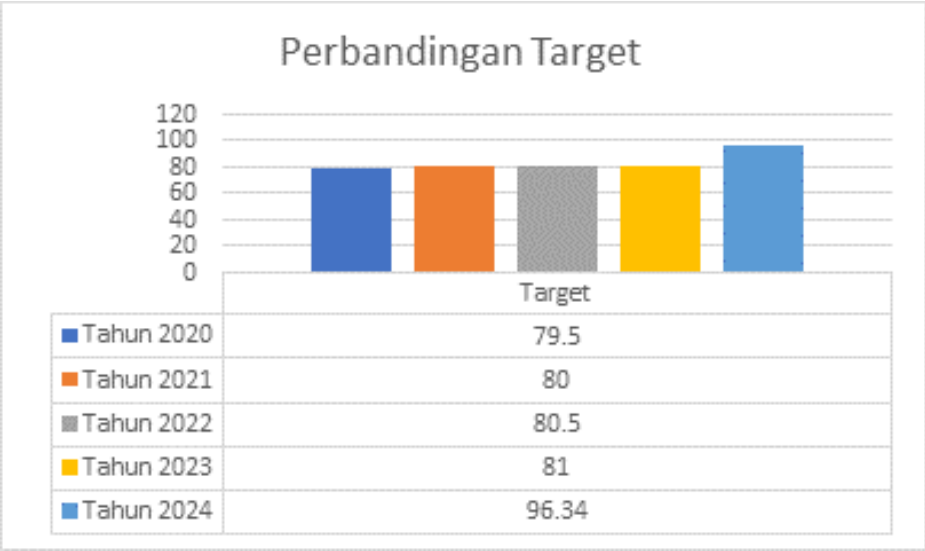

Gambar III.17 Perbandingan Target Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, 2022, 2021, dan 2020

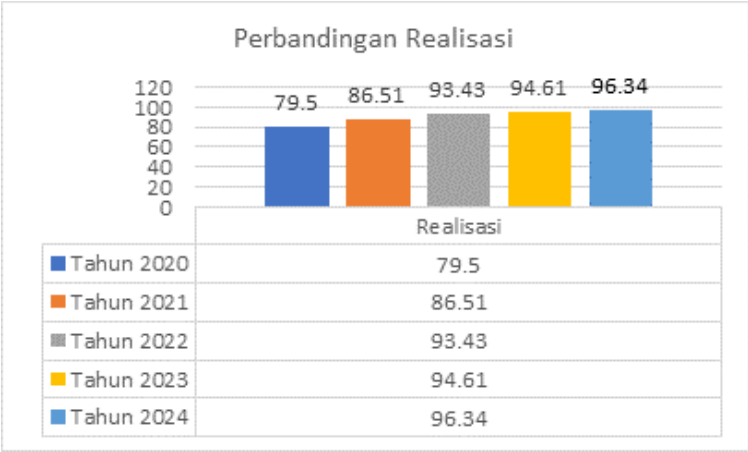

Gambar III. 18 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2023, 2022, 2021, dan 2020

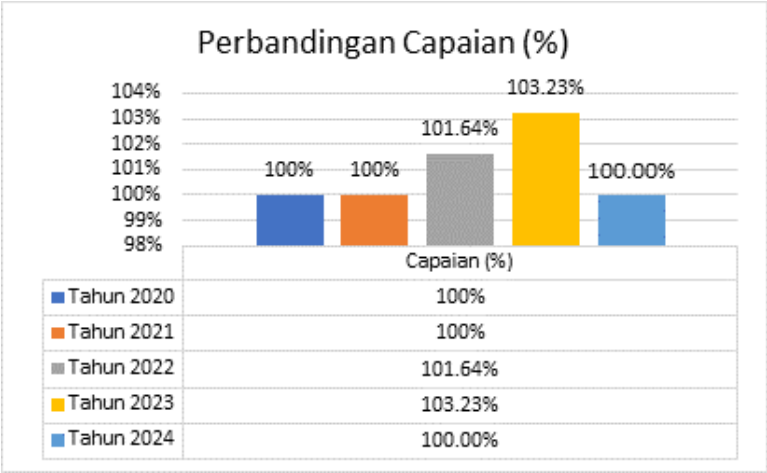

Gambar III. 19 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2023, 2022, 2021, dan 2020

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A tahun 2024 merupakan komitmen terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A. Sehingga realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A tahun 2024 adalah 96,34 atau capaian kinerjanya tetap sebesar 100,00%. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A tahun 2023 adalah 94,61 atau capaian kinerjanya naik sebesar 116,80%, dibanding dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 116,06%, tahun 2021 sebesar 108,14% dan 2020 yaitu sebesar 100%.

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 Pada Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020 – 2024

Realisasi Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A tahun 2024 sebesar 96,34 jika dibandingkan dengan target dalam Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2024 sebesar 81,5 maka capaian kinerja mencapai 118,21%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.7**.

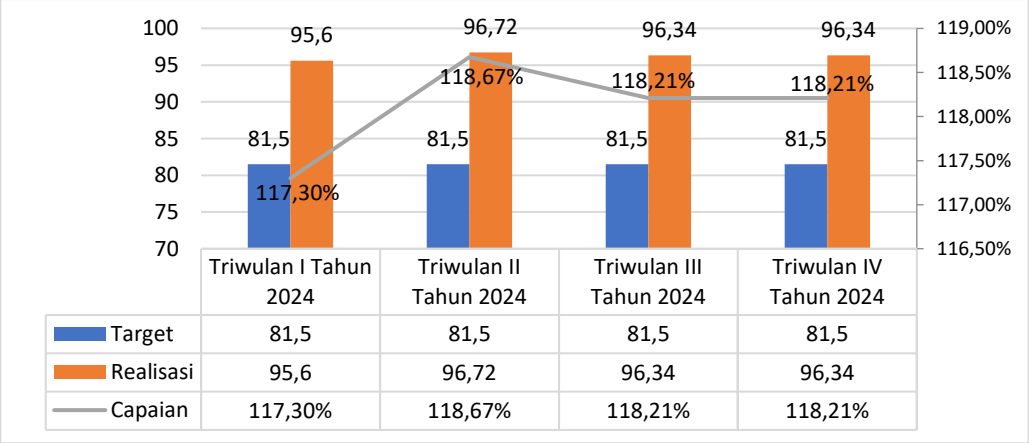

Gambar III.20 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020 - 2024 (IKK 1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A tahun 2024)

a.7. Benchmark Internasional

Benchmark Internasional untuk Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A menggunakan data dari negara Inggris (England). Berdasarkan hasil survey kepuasan pengguna bus tahun 2024 yang dipublikasikan oleh *Transport Focus* dengan judul *Your Bus Journey* pada tanggal 25 Maret 2025 dimana suvey dilakukan terhadap 48.000 perjalanan, secara keseluruhan tingkat kepuasan pengguna bus di Inggris mencapai 83%, naik dibanding tahun 2023 yaitu 80%. Salah satu aspek penilaian yaitu kepuasan terhadap halte atau terminal mencapai tingkat kepuasan 79%, naik dibanding tahun 2023 sebesar 76%. Meskipun tingkat kepuasan tidak setinggi nilai IKM Terminal Tipe A yang dikelola Ditjen Hubdat, terdapat beberapa catatan yang cukup relevan dengan kondisi di Indonesia saat ini, misalnya pemerataan kondisi fasilitas halte dan terminal yang belum merata dimana pada daerah-daerah *rural* (pedesaan) kepuasan terhadap kondisi prasarana masih lebih rendah dibanding di daerah perkotaan.

Sedangkan untuk level nasional dapat dibandingkan dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di empat lokasi Terminal Tipe A yang dikelola oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dimana pada tahun 2024 nilai IKM untuk keempat terminal tersebut mencapai 93,978%. Dari sisi skor SKM, rata-rata skor IKM untuk terminal-terminal yang dikelola oleh Ditjen Hubdat lebih baik yaitu diangka 96,34% pada triwulan IV 2024, metode survey IKM yang digunakan pun sama yaitu menggunakan aplikasi 3AS *Case Survey Management System* sehingga cukup *apple to apple* jika dibandingkan.

3. **IKK 7.1.3.C Persentase Tindak Lanjut Kerjasama Pengusahaan Prasarana LLAJ Sesuai Pedoman**

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 7: Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi Jalan, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada IKK Persentase Tindak Lanjut Kerjasama Pengusahaan Prasarana LLAJ Sesuai Pedoman, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 17 Capaian Persentase Tindak Lanjut Kerjasama Pengusahaan Prasarana LLAJ Sesuai Pedoman

SK 7	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi jalan			
IKK 7.1.3.C	Persentase Tindak Lanjut Kerjasama Pengusahaan Prasarana LLAJ Sesuai Pedoman			Satuan: %
Target/Realisasi/Capaian	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**
Target	60	60	60	21
Realisasi	35	35	35	21
Capaian	58,33%	58,33%	58,33%	100%

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Persentase Tindak Lanjut Kerjasama Pengusahaan Prasarana LLAJ Sesuai Pedoman merupakan perbandingan antara immediate outcome dan output kegiatan kerjasama kepengusahaan prasarana LLAJ dalam satuan persen (%). Adapun formula perhitungannya sebagai berikut :

Persentase Tindak Lanjut Kerjasama Pengusahaan Prasarana LLAJ Sesuai Pedoman = Realisasi Tindak Lanjut Kerjasama Pengusahaan Prasarana LLAJ Sesuai Pedoman / Target Tindak Lanjut Kerjasama Pengusahaan Prasarana LLAJ Sesuai Pedoman x 100%

Persentase Tindak Lanjut Kerjasama Pengusahaan Prasarana LLAJ Sesuai Pedoman dilakukan berdasarkan realisasi pelaksanaan tindak lanjut kerjasama pengusahaan prasarana LLAJ per satuan waktu (tahun) sesuai dengan perjanjian kerjasama yang ada di tiap-tiap satuan pelayanan terminal tipe a di Indonesia.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025

Persentase Tindak Lanjut Kerjasama Pengusahaan Prasarana LLAJ Sesuai Pedoman sebesar 21 jika dibandingkan dengan target revisi I PK Tahun 2025 sebesar 60 maka capaian kinerja mencapai 35%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.5**. Grafik Capaian IKK 2 Persentase Tindak Lanjut Kerjasama Pengusahaan Prasarana LLAJ Sesuai Pedoman.

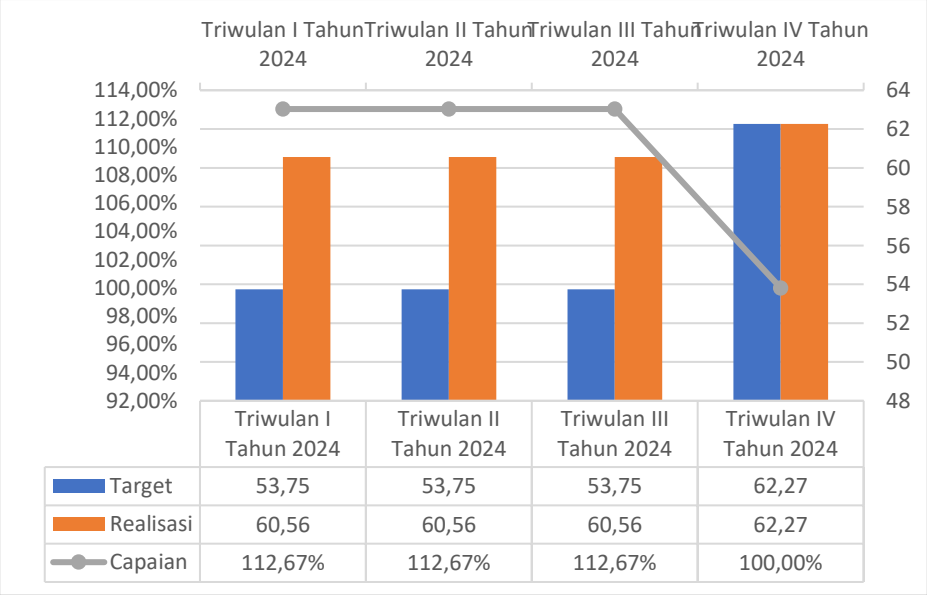

	Triwulan I Tahun 2024	Triwulan II Tahun 2024	Triwulan III Tahun 2024	Triwulan IV Tahun 2024
Target	53,75	53,75	53,75	62,27
Realisasi	60,56	60,56	60,56	62,27
Capaian	112,67%	112,67%	112,67%	100,00%

Gambar III. 21 Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- **Narasi Dasar Hukum**

  Persentase Tindak Lanjut Kerjasama Pengusahaan Prasarana LLAJ Sesuai Pedoman disusun realisasi tindak lanjut kerjasama pengusahaan prasarana llaj dibandingkan dengan target tindak lanjut kerjasama pengusahaan prasarana llaj. Indikator ini berhasil apabila realisasi sesuai dengan target, dimana target dilaksanakan berdasarkan persetujuan dan keputusan pelaksanaan pemanfaatan pengusahaan prasarana LLAJ yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Adapun beberapa substansi yang tertuang dalam persetujuan dan pelaksanaan pemanfaatan antara lain:

  1. Dasar Hukum
  2. Maksud dan Tujuan
  3. Ruang Lingkup
  4. Objek BMN
  5. Nilai Pemanfaatan BMN
  6. Tata Cara Pembayaran
  7. Jangka Waktu Perjanjian
  8. Hak dan Kewajiban
  9. Larangan Pengalihan
  10. Berakhirnya Perjanjian
  11. Keadaan Kahar (Force Majeure)
  12. Penyelesaian Perselisihan
  13. Bea Materai, Pajak-Pajak Dan Biaya Lain-Lain
  14. Kerahasiaan
  15. Korespondensi
  16. Ketentuan Lainnya
  17. Addendum

- **Narasi Kronologi Target**

Pada triwulan pertama, terdapat perubahan pada target indikator kinerja kegiatan Persentase Tindak Lanjut Kerjasama Pengusahaan Prasarana LLAJ Sesuai Pedoman, yang awalnya ditetapkan berdasarkan proyeksi awal dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) sementara. Perubahan ini terjadi karena dokumen Renstra masih dalam tahap penyusunan, sehingga penyesuaian dilakukan untuk memastikan target yang lebih realistis dan sesuai dengan perkembangan terkini.

Awalnya, target indikator kinerja kegiatan Persentase Tindak Lanjut Kerjasama Pengusahaan Prasarana LLAJ Sesuai Pedoman ditetapkan dengan target yang tinggi, namun setelah mempertimbangkan kapasitas anggaran, infrastruktur yang tersedia, dan kebijakan baru yang sedang disusun, target tersebut disesuaikan agar lebih dapat dicapai dalam jangka waktu yang ditentukan. Dengan perubahan tersebut, diharapkan indikator kinerja ini dapat lebih mencerminkan kondisi aktual dan lebih realistis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pada triwulan kedua, terdapat realisasi indikator kinerja kegiatan sehingga lebih realistis dan diharapkan dapat tercapai sesuai target yang ditentukan.

- **Narasi Faktor Keberhasilan**

  Dari beberapa faktor kendala, unit penyelenggara layanan telah melakukan langkah – langkah yang menjadi faktor keberhasilan sebagai berikut:

  1. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Balai Pengelola Transportasi Darat maupun Satuan Pelayanan untuk realisasi pelaksanaan kinerja kegiatan;
  2. Melakukan peningkatan kualitas SDM melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis ataupun Training;
  3. Melakukan sosialisasi dengan pelaku usaha, baik badan usaha, BUMN/D, koperasi, perorangan untuk meningkatkan tingkat keberhasilan indikator kinerja kegiatan;
  4. Melakukan koordinasi dengan stakeholders terkait di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk sosialisasi dan stimulasi kegiatan untuk meningkatkan tingkat keberhasilan indikator kinerja kegiatan.

- **Narasi Faktor Kegagalan**

  Dalam mencapai indikator kinerja kegiatan Persentase Tindak Lanjut Kerjasama Pengusahaan Prasarana LLAJ Sesuai Pedoman masih ditemukan banyak permasalahan, yang selama Tahun 2025 masih belum sepenuhnya teratasi, adapun permasalahan yang banyak ditemukan sebagai berikut:

  1. Masih terdapat beberapa BPTD maupun Satuan Pelayanan yang belum menginventarisasi tindak lanjut kerjasama pengusahaan prasarana LLAJ;
  2. masih terdapat kekurangan SDM yang mumpuni dalam pelaksanaan kerjasama pengusahaan prasarana LLAJ;
  3. Masih kurangnya sosialisasi terhadap pelaku usaha untuk meningkatkan tingkat keberhasilan indikator kinerja kegiatan;
  4. masih kurangnya koordinasi dengan stakeholders terkait untuk meningkatkan tingkat keberhasilan indikator kinerja kegiatan.

- **Narasi Realisasi Kinerja**

  Berdasarkan hasil perhitungan didapatkan realisasi tahun 2025 sebagai berikut :

  Persentase Tindak Lanjut Kerjasama Pengusahaan Prasarana LLAJ Sesuai Pedoman = Realisasi Tindak Lanjut Kerjasama Pengusahaan Prasarana LLAJ Sesuai Pedoman / Target Tindak Lanjut Kerjasama Pengusahaan Prasarana LLAJ Sesuai Pedoman

Realisasi Tindak Lanjut Kerjasama Pengusahaan Prasarana LLAJ Sesuai Pedoman = 21 dokumen, Target Tindak Lanjut Kerjasama Pengusahaan Prasarana LLAJ Sesuai Pedoman = 60 dokumen
Realisasi Tindak Lanjut Kerjasama Pengusahaan Prasarana LLAJ Sesuai Pedoman = 21/60 x 100% = 35%

- **Narasi Capaian Kinerja**

  Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Tindak Lanjut Kerjasama Pengusahaan Prasarana LLAJ Sesuai Pedoman pada Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\%Capaian = \frac{35}{60}\ x\ 100\% = 58{,}33\%$$

- **Realisasi Anggaran**

  Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025 untuk mendukung capaian indikator kinerja kegiatan Persentase Tindak Lanjut Kerjasama Pengusahaan Prasarana LLAJ Sesuai Pedoman Tahun 2025 adalah melalui:

Tabel III. 20 Realisasi Anggaran

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW IV	REALISASI TW I		REALISASI TW II		REALISASI TW III		REALISASI TW IV	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
GA Program Infrastruktur Konektivitas										
SK 7. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi jalan										
IKK 7.1.3.C Persentase tindak lanjut kerjasama pengusahaan prasarana LLAJ sesuai pedoman Kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan ini yaitu: 1. Monitoring dan Identifikasi Potensi Prasarana LLAJ yang akan dikerjasamakan; 2. Monitoring Evaluasi Pelaksanaan Pemanfaatan	Rp38.860.346.000	Rp37.564.004.000	Rp2. 129.113.367	5,48%	Rp7.200.749.197	18,83 %	Rp19.451.944.300	50.96%	Rp34.071.795.689	90,70%

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW IV	REALISASI TW I		REALISASI TW II		REALISASI TW III		REALISASI TW IV	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
GA Program Infrastruktur Konektivitas										
SK 7. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik sektor transportasi jalan										
Kerjasama Prasarana LLAJ; 3. Bimbingan Teknis Bidang Kepengusahaan; 4.Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Jaringan dan Kepengusahaan										

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan koordinasi secara intensif dengan Balai Pengelola Transportasi Darat maupun Satuan Pelayanan untuk realisasi pelaksanaan kinerja kegiatan;
2. Melakukan peningkatan kualitas SDM melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis ataupun Training;
3. Melakukan sosialisasi dengan pelaku usaha, baik badan usaha, BUMN/D, koperasi, perorangan untuk meningkatkan tingkat keberhasilan indikator kinerja kegiatan;
4. Melakukan koordinasi dengan stakeholders terkait di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk sosialisasi dan stimulasi kegiatan untuk meningkatkan tingkat keberhasilan indikator kinerja kegiatan.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020

Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A tahun 2024 sebesar 62,27% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Revisi II Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024 sebesar 62,27% maka capaian kinerja mencapai 100,00%. Realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A tahun 2023 sebesar 60,56% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 dalam Revisi II Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023 sebesar 53,7% maka capaian kinerja mencapai 112,77% sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2022 realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A tahun 2022 sebesar 59,02% dengan target 53,65% maka capaian kinerja mencapai 110,01%. Pada tahun 2021 realisasi kinerja sebesar 58,49% dengan target 53,60% maka capaian kinerja mencapai 109,12%. Pada tahun 2020 realisasi kinerja sebesar 53,57% dengan target 53,57% maka capaian kinerja mencapai 100%. Sehingga realisasi kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A tahun 2023 lebih besar dari tahun 2022 dan mengalami kenaikan sebesar 6,99% dari tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini:

Tabel III. 21 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020

SK.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat						
No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik/Turun
1	2020	IKK 2	53,57	53,57	100,00%	Naik
2	2021	IKK 2	53,60	58,49	109,12%	Naik
3	2022	IKK 2	53,65	59,02	110,01%	Naik
4	2023	IKK 2	53,7	60,56	112,77%	Naik
5	2024	IKK 2	62,27	62,27	100,00%	Tetap

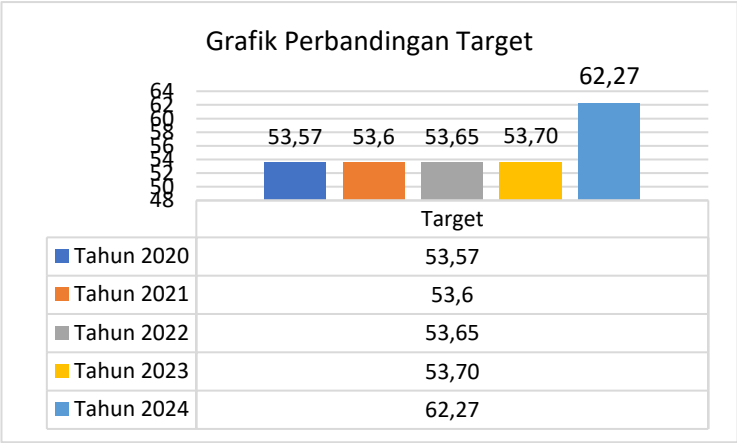

Gambar III.22 Perbandingan Target Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021, 2020

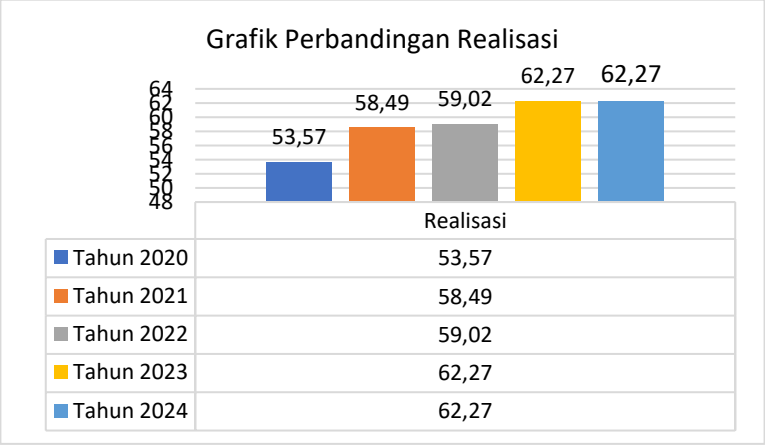

Gambar III.23 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021, 2020

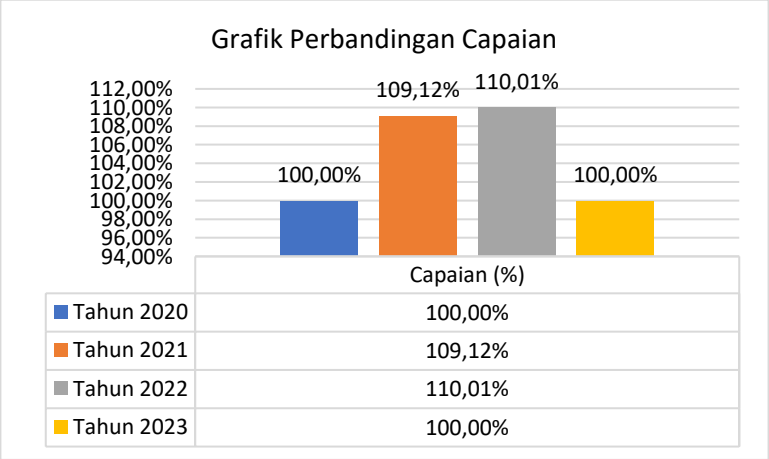

Gambar III.24 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021, 2020

Capaian Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A tahun 2024 merupakan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Penumpang Tipe A tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Sehingga realisasi Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A tahun

2024 adalah 62,27% atau capaian kinerjanya tetap sebesar 100,00%. Realisasi Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A tahun 2023 adalah 60,56% atau capaian kinerjanya naik sebesar 112,77% dibanding dengan Tahun 2022 sebesar 110,01%, capaian pada tahun 2021 sebesar 109,12% dan 2020 yaitu sebesar 100%.

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020 – 2024

Realisasi Kinerja Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A tahun 2024 sebesar 62,27 jika dibandingkan dengan target dalam Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2024 sebesar 53,7 maka capaian kinerja mencapai 116%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.25**.

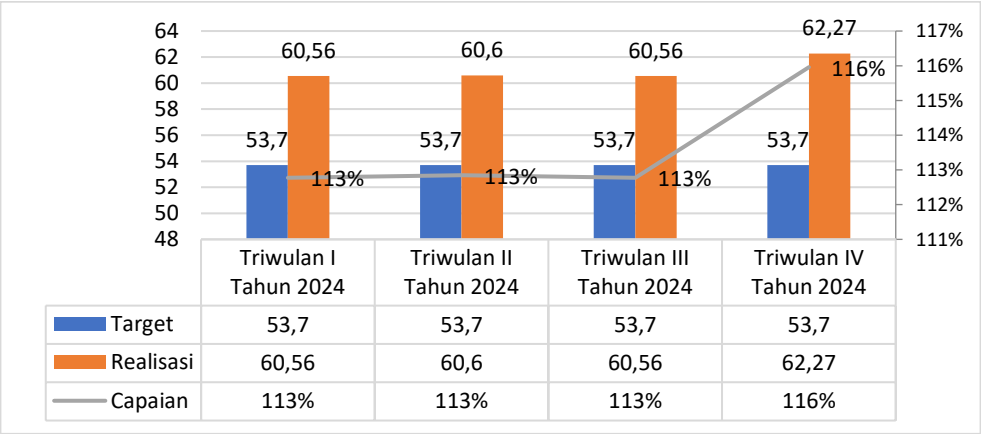

Gambar III.25 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020 - 2024 (IKK 2 Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A tahun 2024)

a.7. Benchmark Nasional

Benchmark untuk Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A menggunakan data dari Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Berdasarkan data yang diperoleh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPTJ Tahun 2024, persentase pemenuhan SPM Terminal Tipe A mencapai 78% dari target 83% sehingga capaian kinerja mencapai 93,98%. Sebagai perbandingan, Presentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 2024 mencapai 62,27%, sesuai dengan target yang ditetapkan (capaian 100%). Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa dari sisi pemenuhan SPM, terminal-terminal yang dikelola oleh BPTJ skornya lebih baik, namun perlu dilakukan perbandingan lebih mendalam dari sisi metode penilaian dikarenakan pada LKIP DPTJ Tahun 2024 tidak dijelaskan secara detail terkait kriteria dan cara perhitungan skor pemenuhan SPM tersebut.

III.2.2.3 SK 9 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang

1. **IKK 9.4.3.A Terlaksananya Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di Fasilitas Penimbangan Sesuai SPM**

   Pencapaian Sasaran Kegiatan 9 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu: IKK 9.4.3.A. Terlaksananya Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di Fasilitas Penimbangan Sesuai SPM.

Tabel III. 22 Sasaran Kegiatan 7 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	Q1	Q2	Q3	Q4
SK 9 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang							
IKK 9.4.3.A	Terlaksananya Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di Fasilitas Penimbangan Sesuai SPM	%	60				
		Target		60	60	60	1,12
		Realisasi		0	0	0	1,12
		Capaian		0,00%	0,00%	0,00%	100%
IKK 9.4.3.B	Rasio beroperasinya fasilitas penimbangan untuk mendukung keselamatan	Rasio	0,636				
		Target		0,636	0,636	0,636	0,636
		Realisasi		0,636	0,636	0,636	0,636
		Capaian		0	100	100	100

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Pencapaian Sasaran Kegiatan 9 diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu: IKK 9.4.3.A. Terlaksananya Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di Fasilitas Penimbangan Sesuai SPM.

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada IKK Terlaksananya Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di Fasilitas Penimbangan Sesuai SPM, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 23 Capaian Terlaksananya Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di Fasilitas Penimbangan Sesuai SPM

SK 9	**Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang**			
IKK 9.4.3.A	Terlaksananya Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di Fasilitas Penimbangan Sesuai SPM			Satuan: %
Target/Realisasi/Capaian	Q1	Q2	Q3	Q4
Target	60%	60%	60%	1,12
Realisasi	0%	0%	0%	1,12
Capaian	0,00%	0,00%	0,00%	100%

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Terlaksananya Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di Fasilitas Penimbangan Sesuai SPM merupakan perbandingan antara kapasitas Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di Fasilitas

Penimbangan Sesuai SPM dibagi dengan kapasitas Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di Fasilitas Penimbangan dalam satuan persen (%).

Adapun formula perhitungannya sebagai berikut:
Terlaksananya Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di Fasilitas Penimbangan Sesuai SPM = Kapasitas pengawasan kendaraan angkutan barang di fasilitas penimbangan sesuai SPM / Kapasitas pengawasan kendaraan angkutan barang di fasilitas penimbangan

Untuk memberikan acuan dan pedoman dalam penilaian kinerja dan pengawasan pelayanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor guna mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan terukur, kriteria Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di Fasilitas Penimbangan Sesuai SPM meliputi aspek:

a. Kepastian hukum terhadap penindakan pelanggaran;
b. Alat penimbangan kendaraan bermotor bertanda tera sah yang berlaku;
c. Standar dan spesifikasi Alat Penimbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Ketersediaan fasilitas keselamatan, keamanan dan kenyamanan bagi pengemudi;
e. Ketersediaan fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja;
f. Ketepatan waktu pelayanan;
g. Kesesuaian hasil penimbangan terhadap berat kendaraan;
h. Prosedur pelayanan yang mudah dan sederhana; dan
i. Sarana pengaduan masyarakat.

Berdasarkan hasil penilaian SPM, hasil penilaian diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Kategori Memenuhi, dengan hasil penilaian ≥ 90 dan Tera alat penimbangan masih dalam masa berlaku;
b. Kategori Cukup Memenuhi, dengan hasil penilaian antara 80 – 90 dan Tera alat penimbangan masih dalam masa berlaku;
c. Kategori Kurang Memenuhi, dengan hasil penilaian antara 60 – 80 dan Tera alat penimbangan masih dalam masa berlaku;
d. Kategori Tidak Memenuhi, dengan hasil penilaian ≤ 60 dan Tera alat penimbangan masih dalam masa berlaku; dan
e. Kategori Sangat Tidak Memenuhi, dengan kondisi belum dilakukan Tera alat penimbangan atau Tera tidak dalam masa berlaku.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025

Realisasi kinerja Terlaksananya Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di Fasilitas Penimbangan Sesuai sebesar 1,12% jika dibandingkan dengan target Revisi II PK tahun 2025 sebesar 1,12% maka capaian kinerja mencapai 100,00%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.10**. Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan IKK 9.4.3.A. Terlaksananya Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di Fasilitas Penimbangan Sesuai SPM).

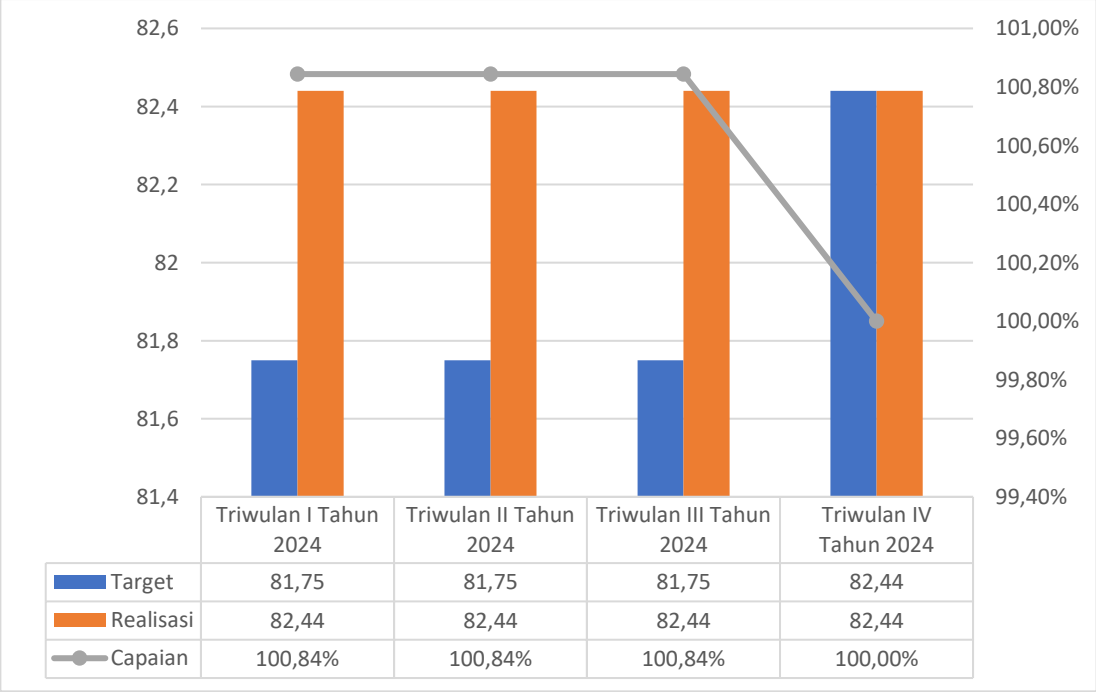

Gambar III. 26 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 9.4.3.A Terlaksananya Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di Fasilitas Penimbangan Sesuai SPM pada Tahun 2025)

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- **Dasar Hukum**

Penyelenggaraan Fasilitas Penimbangan dilaksanakan berdasarkan beberapa acuan peraturan dan keputusan antara lain :

a. PM 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Kendaraan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan;
b. Keputusan Menteri Perhubungan No KP – PHB 144 tahun 2025 tentang Penetapan Pengoperasian Fasilitas Penimbangan di Seluruh Indonesia;
c. Perdirjen Hubdat SK.736/AJ.108/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan;
d. Perdirjen Hubdat No. KP-DRJD 2848 Tahun 2025 tentang Penetapan Tipe Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor;

Pemenuhan Standar pelayanan minimal fasilitas penimbangan sesuai dengan amanat yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan meliputi :

a. kepastian hukum terhadap penindakan pelanggaran;
b. alat penimbangan kendaraan bermotor bertanda tera sah yang berlaku;
c. standar dan spesifikasi Alat Penimbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. ketersediaan fasilitas keselamatan, keamanan dan kenyamanan bagi pengemudi;
e. ketersediaan fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja;
f. ketepatan waktu pelayanan;
g. kesesuaian hasil penimbangan terhadap berat kendaraan;
h. prosedur pelayanan yang mudah dan sederhana; dan
i. sarana pengaduan masyarakat.

Dalam rangka memenuhi amanat Peraturan tersebut untuk memberikan acuan dalam penilaian kinerja dan pengawasan pelayanan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor guna mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan terukur, telah disusun Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: KP-DRJD 4044 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Minimal Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor yang telah terbit pada tangga 27 Agustus 2025.

- **Narasi Kronologi Target**

Pada triwulan pertama, terdapat perubahan pada target indikator kinerja kegiatan Terlaksananya Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di Fasilitas Penimbangan Sesuai SPM, yang awalnya ditetapkan berdasarkan proyeksi awal dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) sementara. Perubahan ini terjadi karena dokumen Renstra masih dalam tahap penyusunan, sehingga penyesuaian dilakukan untuk memastikan target yang lebih realistis dan sesuai dengan perkembangan terkini.

Awalnya, target indikator kinerja kegiatan Terlaksananya Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di Fasilitas Penimbangan Sesuai SPM ditetapkan dengan target yang tinggi, namun setelah mempertimbangkan kapasitas anggaran, infrastruktur yang tersedia, dan kebijakan baru yang sedang disusun, target tersebut disesuaikan agar lebih dapat dicapai dalam jangka waktu yang ditentukan. Dengan perubahan tersebut, diharapkan indikator kinerja ini dapat lebih mencerminkan kondisi aktual dan lebih realistis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

- **Narasi Faktor Keberhasilan**

Faktor keberhasilan dalam mencapai target pada Indikator Kinerja Kegiatan ini meliputi :

1. Telah terbitnya pedoman penilaian pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pengawasan kendaraan angkutan barang sebagai acuan pelaksanaan pengawasan di fasilitas penimbangan;
2. Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan awal kepada petugas UPPKB dalam rangka penerapan pengawasan sesuai SPM;
3. Adanya dukungan anggaran melalui pembukaan blokir anggaran untuk mendukung tahap awal implementasi pengawasan sesuai SPM di UPPKB;
4. Ketersediaan dan pemanfaatan fasilitas penimbangan serta sarana pendukung pengawasan secara bertahap pada UPPKB yang telah beroperasi.

- **Narasi Faktor Kegagalan**

Berikut ini adalah faktor yang menjadi potensi penyebab kegagalan tercapainya IKK Terlaksananya Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di Fasilitas Penimbangan Sesuai SPM:

a. Keterbatasan sumber daya manusia UPPKB, baik dari sisi jumlah maupun kompetensi, yang berpotensi menghambat pemenuhan standar pengawasan sesuai SPM.;
b. Keterbatasan dan keterlambatan dukungan anggaran operasional yang dapat menghambat keberlanjutan implementasi pengawasan sesuai SPM;
c. Ketidaksiapan sarana dan prasarana pendukung pengawasan, termasuk fasilitas penimbangan dan sistem informasi, yang dapat menurunkan efektivitas pelaksanaan pengawasan di fasilitas penimbangan;
d. Belum seragamnya kelengkapan fasilitas utama dan fasilitas penunjang pada masing - masing UPPKB baik secara kuantitas maupun kualitas;

e. Proses tera ulang yang wajib dilakukan terhadap alat penimbangan terkendala keterbatasan koordinasi internal dan kesiapan dokumen administrasi;

- **Narasi Realisasi Kinerja**

Berdasarkan realisasi IKK Terlaksananya Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di Fasilitas Penimbangan Sesuai SPM Tahun 2025, diperoleh realisasi sebesar 1,12 % .

Rumus:

Terlaksananya Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di Fasilitas Penimbangan Sesuai SPMB = (Kapasitas pengawasan kendaraan angkutan barang di fasilitas penimbangan sesuai SPM / Kapasitas pengawasan kendaraan angkutan barang di fasilitas penimbangan) × 100%

Perhitungan:

Terlaksananya Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di Fasilitas Penimbangan Sesuai SPM = (36.500 / 3.248.500) × 100% = 1,12%

Keterangan:

UPPKB yang memenuhi SPM pada tahun 2025 berjumlah 1 dri 89 UPPKB beroperasi, karena belum dilakukan penilaian SPM pada seluruh UPPKB disebabkan keterbatasan anggaran efisiensi, sehingga kapasitas pengawasan kendaraan angkutan barang yang di fasilitas penimbangan ialah 36.500 kendaraan dalam 1 tahun.

- **Narasi Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian IKK Terlaksananya Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di Fasilitas Penimbangan Sesuai SPM terhadap target Revisi II PK Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\%\ Capaian = \frac{1{,}12}{1{,}12} x\ 100\% = 100{,}00\%$$

- **Narasi Realisasi Anggaran**

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025 untuk mendukung capaian indikator kinerja kegiatan Terlaksananya Pengawasan Kendaraan Angkutan Barang di Fasilitas Penimbangan Sesuai SPM adalah

Tabel III. 23 Realisasi Anggaran

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW IV	REALISASI TW I		REALISASI TW II		REALISASI TW III		REALISASI TW IV	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
GA Program Infrastruktur Konektivitas										
SK 9 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang										
IKK 9.4.3.A. Terlaksananya pengawasan kendaraan angkutan barang di fasilitas penimbangan sesuai SPM Kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan ini ' '1. Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor;	Rp507.638.000	Rp594.931.000	Rp 193.505.740	38,12 %	Rp 200.345.740	39,47 %	Rp 254.205.700	42.70 %	Rp594.930.700	100,00%

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW IV	REALISASI TW I		REALISASI TW II		REALISASI TW III		REALISASI TW IV	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
GA Program Infrastruktur Konektivitas										
SK 9 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang										
2. Bimbingan Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 3. Bimbingan Teknis Perawatan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor; 4. Sertifikasi Kompetensi Petugas Penimbangan Kendaraan Bermotor; 5. Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor 6. Monitoring Pelaksanaan Pembanguan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Penimbangan; 7. Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Fasilitas Penimbangan										

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW IV	REALISASI TW I		REALISASI TW II		REALISASI TW III		REALISASI TW IV	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
GA Program Infrastruktur Konektivitas										
SK 9 Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang										
Kendaraan Bermotor; 8. Sosialiasi Aplikasi Pengembangan Jembatan Timbang Online dan SPM UPPKB; 9. Dukungan Pengawasan Bidang Prasarana Transportasi Jalan;										

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

4. Percepatan dalam diseminasi dan sosialisasi pedoman SPM yang saat ini dalam tahap pembahasan dengan Bagian Hukum Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
5. Berkoordinasi dengan Bagian SDM Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terkait pemenuhan jumlah dan kompetensi SDM pada masing - masing UPPKB;
6. Melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian SPM untuk selanjutnya dapat menjadi acuan dalam pengusulan, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas utama dan penunjang yang ada pada masing - masing UPPKB.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020

Realisasi kinerja Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A tahun 2024 sebesar 82,44% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Revisi II Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024 sebesar 82,44% maka capaian kinerja mencapai 100,00%. Pada tahun 2023 realisasi kinerja Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A sebesar 81,75% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 dalam Revisi II Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023 sebesar 78,60% maka capaian kinerja mencapai 104,01% sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2022 realisasi kinerja Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A sebesar 83,41% dengan target 74,15% maka capaian kinerja mencapai 112,49%. Pada tahun 2021 realisasi kinerja Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A sebesar 72,63% dengan target 71,03% maka capaian kinerja mencapai 102,25%. Pada tahun 2020 realisasi kinerja sebesar 70,35 dengan target 70,35 maka capaian kinerja mencapai 100%. Sehingga realisasi kinerja Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 1,71 dari tahun 2022 namun mengalami kenaikan sebesar 9,07 dari tahun 2021 serta mengalami kenaikan 11,35 dari tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini:

Tabel III. 24 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020

SK.2 Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat						
No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik/Turun
1	2020	IKK 3	70,35	70,35	100,00%	Naik
2	2021	IKK 3	71,03	72,63	102,25%	Naik
3	2022	IKK 3	74,15	83,41	112,49%	Naik
4	2023	IKK 3	78,60	81,75	104,01%	Tetap
5	2024	IKK 3	82,44	82,44	100,00	Tetap

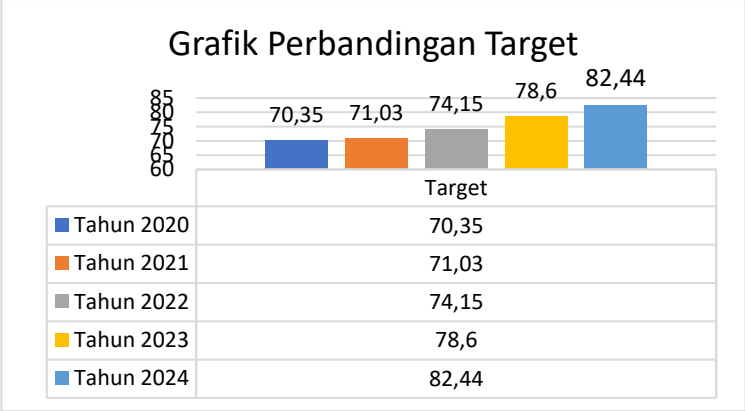

Gambar III. 27 Perbandingan Target Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021, 2020

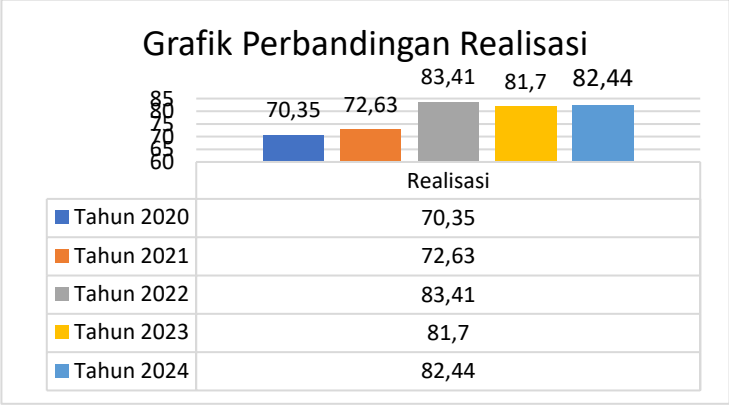

Gambar III. 28 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021, 2020

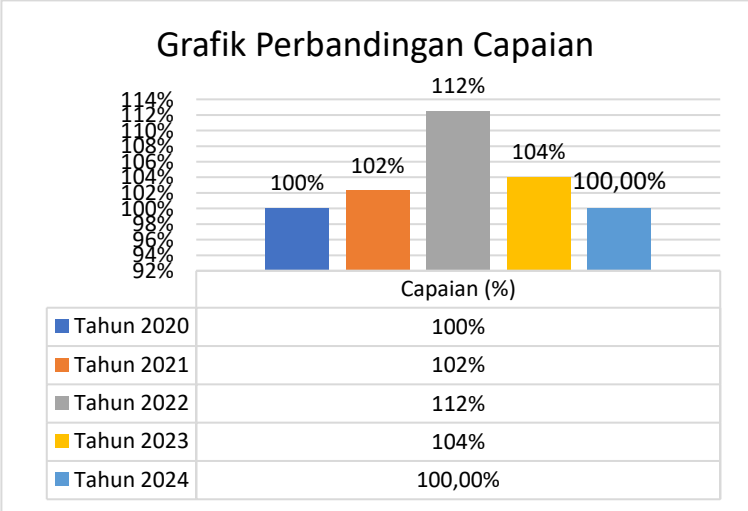

Gambar III. 29 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021, 2020

Capaian Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A pada tahun 2024 merupakan komitmen terhadap Penerapan SMART Terminal Tipe A yang sesuai dengan kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Sehingga realisasi Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A

Tahun 2024 adalah 82,44% atau capaian kinerjanya turun menjadi sebesar 100,00%. Realisasi Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A Tahun 2023 adalah 81,75% atau capaian kinerjanya turun menjadi sebesar 104,01%, dibanding dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 112,49%, tahun 2021 yaitu sebesar 102,25% dan tahun 2020 sebesar 100,00%.

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023 Pada Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020 – 2024

Realisasi Kinerja Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A pada tahun 2024 sebesar 82,44% jika dibandingkan dengan target dalam Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2024 sebesar 83,38% maka capaian kinerja mencapai 99%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.30**.

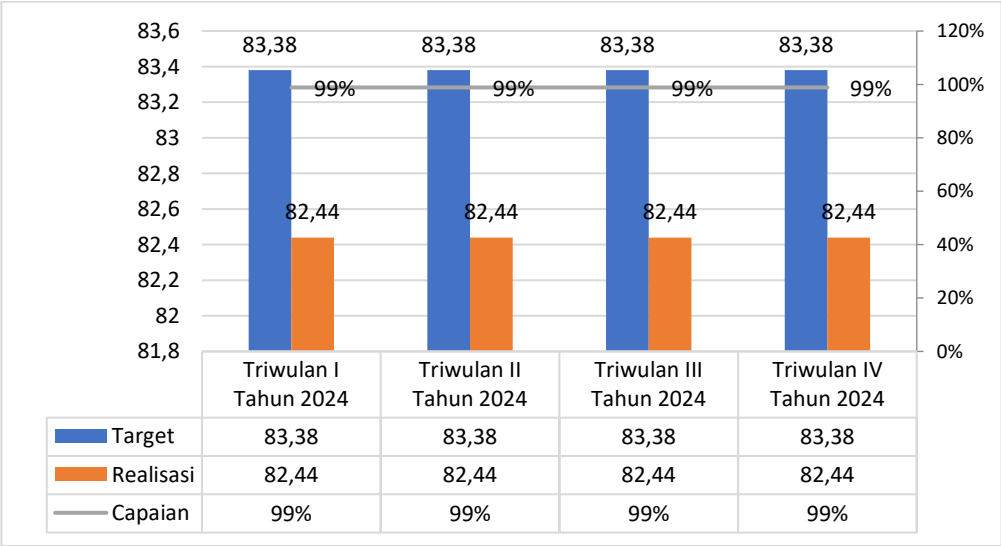

Gambar III.30 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020 - 2024 (IKK 3 Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A pada tahun 2024)

a.7. Benchmark Internasional

Benchmark untuk Presentase Penerapan SMART Terminal Tipe A menggunakan data dari negara Korea Selatan. Korea Selatan telah menerapkan teknologi *Intelligent Transport System* (ITS) dan konsep *Smart Mobility.* Untuk mendukung konsep tersebut, Korea Selatan menjalankan beberapa program di antaranya *On Demand e-Bus Service* dan *Integrated Mobility Service. On Demand e-Bus Service* merupakan layanan reservasi bus via internet dan *smartphone* mulai dari proses pembayaran tiket hingga *boarding* secara *realtime. Integrated Mobility Service* merupakan layanan reservasi dan pembayaran tiket terintegrasi dari berbagai layanan transportasi diantaranya taksi, *Bus Rapid Transit* (BRT), parkir, rental mobil, angkutan antar kota, angkutan dalam kota, kereta api dan pesawat. Pada tahun 2019, 97% pembayaran tiket Bus di Kota Seoul sudah dilakukan secara *online* sehingga presentase pembayaran tiket secara *offline* di terminal dan halte sudah sangat sedikit.

Sebagai perbandingan, Presentase Penerapan SMART Terminal Tipe A sebesar 82,44% didapat dari pembobotan 3 parameter yaitu jumlah terminal yang melaporkan data produksi di SIASATI (bobot 74%), jumlah pengadaan mesin *check in* tiket (bobot 8,4%) dan jumlah penerapan Terminal *Online System* (bobot 17,6%). Terkait layanan *e-ticketing*, hingga tahun 2023 sebanyak 8 Terminal Tipe A (7,77%) sudah memiliki mesin *check in* tiket sehingga

mayoritas pembayaran dan *boarding* masih dilakukan secara *offline.* Untuk jumlah terminal yang melaporkan data produksi di SIASATI sudah mencapai 114 Terminal Tipe A (110,68%) sedangkan jumlah penerapan *Terminal Online System* (penerapan *hardware*) sebanyak 5 Terminal Tipe A (4,85%).

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dari sisi digitalisasi layanan di terminal, Korea Selatan telah lebih baik khususnya terkait integrasi layanan reservasi dan pembelian tiket serta metode pembayaran yang hampir sepenuhnya *cashless*. Hal tersebut membuat Korea Selatan dapat dijadikan contoh.

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan bekerjasama dengan Pemerintah Korea Selatan khususnya *Ministry of Land Infrastructure and Transportastion* (MOLIT) mengadakan kegiatan Modernisasi Terminal dengan salah satu bagian kegiatannya yaitu melakukan *benchmarking* melalui kunjungan lapangan di Korea Selatan antara lain Bandara Incheon, Stasiun Seoul, Terminal Daejeon, Terminal Sinsegae, Siheung Haneul Rest Area (Transfer Center), dan Jamsil Transfer Center.

2. IKK 9.4.3.B Rasio Beroperasinya Fasilitas Penimbangan untuk Mendukung Keselamatan

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada IKK Rasio Beroperasinya Fasilitas Penimbangan untuk Mendukung Keselamatan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 25 Capaian Rasio Beroperasinya Fasilitas Penimbangan untuk Mendukung Keselamatan

SK 9	**Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang**			
IKK 9.4.3.B	**Rasio Beroperasinya Fasilitas Penimbangan untuk Mendukung Keselamatan**			Satuan: Rasio
Target/Realisasi/Capaian	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**
Target	0,636	0,636	0,636	0,636
Realisasi	0,636	0,636	0,636	0,636
Capaian	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Rasio Beroperasinya Fasilitas Penimbangan untuk Mendukung Keselamatan merupakan perbandingan antara Jumlah fasilitas penimbangan yang beroperasi dibandingkan dengan jumlah lokasi fasilitas penimbangan yang ditetapkan. Adapun formula perhitungannya sebagai berikut:

Rasio Beroperasinya Fasilitas Penimbangan untuk Mendukung Keselamatan = Jumlah fasilitas penimbangan yang beroperasi / Jumlah lokasi fasilitas penimbangan yang ditetapkan

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025

Realisasi kinerja Rasio Beroperasinya Fasilitas Penimbangan untuk Mendukung Keselamatan pada Tahun 2025 sebesar 0,636 jika dibandingkan dengan target Revisi II PK Tahun 2025 sebesar 0,636 maka capaian kinerja mencapai 100,00%. Pencapaian ini digambarkan pada Gambar II.7. Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 9.4.3.B Rasio Beroperasinya Fasilitas Penimbangan untuk Mendukung Keselamatan pada Tahun 2025).

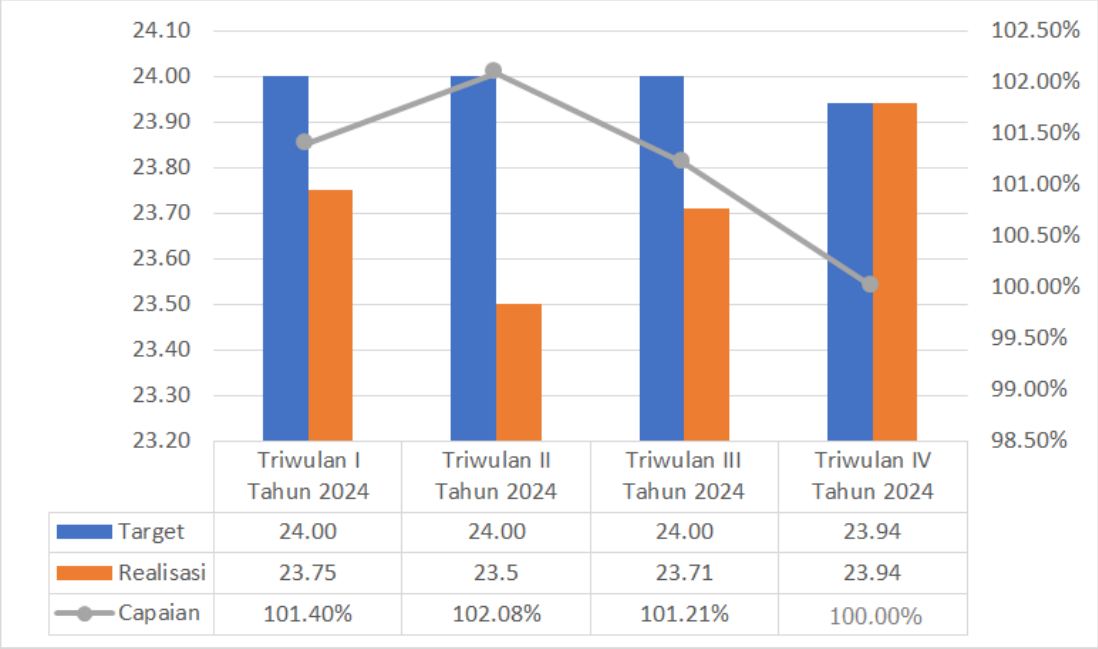

Gambar III.31 Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 1 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada tahun 2024)

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- **Narasi Dasar Hukum**

Operasional Fasilitas Penimbangan dilaksanakan berdasarkan beberapa acuan peraturan dan keputusan antara lain :

1. PM 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Kendaraan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan;
2. Keputusan Menteri Perhubungan No KP – PHB 144 tahun 2025 tentang Penetapan Pengoperasian Fasilitas Penimbangan di Seluruh Indonesia;
3. Perdirjen Hubdat SK.736/AJ.108/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan;
4. Perdirjen Hubdat No. KP-DRJD 2848 Tahun 2025 tentang Penetapan Tipe Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor;
5. Perdirjen Hubdat No. KP-DRJD 1045 Tahun 2025 tentang Penetapan Lokasi Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan Permenhub Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang Dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan, pasal 5 ayat (2) menyatakan jenis pelanggaran angkutan barang di UPPKB meliputi:

a. tata cara pemuatan barang;
b. dimensi kendaraan Angkutan Barang;

c. tekanan seluruh sumbu dari/atau setiap sumbu kendaraan Angkutan Barang;
d. dokumen Angkutan Barang;
e. kelebihan muatan pada setiap kendaraan yang diperiksa; dan
f. jenis barang yang diangkut, berat angkutan, dan asal tujuan.

Pada Tahun 2025, sebanyak 89 UPPKB yang beroperasi sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP – PHB 144 tahun 2025 tentang Penetapan Pengoperasian Fasilitas Penimbangan di Seluruh Indonesia.

- **Narasi Kronologi Target**

Pada triwulan pertama, terdapat perubahan pada target indikator kinerja kegiatan Rasio Beroperasinya Fasilitas Penimbangan untuk Mendukung Keselamatan, yang awalnya ditetapkan berdasarkan proyeksi awal dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) sementara. Perubahan ini terjadi karena dokumen Renstra masih dalam tahap penyusunan, sehingga penyesuaian dilakukan untuk memastikan target yang lebih realistis dan sesuai dengan perkembangan terkini.

Awalnya, target indikator kinerja kegiatan Rasio Beroperasinya Fasilitas Penimbangan untuk Mendukung Keselamatan ditetapkan dengan target yang tinggi, namun setelah mempertimbangkan kapasitas anggaran, infrastruktur yang tersedia, dan kebijakan baru yang sedang disusun, target tersebut disesuaikan agar lebih dapat dicapai dalam jangka waktu yang ditentukan. Dengan perubahan tersebut, diharapkan indikator kinerja ini dapat lebih mencerminkan kondisi aktual dan lebih realistis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

- **Faktor Keberhasilan**

Berikut adalah beberapa factor keberhasilan yang dapat mendukung dalam pencapaian target pada Indikator Kinerja Kegiatan Rasio Beroperasinya Fasilitas Penimbangan untuk Mendukung Keselamatan:

1. Adanya penetapan operasional fasilitas penimbangan melalui regulasi yang menjadi dasar hukum pengoperasian UPPKB;
2. Tersedianya dukungan anggaran untuk pengoperasian, pemeliharaan, dan perbaikan fasilitas penimbangan guna menjamin keberlanjutan operasional;
3. Ketersediaan sumber daya manusia operasional UPPKB yang mendukung pelaksanaan fungsi penimbangan kendaraan;
4. Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas penimbangan secara bertahap sehingga fasilitas dapat beroperasi dan mendukung keselamatan lalu lintas;
5. Penguatan koordinasi dengan instansi terkait dalam mendukung operasional fasilitas penimbangan dan pengendalian kendaraan angkutan barang.

- **Faktor Kegagalan**

Berikut ini adalah faktor potensi yang menjadi penyebab kegagalan tercapainya IKK Rasio Beroperasinya Fasilitas Penimbangan untuk Mendukung Keselamatan:

1. Belum adanya Rencana Induk Penyelenggaraan Fasilitas Penimbangan di Seluruh Indonesia;
2. Belum terlaksananya kegiatan rehabilitasi pada fasilitas penimbangan;
3. Kurangnya SDM pada UPPKB baik secara kuantitas maupun kualitas untuk memenuhi minimal operasi.

- **Narasi Realisasi Kinerja**

Berdasarkan Rasio Beroperasinya Fasilitas Penimbangan untuk Mendukung Keselamatan Tahun 2025, diperoleh realisasi sebesar 0,636 sehingga capaian kinerja pada tahun 2025 telah mencapai target Revisi II PK Tahun 2025.

Rumus:
Rasio Beroperasinya Fasilitas Penimbangan untuk Mendukung Keselamatan = Jumlah fasilitas penimbangan yang beroperasi / Jumlah lokasi fasilitas penimbangan yang ditetapkan

Perhitungan:
Rasio Beroperasinya Fasilitas Penimbangan untuk Mendukung Keselamatan = 89/140 = 0,636

Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.

- **Narasi Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Rasio Beroperasinya Fasilitas Penimbangan untuk Mendukung Keselamatan Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\%\ Capaian = \frac{0{,}636}{0{,}636} x100\% = 100\%$$

- **Realisasi Anggaran**

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024 untuk mendukung capaian indikator kinerja kegiatan Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 2024 adalah

Tabel III. 27 Realisasi Anggaran

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW IV	REALISASI TW I		REALISASI TW II		REALISASI TW III		REALISASI TW IV	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
GA Program Infrastruktur Konektivitas										
SK 3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat										
IKK 1. Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan ini yaitu : 1. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Penimbangan Kendaraan Bermotor; 2. Monitoring Pelaksanaan Perencanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor 3. Monitoring Pelaksanaan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor; 4. Monitoring Pendampingan Kerjasama Operasional Fasilitas Penimbangan dengan Pihak Kedua;	Rp15.455.892.000	Rp16.778.159.000	Rp343.811.441	2,22 %	Rp3.440.839.052	21,97 %	Rp9.123.306.606	58.15 %	Rp16.747.470.241	99,82 %

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW IV	REALISASI TW I		REALISASI TW II		REALISASI TW III		REALISASI TW IV	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
GA Program Infrastruktur Konektivitas										
SK 3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat										
5. Kerjasama Pengelolaan Operasional UPPKB dengan Pihak Kedua; 6. Pemeliharaan perangkat (Peneraan ulang Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Portabel, Pemeliharaan perangkat WDIM di Balonggandu, Pemeliharaan Perangkat WDIM di Kulwaru, Pemeliharaan Perangkat WDIM di Losarang, Pemeliharaan Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Portabel); 7. Penyusunan Assessment Kelayakan UPPKB Seluruh Indonesia Tahun 2024; 8. Standar Pelayanan Minimum UPPKB; 9. Pedoman Teknis Pemasangan dan Konfigurasi Jembatan Timbang Online; 10. Evaluasi dan Pengembangan Alat pada Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor;										

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Menyusun dan menetapkan Rencana Induk Penyelenggaraan Fasilitas Penimbangan sebagai acuan strategis dalam pembangunan, rehabilitasi, dan pengoperasian fasilitas di seluruh wilayah Indonesia;
2. Percepatan Pelaksanaan Rehabilitasi Fasilitas Penimbangan terhadap fasilitas penimbangan yang tidak beroperasi melalui dukungan anggaran pemeliharaan dan peningkatan fasilitas;
3. Berkoordinasi dengan Bagian SDM untuk dapat dilakukan pemetaan kembali personil di BPTD agar memenuhi kebutuhan petugas di fasilitas penimbangan agar sesuai dengan kebutuhan minimal operasi di setiap lokasi.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020

Realisasi kinerja Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 2024 sebesar 23,94% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Revisi II Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023 sebesar 23,94% maka capaian kinerja mencapai 100,00%. Sedangkan realisasi kinerja Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 2023 sebesar 24,9% jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 dalam Revisi II Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023 sebesar 25,0% maka capaian kinerja mencapai 100,40% sedangkan pada realisasi kinerja Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 2022 sebesar 29% dengan target 30% maka capaian kinerja mencapai 103,33%. Pada tahun 2021 realisasi kinerja sebesar 23,58 dengan target 35,0 maka capaian kinerja mencapai 132,63%. Pada tahun 2020 realisasi kinerja sebesar 50,0 dengan target 50,0 maka capaian kinerja mencapai 100%. Sehingga realisasi kinerja Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 4,1 dari tahun 2022 dan penurunan sebesar 25,1 dari tahun 2020, namun mengalami kenaikan sebesar 1,32 dari tahun 2021. Pada kondisi ini apabila realisasi mengalami penurunan maka realisasi tersebut semakin baik, artinya tingkat pelanggaran semakin berkurang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini:

Tabel III. 28 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020

SK.3 Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat						
No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik/Turun
1	2020	IKK 1	50,0	50,0	100%	Tetap
2	2021	IKK 1	35,0	23,58	132,63%	Naik
3	2022	IKK 1	30,0	29	103,33%	Tetap
4	2023	IKK 1	25,0	24,9	100,40%	Tetap
5	2024	IKK 1	23,94	23,94	100,00%	Tetap

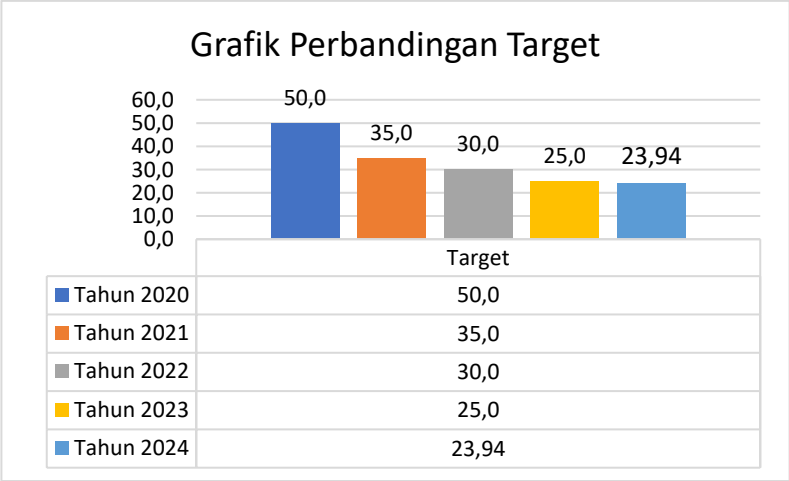

Gambar III.32 Perbandingan Target Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021, 2020

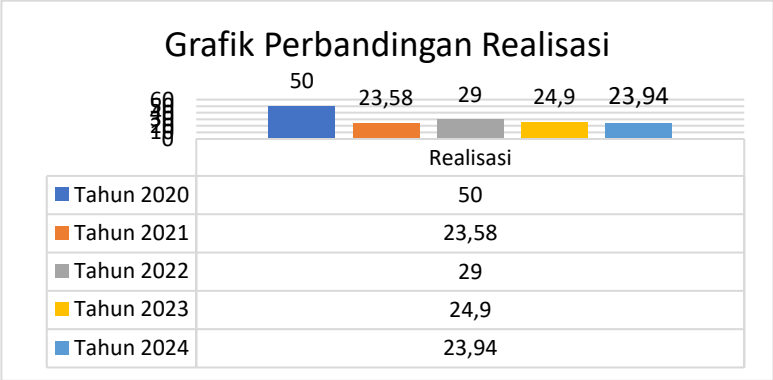

Gambar III.33 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021, 2020

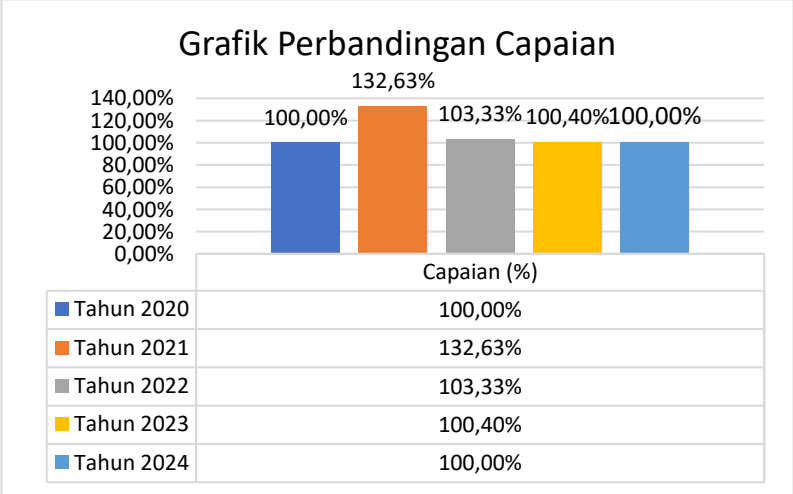

Gambar III.34 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021, 2020

Capaian Kinerja Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 2024 merupakan komitmen terhadap penurunan Persentase Pelanggaran pada UPPKB

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 2024. Sehingga realisasi Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 2024 adalah 23,94% atau capaian kinerjanya tetap menjadi sebesar 100,00%. Sedangkan realisasi Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 2023 adalah 24,9% atau capaian kinerjanya tetap menjadi sebesar 100,40%, dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 103,33%, tahun 2021 sebesar 132,63% dan tahun 2020 sebesar 100,40%.

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020 – 2024

Realisasi Kinerja Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 2024 sebesar 23,94% jika dibandingkan dengan target dalam Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan tahun 2024 sebesar 20% maka capaian kinerja mencapai 84%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.13**.

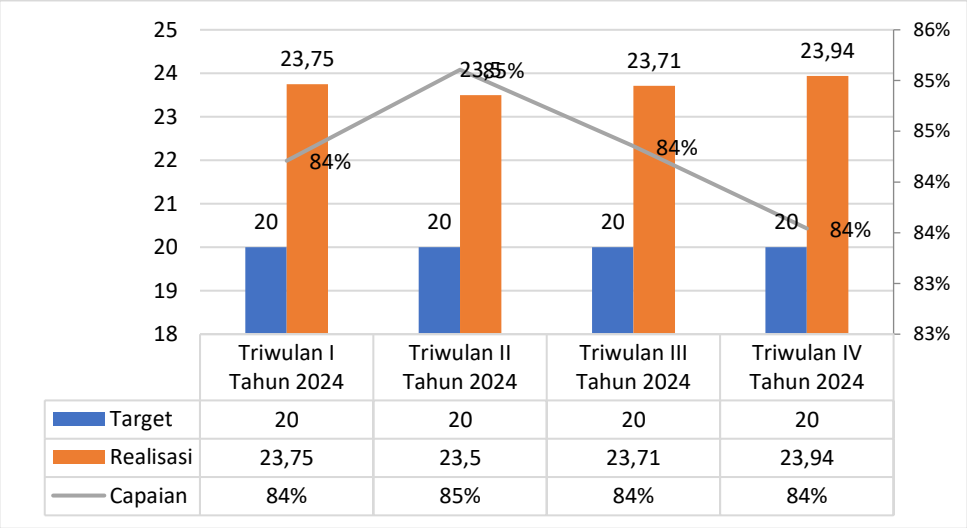

Gambar III.35 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020 - 2024 (IKK 1 Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat tahun 2024)

a.7. *Benchmark* Nasional

Benchmark internasional terhadap persentase pelanggaran di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menggunakan data dari Thailand sebagai pembanding. Berdasarkan laporan Traffic Weight Control by Thailand yang dipresentasikan dalam APEC Vietnam, tercatat bahwa pada tahun dari 10.588 kendaraan angkutan barang yang diperiksa, hanya 195 kendaraan yang terindikasi mengalami kelebihan muatan—atau setara dengan 1,84%. Angka ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang sangat tinggi.

Capaian tersebut tidak terlepas dari ketegasan Pemerintah Thailand dalam memberlakukan dan menegakkan regulasi over dimension over loading (ODOL). Penindakan pelanggaran dilakukan secara menyeluruh, mulai dari aspek perizinan hingga pengawasan operasional di lapangan, dengan sistem yang konsisten dan terintegrasi. Diketahui bahwa Pemerintah Thailand memberlakukan sanksi bagi 3 (tiga) pihak yang terlibat dalam pelanggaran ODOL, yaitu pihak pemilik kendaraan, pengirim barang, dan penerima barang. Pendekatan ini

memperlihatkan komitmen kuat dari pemerintah dalam menjaga keselamatan dan ketertiban lalu lintas angkutan barang.

Pada tahun 2024, capaian persentase pelanggaran di UPPKB Indonesia berada pada angka 23,94%. Perbandingan ini menjadi cerminan penting bahwa keberhasilan dalam pengendalian ODOL sangat ditentukan oleh ketegasan regulasi dan komitmen pemerintah dalam pelaksanaannya secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil benchmark tersebut, Indonesia perlu memperkuat komitmen penegakan regulasi ODOL secara menyeluruh dan konsisten. Hal ini dapat dilakukan dengan mempertegas sanksi terhadap pelanggaran, memperkuat koordinasi antar instansi terkait, serta meningkatkan integrasi pengawasan dari hulu ke hilir, mulai dari proses perizinan kendaraan hingga pelaksanaan penimbangan di lapangan. Selain itu, perlu adanya peningkatan kapasitas SDM dalam pengawasan. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan angka pelanggaran dapat ditekan secara signifikan, sejalan dengan upaya mewujudkan angkutan barang yang aman, tertib, dan berkeselamatan.

Perlu digarisbawahi bahwa data persentase pelanggaran pada UPPKB tersebut menunjukkan rata-rata seluruh jenis pelanggaran yang tercatat di UPPKB seluruh Indonesia yang didalamnya mencakup pelanggaran kelebihan muatan, dimensi, dokumen kendaraan, tata cara muat, persyaratan teknis, maupun kelas jalan.

Pada UPPKB telah dilaksanakan Sistem Manajemen Mutu yaitu Upaya yang sistematis melalui fungsi perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan / pengendalian serta tindak lanjut terhadap semua unsur organisasi baik internal maupun eksternal terhadap Mutu Produk / Jasa dan Kepuasan Pelanggan. Sehingga dengan adanya Sistem Manajemen Mutu tersebut diharapkan mampu merubah paradigma berupa adanya perbaikan sarana – prasarana, Peningkatan Kompetensi SDM, dan adanya Sertifikasi ISO 9001:2015.

Dampak positif Balai Pengelola Transportasi Darat dan Satuan Pelayanan UPPKB menerapkan Sistem Manajemen Mutu 9001:2015 meliputi:

1. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Telah memiliki tools untuk menilai kinerja UPPKB
2. Manajemen Puncak (Kepala BPTD) dan Stakeholder (Ditjen Hubdat) dapat memberikan arahan dan target pengawasan sesuai dengan analisa data produktivitas yang didapatkan dari Penilaian Produktivitas menggunakan Pendekatan SMM (Komunikasi Top Down) terlaksana);
3. Terjaminya kesamaan prosedur pelaksanaan dan keluaran pekerjaan di UPPKB;
4. Sebagai basis dokumentasi awal dalam rangka penyiapan ZI, WBK & WBBM;
5. Pelaksanaan Survey Kepuasan Pelanggan telah dilakukan sehingga Organisasi dapat melakukan pemantauan sesuai dengan persepsi pelanggan;
6. Dengan adanya SOP Rencana Kerja Operasional di UPPKB, proses penyusunan dokumen kebutuhan anggaran dapat mencakup kebutuhan di UPPKB (Komunikasi Bottom Up sudah terlaksana);
7. BPTD & UPPKB sudah mulai menerapkan Pengendalian risiko dengan penyusunan dokumen identifikasi risiko;
8. Pemastian pelaksanaan perbaikan secara terus menerus atas sistem kerja baik di BPTD maupun UPPKB menggunakan pendekatan Sistem Manajemen Mutu;

Sedangkan untuk Target kerjasama Sistem Manajemen Muti di UPPKB ini yaitu :

1. Peningkatan Kinerja BPTD dan UPPKB;
2. Perubahan Mindset UPPKB;
3. SDM Profesional UPPKB;
4. Penggunaan Teknologi Sistem INF;

5. Pendataan yang baik;
6. Tidak ada pungutan liar;
7. Sertifikasi ISO 9001:2015 pada UPPKB;
8. Bebas ODOL

Hasil Pelaksanaan Pendampingan yang telah dilakukan Penilaian Oleh Tenaga Ahli Konsultan Manajemen untuk dapat dilaksanakan Sertifikasi di UPPKB. Persyaratan Sertifikasi tersebut diawali dengan adanya sosialisasi (awareness) ISO 9001 dengan Implementasi selama 3 bulan menerapkan kebijakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait UPPKB, kemudian dilakukan audit internal oleh BPTD dan Satpel UPPKB melalui Rapat Tinjauan Manajemen dimana Platform UPPKB telah di kalibrasi. Kemduan untuk penilaian kesesuaian badan sertifikasi dilakukan oleh Audit Eksternal yaitu TUV Rheinland Certified. Berikut adalah daftar UPPKB yang telah tersertifikasi ISO 9001:2015:

III.2.5 SK 13 Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal

- **Uraian Kegiatan**

Pencapaian Sasaran Kegiatan 13 diukur melalui 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:1.IKK 13.1.3 A Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 3. IKK 13.1.3 C Peningkatan Kinerja Pelaksanaan anggaran . 4. IKK 13.1.3 D Indeks Pengelolaan aset dengan Tata Usaha disetiap Direktorat;

Tabel III. 30 Sasaran Kegiatan 13 Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	Q1	Q2	Q3	Q4
SK 13 Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal							
IKK 13.1.3. A	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,38				
		Target		3,38	3,38	3,38	3,38
		Realisasi		3,382	3,382	3,382	3,382
		Capaian		100,06%	100,06%	100,06%	100,06%
IKK 13.1.3. B	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	82,3				
		Target		82,3	82,3	82,3	82,3
		Realisasi		82,76	82,76	82,76	82,76
		Capaian		100,56%	100,56%	100,56%	100,56%
IKK 13.1.3. C	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	94,1				
		Target		94,1	94,1	94,1	94,1
		Realisasi		100	98,92	98,48	96,12
		Capaian		106,27%	105,12%	104,65%	102,15%
IKK 13.1.3. D	Indeks Pengelolaan Aset	Nilai	3,2				
		Target		3,2	3,2	3,2	3,2
		Realisasi		0	0	3,56	3,56
		Capaian		0,00%	0,00%	111,25%	111,25%

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Pencapaian Sasaran Kegiatan 1 diukur melalui 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:
IKK 13.1.3.A. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
IKK 13.1.3.B Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
IKK 13.1.3.C Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran
IKK 13.1.3.D Indeks Pengelolaan Aset

III.2.4.1 IKK 13.1.3.A Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Keberhasilan pencapaian SK 13 Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal pada IKK **Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 31 Capaian Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat

SK 13	**Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal**					
IKK 13.1.3.A	**Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)**					Satuan: Nilai
Target/Realisasi/Capaian		Q1	Q2	Q3	Q4	Tahun 2025
Target		3,38	3,38	3,38	3,38	
Realisasi		3,382	3,382	3,382	3,382	
Capaian		100,06%	100,06%	100,06%	100,06%	

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

IKK Tingkat Maturitas SPIP merupakan pengukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana tingkat kematangan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam suatu instansi. Fokus utamanya adalah memastikan bahwa SPIP berjalan secara efektif, terdokumentasi, dilaksanakan, dan dipantau untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dengan adanya Maturitas SPIP, organisasi dapat mengidentifikasi, mengelola, dan mengendalikan risiko secara lebih baik, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Manfaat Peningkatan Maturitas SPIP:

- Meminimalkan risiko kecurangan dan kesalahan.
- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian kinerja.
- Memperkuat budaya pengendalian dan kepatuhan.
- Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja instansi.

Capaian kinerja IKK Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dihitung berdasarkan Capaian Nilai pada Lembar Kerja Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Terlampir disampaikan Lembar Kerjanya:

Capaian Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP

PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI
KEMENHUB PERHUBUNGAN
Periode sampai dengan 30 Juni 2025

PENYIMPULAN NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI

Komponen, Unsur, dan Subunsur	Skor	Bobot Unsur	Bobot Komponen	Nilai Unsur	Nilai Komponen	Nilai Akhir
PENETAPAN TUJUAN						
Kualitas Sasaran Strategis		50,00%				
Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis		50,00%				
SUB JUMLAH PENETAPAN TUJUAN		100,00%				
BOBOT PENETAPAN TUJUAN			40,00%			
STRUKTUR DAN PROSES		3,75%				
Lingkungan Pengendalian		3,75%				
Penegakan Integritas dan Nilai Etika (1.1)		3,75%				
Komitmen terhadap Kompetensi (1.2)		3,75%				
Kepemimpinan yang kondusif (1.3)		3,75%				
Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan (1.4)		3,75%				
Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat (1.5)		3,75%				
Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia (1.6)		3,75%				
Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang Efektif (1.7)		3,75%				
Hubungan Kerja Yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait (1.8)		3,75%				
Penilaian Risiko						
Identifikasi risiko (2.1)		10,00%				
Analisis risiko (2.2)		10,00%				
Kegiatan Pengendalian						
Reviu Atas Kinerja Instansi Pemerintah Yang Bersangkutan (3.1)		2,27%				
Pembinaan Sumber Daya Manusia (3.2)		2,27%				
Pengendalian Atas Pengelolaan Sistem Informasi (3.3)		2,27%				
Pengendalian Fisik Atas Aset (3.4)		2,27%				
Penetapan dan Reviu Atas Indikator dan Ukuran Kinerja (3.5)		2,27%				
Pemisahan Fungsi (3.6)		2,27%				
Otorisasi Atas Transaksi dan Kejadian Yang Penting (3.7)		2,27%				
Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu Atas Transaksi dan Kejadian (3.8)		2,27%				
Pembatasan Akses Atas Sumber Daya dan Pencatatannya (3.9)		2,27%				
Akuntabilitas Terhadap Sumber Daya dan Pencatatannya (3.10)		2,27%				
Dokumen yang Baik Atas Sistem Pengendalian Intern Serta Transaksi dan Kejadian Penting (3.11)		2,27%				
Informasi dan Komunikasi						
Informasi yang Relevan (4.1)		5,00%				
Komunikasi yang Efektif (4.2)		5,00%				
Pemantauan						
Pemantauan Berkelanjutan (5.1)		7,50%				
Evaluasi Terpisah (5.2)		7,50%				
SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES						
BOBOT STRUKTUR DAN PROSES			30,00%			
PENCAPAIAN TUJUAN						
Efektivitas dan Efisiensi						
Capaian Outcome		20,00%				
Capaian Output		10,00%				
Keandalan Laporan Keuangan						
Opini LK		25,00%				
Pengamanan atas Aset						
Catatan Pengamanan Aset		25,00%				
Ketaatan pada Peraturan						
Temuan Ketaatan - BPK		20,00%				
IEPK						
SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN		100,00%				
BOBOT PENCAPAIAN TUJUAN			30,00%			
MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP TERINTEGRASI						

IKK Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan tugas dan fungsi dari Subbagian Tata Usaha

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025

Realisasi kinerja IKK Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Tahun 2025 3,382 jika dibandingkan dengan target PK Tahun 2025 sebesar 3,38 maka capaian kinerja adalah 100,06%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.8**. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 13.1.3.A Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

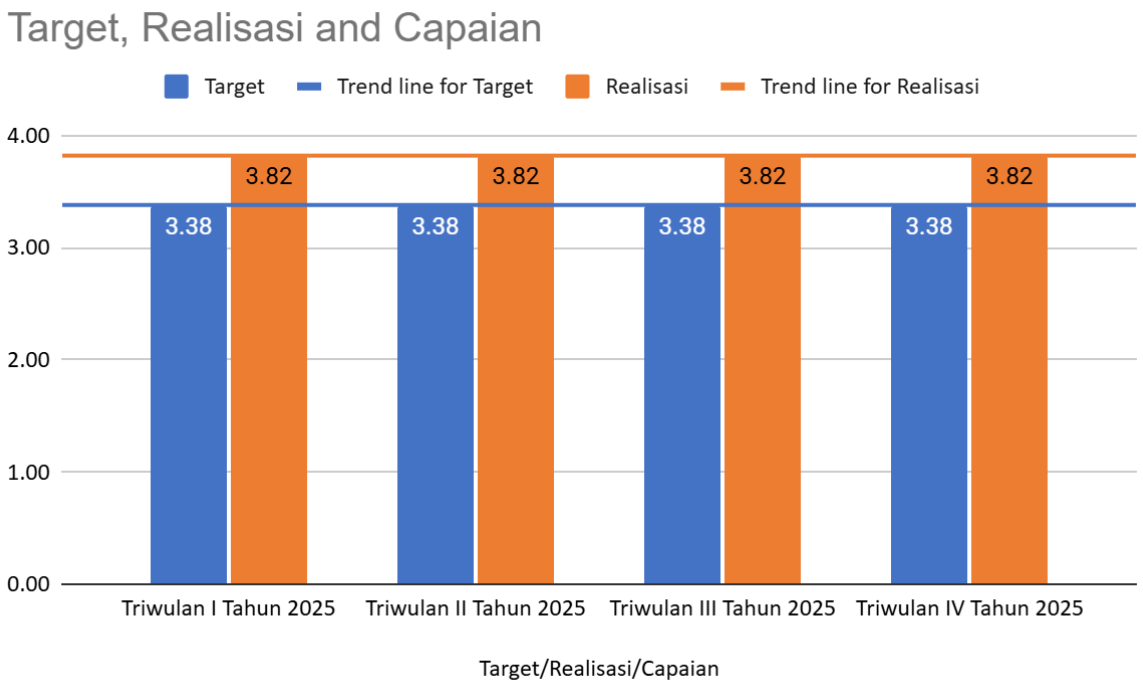

Gambar III.36 Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 13.1.3.A Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

a.3. Analisa Keberhasilan dan Kegagalan

- **Narasi Dasar Hukum**

Dalam melaksanakan IKK Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Jalan mengacu pada aturan/dasar hukum yang telah ditetapkan, antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
c. Peraturan BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP;
d. Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
e. Perarturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
f. Permenhub Perarturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
g. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Mengacu pada Peraturan BPKP Nomor 4 Tahun 2016, tingkat maturitas SPIP diukur dari 5 unsur:

- Lingkungan Pengendalian
- Penilaian Risiko
- Kegiatan Pengendalian
- Informasi dan Komunikasi
- Pemantauan Pengendalian Intern

Berdasarkan **Pedoman Penilaian Maturitas SPIP**, terdapat **5 tingkat kematangan:**

Tabel II 22 Pedoman Penilaian Maturitas SPIP

Level	Deskripsi
Level 1	Tidak Terdokumentasi
Level 2	Terdokumentasi
Level 3	Dilaksanakan Sesuai Dokumen
Level 4	Dipantau dan Dievaluasi
Level 5	Berkelanjutan

Target minimal secara nasional adalah **Level 3 (Terdefinisi/Dilaksanakan)**.

- **Narasi Kronologi Target**

  Target pada IKK Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025 menggunakan dan mengacu target yang digunakan oleh Ditjen Perhubungan Darat pada Draft Renstra Ditjen Perhubungan Darat 2025-2029 yang masih dalam proses finalisasi dikarenakan masih menunggu Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sehingga perubahan Sasaran Kegiatan maupun Indikator Kinerja Kegiatan masih dilakukan penyempurnaan .

- **Narasi Faktor Keberhasilan**

  Faktor – faktor keberhasilan dalam mencapai target IKK Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sebagai berikut:

  1. Dukungan penuh dan keterlbatan aktif dari pimpinan tertinggi organisasi dalam penerapan SPIP.
  2. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang kompeten dalam pengendalian intern, manajemen risiko, dan pengawasan.
  3. Tersusunnya kebijakan, prosedur, peta risiko, dan dokumen pendukung penerapan SPIP secara lengkap dan terdokumentasi dengan baik.
  4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penerapan dan pemantauan pengendalian intern.
  5. Terbangunnya budaya sadar risiko dan kepatuhan di seluruh unit kerja, dimana setiap pegawai memahami dan menerapkan pengendalian intern dalam tugas sehari-hari.

- **Narasi Faktor Kegagalan**

  Faktor – faktor kendala yang dihadapi dalam mencapai target IKK Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sebagai berikut:

  1. Pimpinan kurang memberikan perhatian dan tidak menempatkan SPIP sebagai prioritas.
  2. Kurangnya pelatihan teknis tentang manajemen risiko, pengendalian intern, dan evaluasi SPIP.
  3. Ketidakteraturan dalam pencatatan dan pelaporan kegiatan pengendalian.
  4. Kapasitas dan jumlah APIP terbatas, sehingga pembinaan SPIP kurang maksimal.

- **Narasi Capaian Kinerja**

  Dengan demikian, capaian kinerja IKK Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan Triwulan IV Tahun 2025 terhadap target Revisi II Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\%\ Capaian = \frac{3{,}382}{3{,}38} x\ 100\% = 100{,}06\%$$

- **Narasi Realisasi Anggaran**

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025 untuk mendukung capaian indikator kinerja kegiatan Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat tahun 2025 adalah

Tabel III. 34 Realisasi Anggaran

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW IV	REALISASI TW I		REALISASI TW II		REALISASI TW III		REALISASI TW IV	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
WA. Program Dukungan Manajemen										
SK 13 Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal										
IKK 13.1.3.A Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator kinerja kegiatan ini yaitu: 1. Dukungan Manajemen Risiko Direktorat Prasarana Trasnportasi Jalan	Rp105.000.000	Rp105.000.000	Rp3.791.789.016	10,24 %	Rp9.053.169.524	24,97 %	Rp19.760.645.714	54.25 %	Rp34.806.409.250	97,41%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Mendorong Pimpinan untuk terlibat aktif dalam mengawal penguatan pengendalian intern.
2. Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi SDM melalui pelatihan, workshop, dan bimbingan teknis terkait SPIP, manajemen risiko, dan pengawasan.
3. Meningkatkan intensitas pengawasan intern dan evaluasi berkala terhadap efektivitas pengendalian intern.
4. Memastikan tindak lanjut atas hasil pengawasan dan rekomendasi perbaikan dilaksanakan tepat waktu.
5. Memanfaatkan aplikasi untuk memudahkan pencatatan, pelaporan, dan pemantauan pelaksanaan SPIP.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2025, 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020

Realisasi kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat tahun 2024 sebesar 91 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Revisi II Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024 sebesar 91 maka capaian kinerja mencapai 100,00%. Sedangkan realisasi kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat tahun 2023 sebesar 88 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 dalam Revisi II Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023 sebesar 88 maka capaian kinerja mencapai 100% sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2022 realisasi kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat tahun 2022 sebesar 86 dengan target 86 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pada tahun 2021 realisasi kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat tahun 2021 sebesar 86 dengan target 86 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pada tahun 2020 realisasi kinerja sebesar 85 dengan target 85 maka capaian kinerja mencapai 100%. Sehingga realisasi kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 2 dari tahun 2022 dan 2021 serta mengalami kenaikan sebesar 3 dari tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini:

Tabel III. 35 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020

SK.5 Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat						
No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik/Turun
1	2020	IKK 1	85	85	100%	Tetap
2	2021	IKK 1	86	86	100%	Tetap
3	2022	IKK 1	86	86	100%	Tetap
4	2023	IKK 1	88	88	100%	Tetap
5	2024	IKK 1	91	91	100%	Tetap

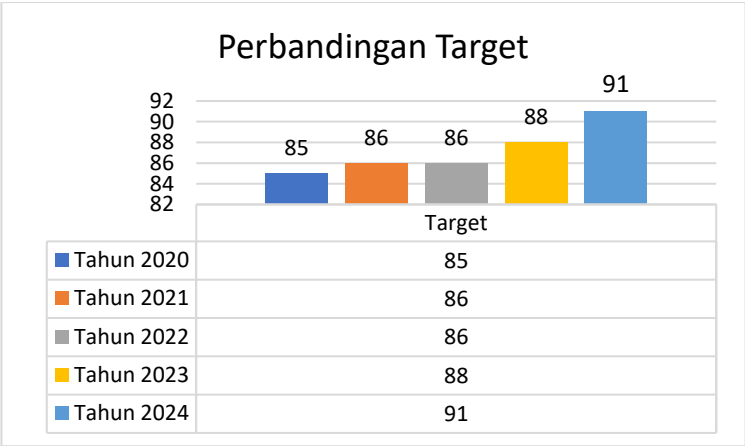

Gambar III.37 Perbandingan Target Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021, 2020

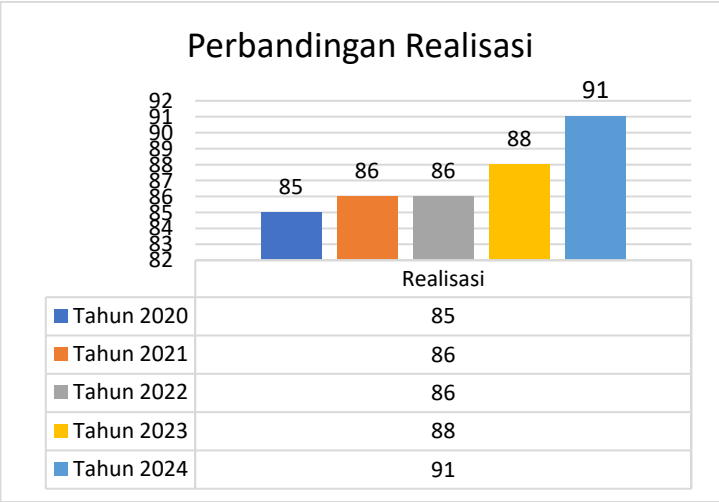

Gambar III.38 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021, 2020

Gambar III.39 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021, 2020

Capaian Kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat tahun 2024 merupakan komitmen terhadap Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat. Sehingga realisasi Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat tahun 2024

adalah 91 dengan capaian kinerja sebesar 100% atau capaian kinerjanya sama dengan tahun 2023, 2022, 2021, 2020 yaitu sebesar 100%.

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020 – 2024

Realisasi Kinerja Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat tahun 2024 sebesar 91 jika dibandingkan dengan target dalam Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2024 sebesar 89 maka capaian kinerja mencapai 102%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.40**.

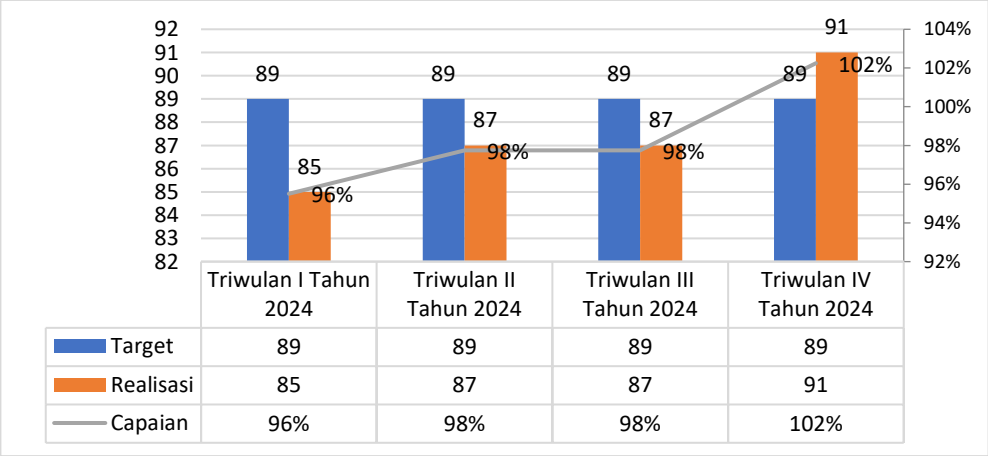

Gambar III.40 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020 - 2024 (IKK 1 Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat tahun 2024)

III.2.5.2 IKK 13.1.3.B Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

- **Uraian Kegiatan**

  Keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada IKK Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 36 Capaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

SK 13	**Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal**	
IKK 13.1.3.B	**Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**	Satuan: Nilai

Target/Realisasi /Capaian	Q1	Q2	Q3	Q4	Tahun 2025
Target	82,3	82,3	82,3	82,3	
Realisasi	82,76	82,76	82,76	82,76	
Capaian	100,56%	100,56%	100,56%	100,56%	

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan Pelaporan Kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (sumber: PM 85 Tahun 2020). sebuah indikator untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil *(outcome)* terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil *(result oriented government)* di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran, tujuan, Program, kebijakan, anggaran dan target yang telah ditetapkan, dengan cara membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target sebagaimana indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Rumus Pengukuran

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Penilaian dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB untuk tingkat Kementerian/Lembaga dan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan untuk tingkat Eselon I setiap satu tahun sekali atas pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan komponen dan bobot sebagai berikut:

Tabel II 25. Bobot Penilaian SAKIP

No	Kriteria	Bobot (%)
1	Perencanaan Kinerja	30
2	Pengukuran Kinerja	25
3	Pelaporan Kinerja	15
4	Pelaporan Kinerja	10
5	Capaian Kinerja	20
	Total	**100**

Sumber: Peraturan Menteri PAN RB Nomor 12 Tahun 2015
Adapun hasil interpretasi penilaian disajikan pada tabel berikut:

Tabel II. 26 Interpretasi Hasil Nilai SAKIP

No.	Predikat	Nilai c Angka	Interpretasi
1.	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
2.	A	>80 – 90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	BB	>70 – 80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4.	B	>60 – 70	Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
4.	CC	>50 – 60	Cukup (memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar
5.	C	>30 – 50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
6.	D	0 – 30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Keterangan:

III. nilai > 90 – 100 (lebih dari sembilan puluh sampai dengan seratus) dengan kategori **AA (sangat memuaskan)**;
IV. nilai > 80 – 90 (lebih dari delapan puluh sampai dengan sembilan puluh) dengan kategori **A (memuaskan)**;
V. nilai > 70 – 80 (lebih dari tujuh puluh sampai dengan delapan puluh) dengan kategori **BB (sangat baik)**;
VI. nilai > 60 – 70 (lebih dari enam puluh sampai dengan tujuh puluh) dengan kategori **B (baik)**;
VII. nilai > 50 - 60 (lebih dari lima puluh sampai dengan enam puluh) dengan kategori **CC (cukup)**; dan
VIII. nilai > 30 – 50 (lebih dari tiga puluh sampai dengan lima puluh) dengan kategori **C (kurang)**; dan

nilai 0 - 30 (nol sampai dengan tiga puluh) dengan kategori **D (sangat kurang)**

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025

Realisasi kinerja Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Tahun 2025 sebesar 82,76% jika dibandingkan dengan target Revisi II PK Tahun 2025 sebesar 82,3% maka capaian kinerja mencapai 100,56%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.9.** Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana

Transportasi Jalan (IKK 13.1.3.B Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Tahun 2025)..

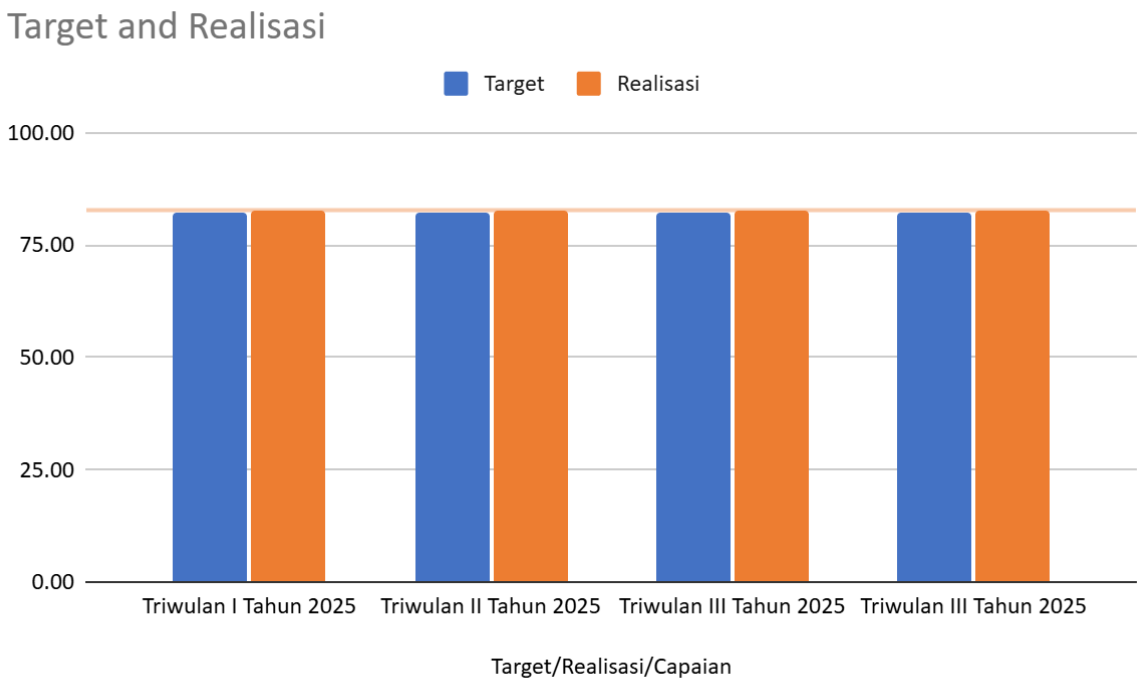

Gambar III.17 Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 13.1.3.B Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Triwulan III Tahun 2025)

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- **Narasi Dasar Hukum**

  Dalam melaksanakan IKK Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Jalan mengacu pada aturan/dasar hukum yang telah ditetapkan, antara lain:
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP;
  - Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis SAKIP;
  - Peraturan Menteri PANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP;
  - Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kemenhub;
  - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

- **Narasi Kronologi Target**

Target pada IKK Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025 menggunakan dan mengacu target yang digunakan oleh Ditjen Perhubungan Darat pada Draft Renstra Ditjen Perhubungan Darat 2025-2029 yang masih dalam proses finalisasi dikarenakan masih menunggu Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sehingga perubahan Sasaran Kegiatan maupun Indikator Kinerja Kegiatan masih dilakukan penyempurnaan.

- **Narasi Faktor Keberhasilan**

Dari beberapa faktor kendala, unit penyelenggara layanan telah melakukan langkah – langkah yang menjadi factor keberhasilan sebagai berikut:

1. Melakukan survey tingkat kepuasan baik kepada pejabat, maupun staf terkait layanan perkantoran;
2. Meningkatkan ketersediaan pc/laptop dengan menyesuaikan jumlah pegawai;
3. Meningkatkan kecepatan internet (unduh) di kantor.
4. Meningkatkan kesadaran antar pegawai untuk merawat fasilitas yang telah diberikan.

- **Narasi Faktor Kegagalan**

Faktor – faktor kendala yang dihadapi dalam mencapai target IKK Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) adalah sebagai berikut:

- Pimpinan kurang terlibat langsung dalam penerapan SAKIP secara konsisten.
- Keterbatasan Kompetensi SDM memahami secara optimal konsep, teknis penyusunan, dan pelaksanaan SAKIP.
- Masih terjadi kesalahan dalam penyusunan dokumen SAKIP seperti perjanjian kinerja dan laporan kinerja.

- **Narasi Realisasi Kinerja**

Realisasi kinerja IKK Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 sebesar 82,76, jika dibandingkan dengan target kinerja Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 82,3. Nilai SAKIP di Tahun 2025 atas Implementasi SAKIP Tahun 2024 pada Tahun 2025 masih dalam proses Penilaian Lembar Kerja Evaluasi AKIP atas Implementasi SAKIP Tahun 2024 di tingkat Kementerian Perhubungan oleh Kemenpan RB.

- **Narasi Capaian Kinerja**

Dengan demikian, capaian kinerja IKK Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dengan pada Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\%\ Capaian = \frac{82{,}76}{82{,}30} x\ 100\% = 100{,}56\%$$

- **Narasi Realisasi Anggaran**

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025 untuk mendukung capaian indikator kinerja kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025 adalah :

Tabel III. 39 Realisasi Anggaran

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW IV	REALISASI TW I		REALISASI TW II		REALISASI TW III		REALISASI TW IV	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
GA Program Infrastruktur Konektivitas										
SK 13 Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal										
IKK 13.1.3.B Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan ini yaitu : 1. Penyusunan SAKIP (LAKIP, LAPTAH, PK, PDDA, RENSTRA) dan Reformasi Birokrasi; 2. Perencanaan dan Evaluasi Bidang Prasarana Transportasi Jalan; 3. Diklat Kompetensi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; 4. Evaluasi Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Rp1.654.987.000,-	Rp5.929.446.000	Rp1.786.084.402	28,39 %	Rp2.742.912.353	43,04 %	Rp3.568.212.313	59.08 %	Rp4.911.905.778	82,84%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

1. Melakukan penyelarasan yang lebih baik antara rencana strategis (Renstra), rencana kerja tahunan (RKT), dan rencana kerja individu, sehingga tercipta keterkaitan yang logis antara tujuan, sasaran, indikator, dan program/kegiatan.
2. Memastikan pimpinan di semua level berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kinerja, serta menjadi teladan dalam penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas.
3. Peningkatan kapasitas SDM dalam bidang perencanaan, pelaporan, dan pengendalian kinerja di Lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan.
4. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem informasi kinerja berbasis digital untuk mendukung proses perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja secara efektif dan efisien.
5. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dan sistematis terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, serta menindaklanjuti hasil evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020

Realisasi kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan tahun 2024 sebesar 74 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Revisi II Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024 sebesar 74 maka capaian kinerja mencapai 100,00%. Sedangkan realisasi kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan tahun 2023 sebesar 73,44 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 dalam Revisi II Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023 sebesar 73 maka capaian kinerja mencapai 100,60% sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2022 realisasi kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sebesar 74,19 dengan target 73 maka capaian kinerja mencapai 103,04%. Pada tahun 2021 realisasi kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sebesar 71 dengan target 71 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pada tahun 2020 realisasi kinerja sebesar 70 dengan target 70 maka capaian kinerja mencapai 100%. Sehingga realisasi kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,75 dari tahun 2022, mengalami kenaikan sebesar 2,44 dari tahun 2021 serta kenaikan sebesar 3,44 dari tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini:

Tabel III. 40 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020

SK.1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel						
No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik/Turun
1	2020	IKK 1	70	70	100%	Tetap
2	2021	IKK 1	71	71	100%	Tetap
3	2022	IKK 1	72	74,19	103,04%	Naik

4	2023	IKK 1	73	73,44	100,60%	Tetap
5	2024	IKK 1	74	74	100,00%	Tetap

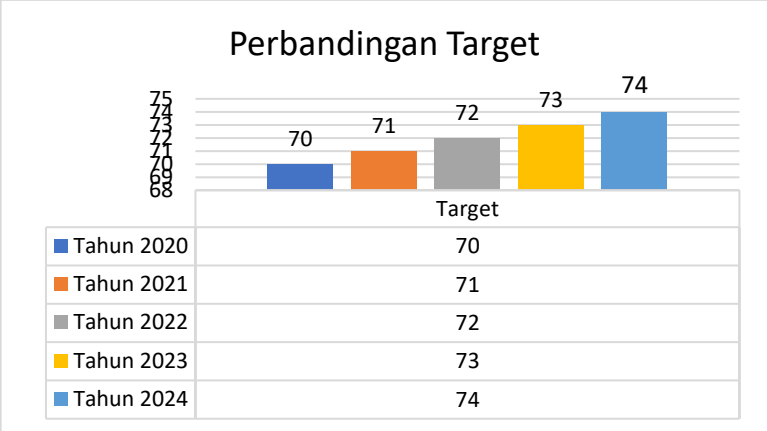

Gambar III.41 Perbandingan Target Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, 2022, 2021, 2020

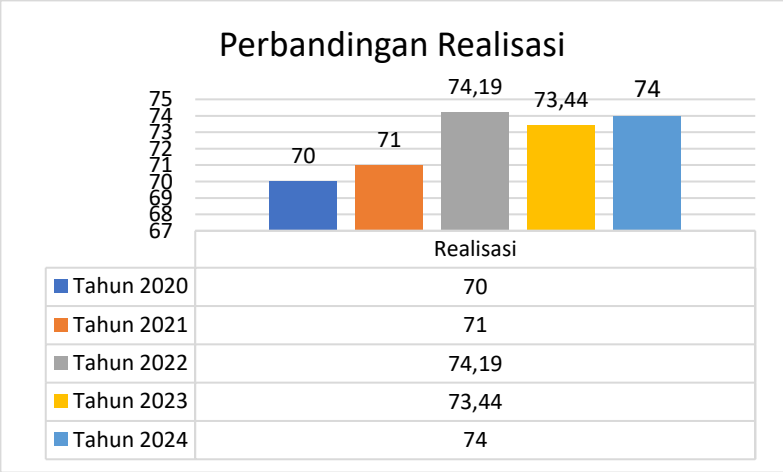

Gambar III.42 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2023, 2022, 2021, 2020

Gambar III.43 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2023, 2022, 2021, 2020

Capaian Kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan tahun 2024 merupakan komitmen terhadap Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan tahun 2024. Sehingga realisasi Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan tahun 2024 adalah 74 dengan capaian kinerja sebesar 100,00%. Sedangkan realisasi Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan tahun 2023 adalah 73,44 dengan capaian kinerja sebesar 100,60% atau capaian kinerjanya turun apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 dan capaian kinerja naik jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2020.

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020 – 2024

Realisasi Kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan tahun 2024 sebesar 74 jika dibandingkan dengan target dalam Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2024 sebesar 74 maka capaian kinerja mencapai 100,00%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.44**.

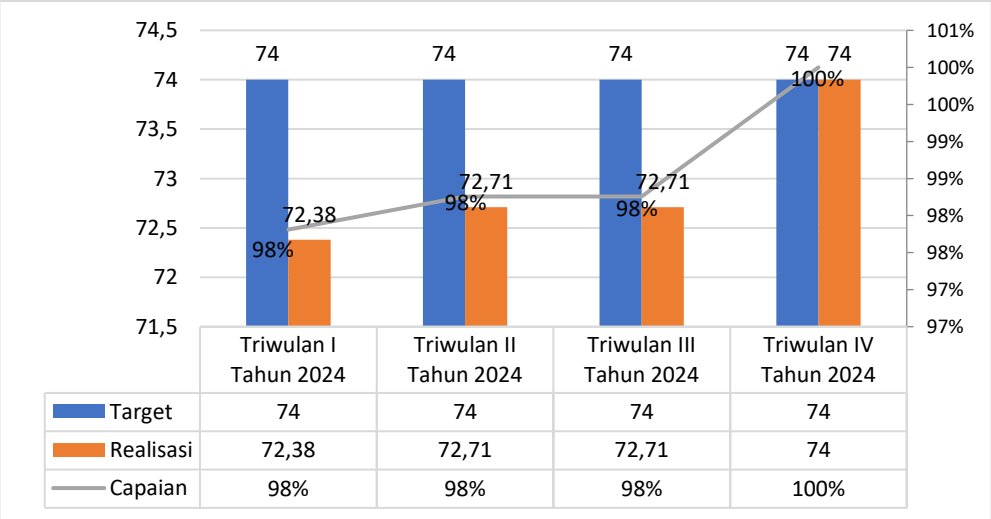

Gambar III.44 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020 - 2024 (IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan tahun 2024)

III.2.5.2 IKK 13.1.3.C Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran

- **Uraian Kegiatan**

  Pencapaian Sasaran Kegiatan 13 diukur melalui 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu:1.IKK 13.1.3 A Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 3. IKK 13.1.3 C Peningkatan Kinerja Pelaksanaan anggaran . 4. IKK 13.1.3 D Indeks Pengelolaan aset dengan Tata Usaha disetiap Direktorat;

Tabel II 28 Sasaran Kegiatan 13 Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal

SASARAN KEGIATAN /	SATU		Q1	Q2	Q3	Q4

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		AN	TARGET				
SK13 Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal							
IKK 13.1.3.C	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai	94,10				
		Target		94,10	94,10	94,10	94,10
		Realisasi		100	98,92	98,48	96,12
		Capaian		106,27%	105,12%	104,65%	102,15%

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 13: Peningkatan Kinerja Pelaksanan Anggaran , dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II 29 Peningkatan Kinerja Pelaksanan Anggaran dengan Tata Usaha di Setiap Direktorat

SK 13	**Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal**				
IKK 13.1.3.C	**Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran**				Satuan : Nilai
Target/Realisasi/Capaian	Q1	Q2	Q3	Q4	Tahun 2025
Target	94,10	94,10	94,10	94,10	
Realisasi	100	98,92	98,48	96,12	
Capaian	106,27%	105,12%	104,65%	102,15%	

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan konektivitas, pelayanan, keamanan dan peningkatan layanan manajemen SDM Internal di sektor Prasarana Transportasi Jalan diperlukan koordinasi yang efektif antar instansi, penyediaan infrastruktur yang memadai, serta pengelolaan sumber daya secara efisien. Untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak yang optimal, diperlukan indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana realisasi penggunaan anggaran telah mencapai tujuan, sasaran, dan efisiensi yang ditetapkan.

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dalam implementasinya membantu mengevaluasi apakah alokasi dana telah digunakan sesuai dengan perencanaan, memberikan manfaat optimal, serta meminimalkan pemborosan atau penyimpangan. Hal ini kemudian dapat digunakan untuk mengidentifikasi hambatan dan perbaikan strategi penganggaran kedepannya. Outcome dari kegiatan ini adalah tercapainya target program dengan penyerapan anggaran yang tepat waktu dan tepat guna, juga pencapaian hasil maksimal dengan memperhatikan efisiensi biaya. Kegiatan ini mendukung transparansi dan

akuntabilitas, serta memastikan bahwa setiap rupiah yang digunakan berkontribusi pada peningkatan sektor Prasarana Transportasi Jalan.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025

Realisasi kinerja IKK Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 sebesar 98,48 jika dibandingkan dengan target kinerja Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 94,10 maka capaian kinerja mencapai **104,65%**. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar II.9**. Peningkatan kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025.

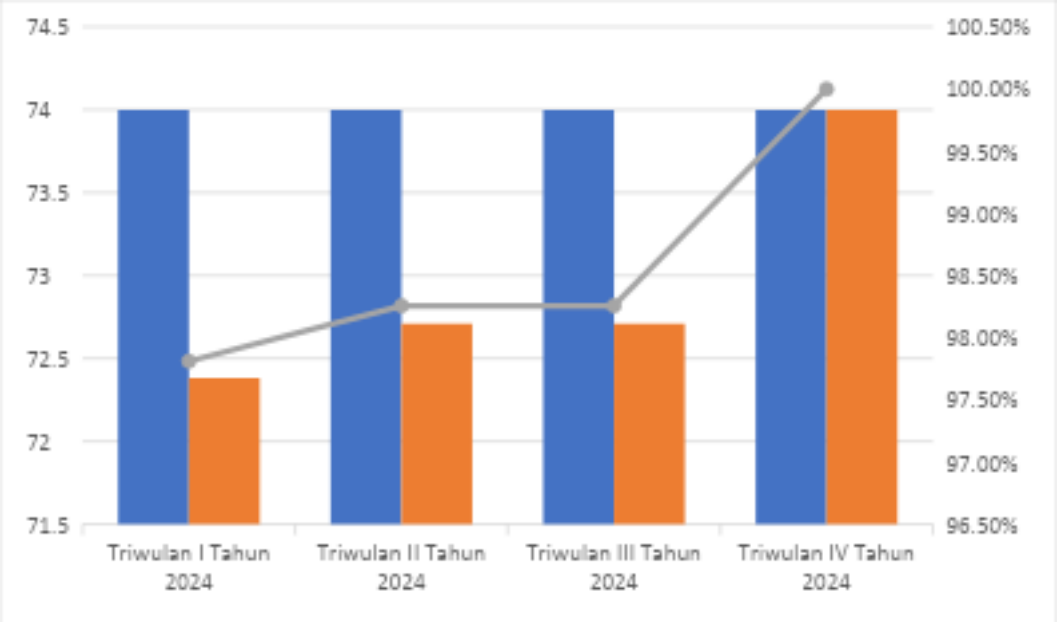

Gambar III.17 Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 13.1.3.B Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Triwulan III Tahun 2025)

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- **Narasi Dasar Hukum**

Dalam melaksanakan IKK Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mengacu pada aturan/dasar hukum yang telah ditetapkan, antara lain:

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2020 tentang Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Negara;
g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 261/PMK.01/2021 tentang Standar Biaya Masukan (SBM);

h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.02/2021 tentang Indikator Kinerja dalam Penyusunan RKA-K/L;
i. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.

- **Narasi Kronologi Target**

Penyusunan Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025-2029 masih dalam proses finalisasi dikarenakan masih menunggu Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sehingga perubahan Sasaran Kegiatan maupun Indikator Kinerja Kegiatan masih dilakukan penyempurnaan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan melakukan Revisi Perjanjian Kinerja akibat adanya penyempurnaan Renstra yang masih disusun. Revisi ini dilakukan untuk memastikan bahwa perjanjian kinerja tetap relevan, realistis, dan sesuai dengan kondisi atau kebijakan terbaru. Berikut adalah rincian perubahan/Revisi Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 IKK Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

- **Narasi Faktor Keberhasilan**

Faktor – faktor keberhasilan dalam mencapai target IKK Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai berikut:

- Terlaksananya kesesuaian realisasi anggaran dengan target yang ditetapkan.
- Penyelesaian tagihan tepat waktu.
- Pertanggungjawaban UP/TUP tepat waktu.

- **Narasi Faktor Kegagalan**

Faktor – faktor kendala yang dihadapi dalam mencapai target IKK Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai berikut:

- Adanya Blokir Anggaran (*Automatic Adjustment*).
- Perubahan Kebijakan Pimpinan.
- Ketidaksesuaian realisasi dengan target yang ditetapkan.
- Penyelesaian tagihan tidak tepat waktu.
- Meningkatnya dispensasi SPM.

- **Narasi Realisasi Kinerja**

Realisasi kinerja IKK Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 sebesar 98,48 jika dibandingkan dengan target kinerja Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 94,10. Realisasi kinerja diperoleh melalui data dari monevpa :

FILTER: SAMPAI DENGAN | JUNI

CARI DI HALAMAN...

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	133	022	352597	DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN	Nilai	100.00	92.77	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.92	100%	0.00	98.92
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.92	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.39		100.00				100.00				

FILTER: SAMPAI DENGAN | JUNI

CARI DI HALAMAN...

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGELOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	133	022	352597	DIREKTORAT PRASARANA TRANSPORTASI JALAN	Nilai	100.00	92.77	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	98.92	100%	0.00	98.92
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.92	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	96.39		100.00				100.00				

- **Narasi Capaian Kinerja**

Dengan demikian, capaian kinerja IKK Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dengan Triwulan III Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{98{,}48}{94{,}10} x\ 100\% \ = \ 104{,}65\%$$

- **Narasi Realisasi Anggaran**

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025 untuk mendukung capaian indikator kinerja kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025 adalah :

Tabel III. 39 Realisasi Anggaran

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW IV	REALISASI TW I		REALISASI TW II		REALISASI TW III		REALISASI TW IV	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
WA. Program Dukungan Manajemen										
SK 13. Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal										
IKK 13.1.3.C. Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan ini yaitu : 1. Inhouse Consultant Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; 2.Pembahasan Terpadu Penyusunan RKAKL Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2024; 3. Operasional Pemeliharaan Kantor; 4. Pendampingan Kunjungan Kerja DPR RI, Presiden RI, serta Instansi Terkait;	Rp1.309.974.000,-	Rp5.929.446.000	Rp1.786.084.402	28,39%	Rp2.742.912.353	43,04%	Rp3.568.212.313	59.08%	Rp4.911.905.778	82,84%

5 Koordinasi Kelembagaan Dalam Negeri; 6. Bimbingan Teknis Perencanaan Integrasi Moda pada Simpul Transportasi; 7. Sosialisasi Penyediaan Fasilitas Pendukung Integrasi Moda; 8. Konsolidasi dan Koordinasi Teknis Perencanaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 9. Survei Identifikasi Potensi Fasilitas Perpindahan Moda dalam Rangka Integrasi Pelayanan Antarmoda dan Intermoda; 10. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda; 11. Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Integrasi pada Simpul Transportasi; 12. Bimbingan Teknis Perencanaan Fasilitas Pendukung Wilayah Perkotaan; 13. Survei Identifikasi Potensi Kebutuhan Halte, Fasilitas Pejalan Kaki, Fasilitas Difabel dalam Rangka Dukungan Angkutan Massal Perkotaan; 14. Monitoring Dukungan Angkutan Lebaran, Natal dan										

Tahun Baru Terminal Tipe A, UPPKB, dan Rest Area; 15. Penyediaan Fasilitas Rest Area Pada Masa Angkutan Lebaran Tahun 2025, Angkutan Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 16. Dukungan Kegiatan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru; 17. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Sarana dan Prasarana (Subdit Kepengusahaan dan Jaringan) (2 Paket-RIJLLAJ) : - Mekanisme Tata Cara Penyusunan RIJLLAJ; - Ketentuan dan Mekanisme Pemberian Pertimbangan RIJLLAJ 18. Evaluasi dan Peningkatan Kinerja Prasarana Transportasi Jalan;										

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Menyusun Prognosa/Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan lebih baik dan realistis.
2. Memastikan tagihan dan pendaftaran kontrak tepat waktu.
3. Melakukan Evaluasi terhadap Kegiatan-kegiatan yang menghambat capaian kinerja.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020

Realisasi kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan tahun 2024 sebesar 74 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Revisi II Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024 sebesar 74 maka capaian kinerja mencapai 100,00%. Sedangkan realisasi kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan tahun 2023 sebesar 73,44 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 dalam Revisi II Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023 sebesar 73 maka capaian kinerja mencapai 100,60% sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2022 realisasi kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sebesar 74,19 dengan target 73 maka capaian kinerja mencapai 103,04%. Pada tahun 2021 realisasi kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sebesar 71 dengan target 71 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pada tahun 2020 realisasi kinerja sebesar 70 dengan target 70 maka capaian kinerja mencapai 100%. Sehingga realisasi kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,75 dari tahun 2022, mengalami kenaikan sebesar 2,44 dari tahun 2021 serta kenaikan sebesar 3,44 dari tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini:

Tabel III. 40 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020

SK.1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel						
No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik/Turun
1	2020	IKK 1	70	70	100%	Tetap
2	2021	IKK 1	71	71	100%	Tetap
3	2022	IKK 1	72	74,19	103,04%	Naik
4	2023	IKK 1	73	73,44	100,60%	Tetap
5	2024	IKK 1	74	74	100,00%	Tetap

Gambar III.41 Perbandingan Target Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, 2022, 2021, 2020

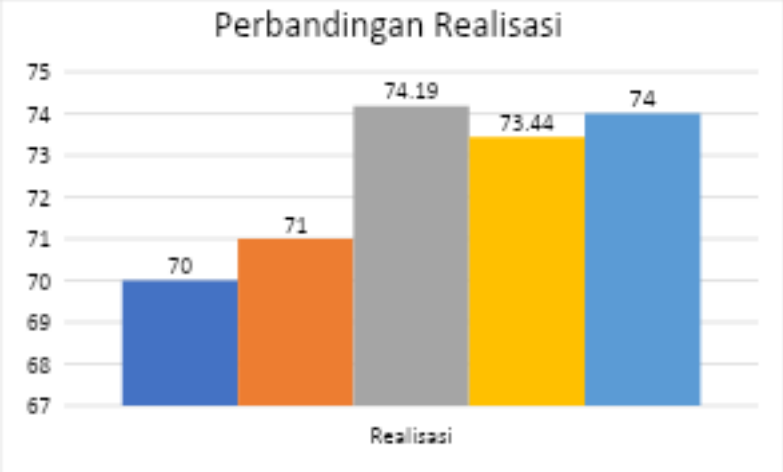

Gambar III.42 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2023, 2022, 2021, 2020

Gambar III.43 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2023, 2022, 2021, 2020

Capaian Kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan tahun 2024 merupakan komitmen terhadap Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan tahun 2024. Sehingga realisasi Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan tahun 2024 adalah 74 dengan capaian kinerja sebesar 100,00%. Sedangkan realisasi Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan tahun 2023 adalah 73,44 dengan capaian kinerja sebesar 100,60% atau capaian kinerjanya turun apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 dan capaian kinerja naik jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2020.

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020 – 2024

Realisasi Kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan tahun 2024 sebesar 74 jika dibandingkan dengan target dalam Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2024 sebesar 74 maka capaian kinerja mencapai 100,00%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.44**.

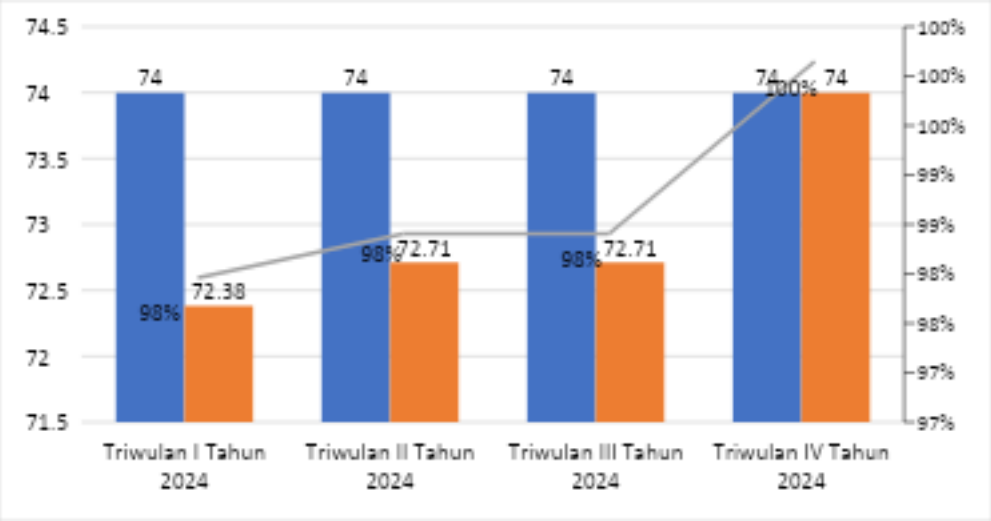

Gambar III.44 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020 - 2024 (IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan tahun 2024)

III.2.5.2 IKK 13.1.3.D Indeks Pengelolaan Aset

- **Uraian Kegiatan**

  Keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan 13 Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada IKK Indeks Pengelolaan Aset ,dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

  Tabel III. 36 Capaian Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

SK 9	Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal				
IKK 13.1.3.D	Indeks Pengelolaan Aset				Satuan: %
Target/Realisasi/Capaian	Q1	Q2	Q3	Q4	Tahun 2025
Target	3,20	3,20	3,20	3,20	
Realisasi	0,00	0,00	3,56	3,56	
Capaian	0,00%	0,00%	111,25%	111,25%	

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

1. Pengelolaan aset merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang baik, transparan, dan akuntabel. Aset, baik berupa tanah, bangunan, kendaraan, peralatan maupun sarana pendukung lainnya, merupakan sumber daya strategis yang dimiliki oleh organisasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan aset yang tertib, efektif, dan efisien menjadi keharusan untuk memastikan bahwa aset dimanfaatkan secara optimal sesuai peruntukannya serta terjaga nilai dan keberlanjutannya.

Pengelolaan aset dilaksanakan sebagai bagian integral dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan akuntabel. Pengelolaan tersebut mencakup seluruh siklus pengelolaan aset, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penatausahaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, hingga penghapusan atau pemindahtanganan aset. Seluruh proses pengelolaan dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini penting untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan, kehilangan, atau penurunan nilai aset akibat pengelolaan yang tidak tepat.

Selain sebagai upaya memenuhi kewajiban administratif, pengelolaan aset yang tertib juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja organisasi. Aset yang dikelola dengan baik dapat memberikan manfaat ekonomi maupun sosial yang lebih besar, mendukung efektivitas pelayanan, dan menghemat anggaran melalui perawatan yang tepat serta pemanfaatan yang optimal. Melalui penguatan pengelolaan aset, diharapkan mampu menciptakan lingkungan kerja yang lebih tertata, efisien, dan mendukung tercapainya visi dan misi. Oleh karena itu, komitmen seluruh pihak yang terlibat sangat diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan aset yang profesional, transparan, dan berkelanjutan.

Capaian kinerja IKK Indikator Pengelola Aset dihitung berdasarkan Tindak Lanjut Temuan pada LHP BPK atas LKPP terkait BMN (15%) + Realisasi PNBP di Bidang Pengelolaan Aset (10%) + Ketepatan Waktu dan Kelengkapan Dokumen dalam Penyampaian Laporan dan usulan RKBMN (10%) + Asuransi BMN (10%) + Tindak lanjut Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN (15%) + Tindak Lanjut BMN Rusak Berat (10%) + BMN memiliki dokumen kepemilikan (15%) + Penggunaan BMN Sesuai Ketentuan (15%).

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025

Realisasi kinerja IKK Indeks Pengelolaan Aset sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 sebesar 3,56 jika dibandingkan dengan target kinerja Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 3,20 maka capaian kinerja mencapai **111,25%.** Pencapaian ini digambarkan pada grafik capaian kinerja berikut:

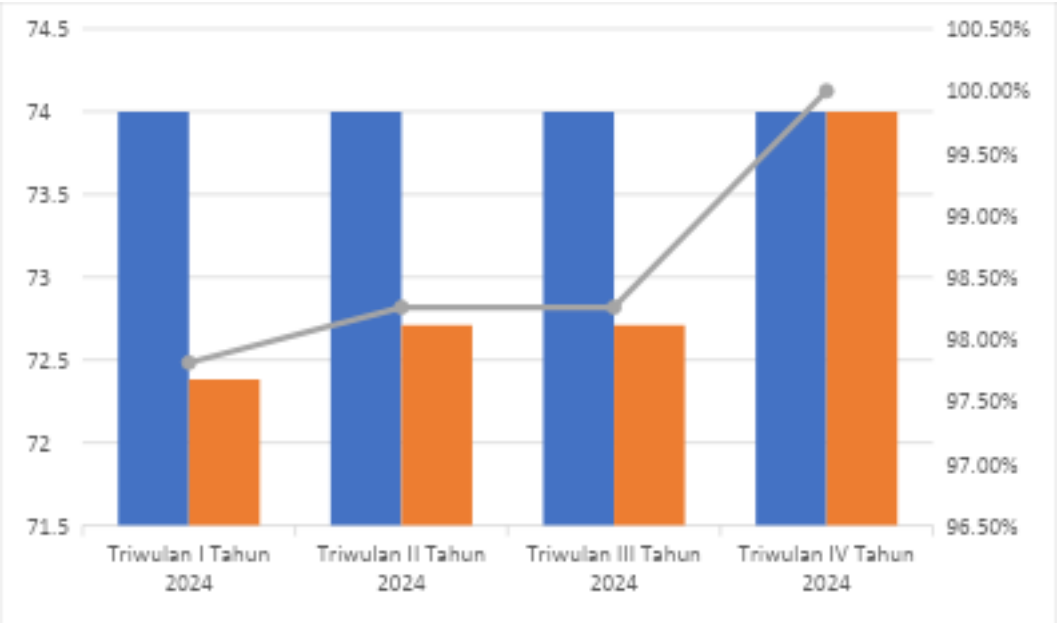

Gambar III.17 Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 13.1.3 D Indeks Pengelolaan Aset pada Triwulan IV Tahun 2025.

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- **Narasi Dasar Hukum**

Dalam melaksanakan IKK Indeks Pengelolaan Aset, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mengacu pada aturan/dasar hukum yang telah ditetapkan, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Kantor/Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 59 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

- **Narasi Kronologi Target**

Penyusunan Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025-2029 masih dalam proses finalisasi dikarenakan masih menunggu Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sehingga perubahan Sasaran Kegiatan maupun Indikator Kinerja Kegiatan masih dilakukan penyempurnaan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan melakukan Revisi Perjanjian Kinerja akibat adanya penyempurnaan Renstra yang masih disusun. Revisi ini dilakukan untuk memastikan bahwa perjanjian kinerja tetap relevan, realistis, dan sesuai dengan kondisi atau kebijakan terbaru.

- **Narasi Faktor Keberhasilan**

Faktor – faktor keberhasilan dalam mencapai target IKK Indeks Pengelolaan Aset adalah sebagai berikut:

6. Penyampaian LPB, Wasdal dan RKBMN Tepat Waktu.
7. Seluruh BMN telah ditetapkan status penggunanya.
8. Telah ditindaklanjuti atas BMN yang rusak berat maupun yang telah terbit Berita Acara Pemindahtanganannya.

- **Narasi Faktor Kegagalan**

Faktor – faktor kendala yang dihadapi dalam mencapai target IKK Indeks Pengelolaan Aset adalah sebagai berikut:

1. Terlambatnya penyampaian LPB, Wasdal dan RKBMN.
2. BMN belum ditetapkan status penggunanya.
3. Tidak dilakukan tindaklanjut atas BMN yang rusak berat.

- **Narasi Realisasi Kinerja**

Realisasi kinerja IKK Indeks Pengelolaan Aset sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 sebesar 0 jika dibandingkan dengan target kinerja Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 3,20. Realisasi kinerja diperoleh melalui data dan perhitungan berikut:

Sehingga :

- Tindak lanjut temuan pada LHP BPK atas LKPP terkait BMN telah dilaksanakan tetapi belum 100%.
- Penyampaian Laporan Wasdal dan LBP tepat waktu.
- Penetapan Status Penggunaan (PSP) terhadap asset Direktorat Prasarana Transportasi Jalan telah mencapai 100%.
- Perhitungan Realisai IKK Indeks Pengelolaan Aset sampai dengan Triwulan III Tahun 2025

Indeks Pengelolaan aset =

$Tindak\ Lanjut\ Temuan\ pada\ LHP\ BPK\ \ atas\ LKPP\ terkait\ BMN$ (15%)+ $Realisasi\ PNBP\ di\ Bidang\ Pengelolaan\ Aset$ (10%) + $Ketepatan\ Waktu\ dan\ Kelengkapan\ Dokumen\ dalam\ Penyampaian\ Laporan$ + $Asuransi\ BMN$ (10%) + $Tindak\ lanjut\ Pemanfaatan, Pemindahtanganan\ dan\ Penghapusan\ BMN$+ $Tindak\ Lanjut\ BMN\ Rusak\ Berat$ (10%) + $BMN\ memiliki\ dokumen\ kepemilikan$ (15%)

- **Narasi Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Pengelolaan aset dengan Triwulan III Tahun 2025 terhadap target Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

$$\%\ \text{Capaian} = \frac{3{,}56}{3{,}20}\ x\ 100\% \ = \ 111{,}25\%$$

- **Narasi Realisasi Anggaran**

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025 untuk mendukung capaian indikator kinerja kegiatan Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025 adalah :

Tabel III. 39 Realisasi Anggaran

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW IV	REALISASI TW I		REALISASI TW II		REALISASI TW III		REALISASI TW IV	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
GA Program Infrastruktur Konektivitas										
SK 13 Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal										
IKK 13.1.3.D Indeks Pengelolaan Aset Kegiatan yang mendukung tercapainya Indikator Kinerja Kegiatan ini yaitu : 1. Monitoring dan Evaluasi Aset Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan; 2. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Barang Milik Negara (BMN) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;	Rp215.000.000	Rp5.929.446.000	Rp1.786.084.402	28,39 %	Rp2.742.912.353	43,04 %	Rp3.568.212.313	59.08 %	Rp4.911.905.778	82,84%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

- Menguatkan komitmen dari pimpinan serta seluruh jajaran unit kerja dalam melaksanakan pengelolaan asset.
- Melakukan pelatihan untuk meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) terkait tata cara pengelolaan BMN yang baik dan benar.
- Pemanfaatan teknologi Informasi untuk meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan transparansi data aset.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020

Realisasi kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan tahun 2024 sebesar 74 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Revisi II Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024 sebesar 74 maka capaian kinerja mencapai 100,00%. Sedangkan realisasi kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan tahun 2023 sebesar 73,44 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 dalam Revisi II Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023 sebesar 73 maka capaian kinerja mencapai 100,60% sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2022 realisasi kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sebesar 74,19 dengan target 73 maka capaian kinerja mencapai 103,04%. Pada tahun 2021 realisasi kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sebesar 71 dengan target 71 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pada tahun 2020 realisasi kinerja sebesar 70 dengan target 70 maka capaian kinerja mencapai 100%. Sehingga realisasi kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,75 dari tahun 2022, mengalami kenaikan sebesar 2,44 dari tahun 2021 serta kenaikan sebesar 3,44 dari tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini:

Tabel III. 40 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020

SK.1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel						
No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik/Turun
1	2020	IKK 1	70	70	100%	Tetap
2	2021	IKK 1	71	71	100%	Tetap
3	2022	IKK 1	72	74,19	103,04%	Naik
4	2023	IKK 1	73	73,44	100,60%	Tetap
5	2024	IKK 1	74	74	100,00%	Tetap

Gambar III.41 Perbandingan Target Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, 2022, 2021, 2020

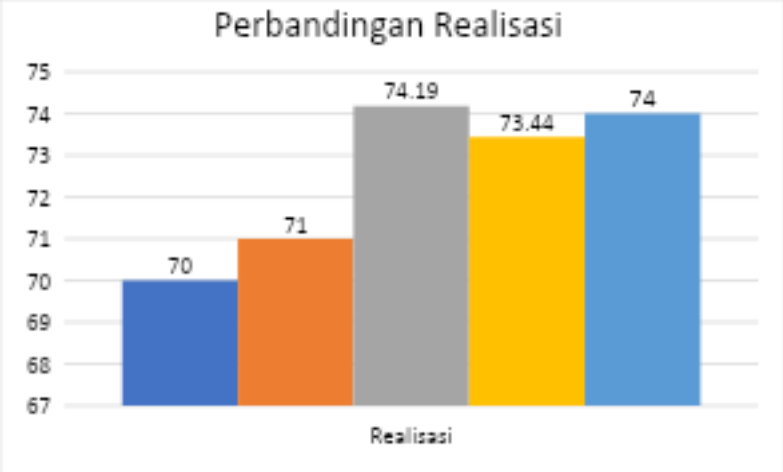

Gambar III.42 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2023, 2022, 2021, 2020

Gambar III.43 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2023, 2022, 2021, 2020

Capaian Kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan tahun 2024 merupakan komitmen terhadap Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan tahun 2024. Sehingga realisasi Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan tahun 2024 adalah 74 dengan capaian kinerja sebesar 100,00%. Sedangkan realisasi Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan tahun 2023 adalah 73,44 dengan capaian kinerja sebesar 100,60% atau capaian kinerjanya turun apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 dan capaian kinerja naik jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2020.

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020 – 2024

Realisasi Kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan tahun 2024 sebesar 74 jika dibandingkan dengan target dalam Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2024 sebesar 74 maka capaian kinerja mencapai 100,00%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.44**.

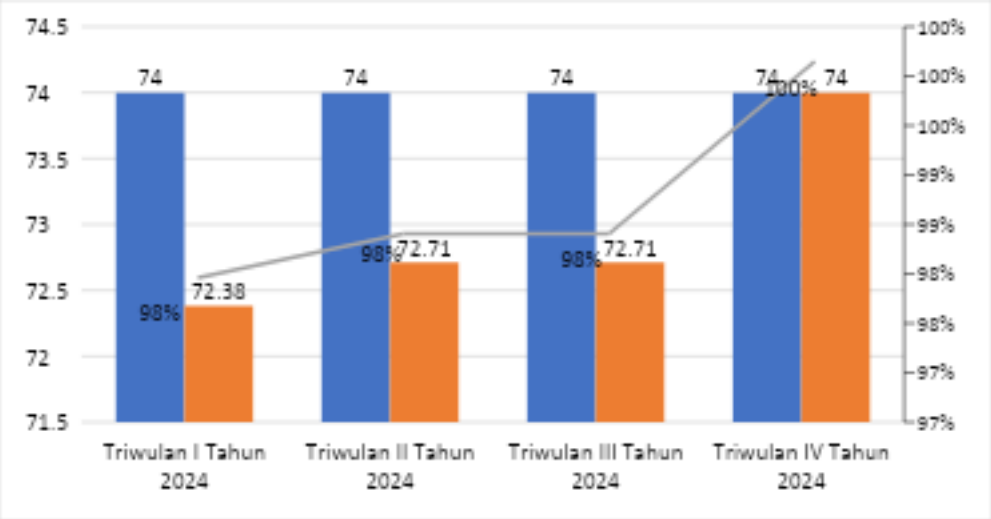

Gambar III.44 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020 - 2024 (IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan tahun 2024)

II.2.6 SK 14 Meningkatnya Layanan Perkantoran

II.2.6.1 IKK 14.1.3 Tingkat Digitalisasi Arsip

- **Uraian Kegiatan**

Pencapaian SK14 Meningkatnya Layanan Perkantoran diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu : IKK 14.1.3 Tingkat Digitalisasi Arsip

Tabel II 33 Sasaran Kegiatan 14 Meningkatnya Layanan Perkantoran

SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	Q1	Q2	Q3	Q4
SK14 Meningkatnya Layanan Perkantoran							
IKK 14.1.	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai	85,51				
		Target		85,51	85,51	85,51	79,11

3		Realisasi	0	0	34,50	79,11
		Capaian	0,00%	0,00%	40,35%	100%

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Pencapaian SK14 Meningkatnya Layanan Perkantoran diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu : IKK 14.1.3 Tingkat Digitalisasi Arsip

II.2.6 IKK 14.1.3 Tingkat Digitalisasi Arsip

Keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Layanan Manajemen SDM Internal, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada IKK Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 36 Capaian Tingkat Digitalisasi Arsip

SK 13	**Meningkatnya Layanan Perkantoran**					
IKK 14.1.3	**Tingkat Digitalisasi Arsip**					Satuan: Nilai
Target/Realisasi/Capaian		Q1	Q2	Q3	Q4	Tahun 2025
Target		85,51	85,51	85,51	79,11	
Realisasi		0	0	34,50	79,11	
Capaian		0,00%	0,00%	40,35%	100%	

Sumber: Data diolah oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

a.1. Definisi Indikator Kinerja Kegiatan

1. Definisi kinerja digitalisasi arsip adalah parameter yang digunakan untuk menilai sejauh mana proses digitalisasi arsip telah dilaksanakan sesuai target dan standar yang telah ditetapkan. Indikator kinerja ini digunakan sebagai alat evaluasi terhadap pencapaian program digitalisasi arsip, baik dalam hal kualitas, kuantitas, maupun dampak terhadap pengelolaan arsip secara keseluruhan. Digitalisasi arsip di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan menggunakan sistem Integrasi kearsipan (SRIKANDI).

Capaian kinerja IKK Tingkat Digitalisasi Arsip dihitung berdasarkan Jumlah naskah masuk + jumlah naskah keluar yang telah diberkaskan terhadap Total jumlah naskah masuk + naskah keluar tahun berjalan.

a.2. Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Revisi II Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025

Realisasi kinerja IKK Tingkat Digitalisasi Arsip sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 sebesar 34,50 jika dibandingkan dengan target kinerja Revisi I Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 85,51, maka capaian kinerja mencapai 40,35%. Pencapaian ini digambarkan pada grafik capaian kinerja berikut:

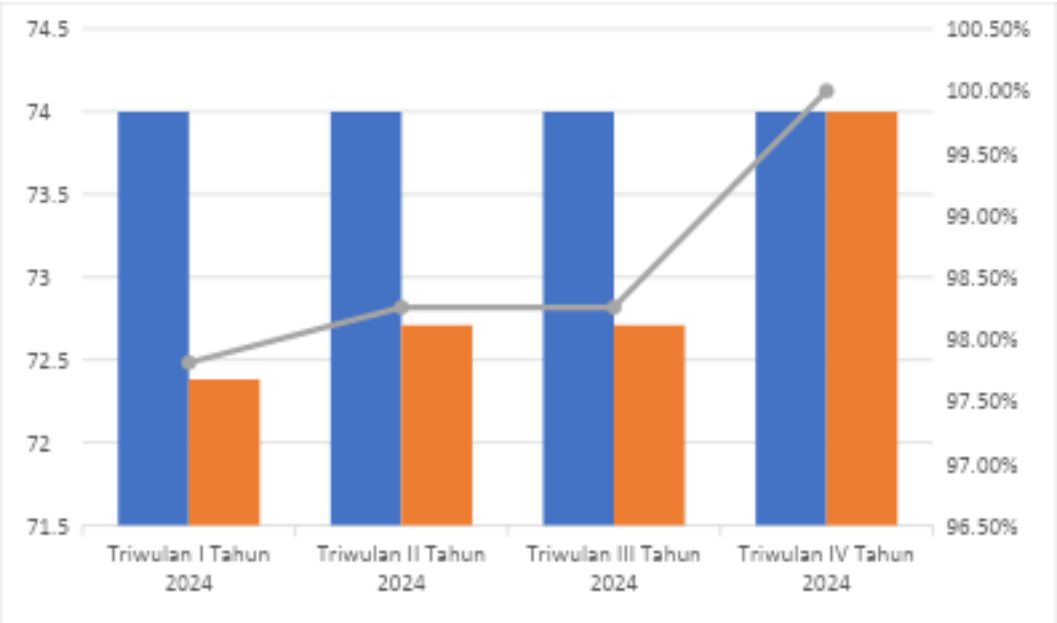

Gambar III.17 Grafik Perbandingan Realisasi dan Target Kinerja Pada Perjanjian Kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan (IKK 13.1.3.B Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Triwulan III Tahun 2025)

a.3. Analisa Keberhasilan/Kegagalan

- **Narasi Dasar Hukum**

  Dalam melaksanakan IKK Tingkat Digitalisasi Arsip, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan mengacu pada aturan/dasar hukum yang telah ditetapkan, antara lain:
  - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan di Indonesia;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 adalah peraturan tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
  - Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 mengatur tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia;
  - Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi.

- **Narasi Kronologi Target**

  Penyusunan Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025-2029 masih dalam proses finalisasi dikarenakan masih menunggu Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Direktorat Jenderal Perhubungan Darat sehingga perubahan Sasaran Kegiatan maupun Indikator Kinerja Kegiatan masih dilakukan penyempurnaan.

  Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan melakukan Revisi Perjanjian Kinerja akibat adanya penyempurnaan Renstra yang masih disusun. Revisi ini dilakukan untuk memastikan bahwa perjanjian kinerja tetap relevan, realistis, dan sesuai dengan kondisi atau kebijakan terbaru.

- **Narasi Faktor Keberhasilan**

Dari beberapa faktor kendala, unit penyelenggara layanan telah melakukan langkah – langkah yang menjadi faktor keberhasilan sebagai berikut:

- Telah dilakukan pemilahan dan pengiriman arsip inaktif Direktorat Prasarana Transportasi Jalan ke Gedung Pusat Arsip Kementerian Perhubungan, di Soreang, Bandung pada Tahun 2025;
- Seluruh pegawai Direktorat Prasarana Transportasi Jalan telah menggunakan aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) yang merupakan aplikasi berbasis digital yang dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai upaya modernisasi dan digitalisasi pengelolaan arsip di lingkungan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Aplikasi ini dikembangkan dengan tujuan utama untuk mengintegrasikan sistem kearsipan dinamis antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga tercipta tata kelola arsip yang lebih efisien, transparan, aman, dan akuntabel.
- Terdapat beberapa faktor keberhasilan dalam penatausahaan dan pengelolaan aset BMN, meliputi :
    - Telah dilakukan penghapusan BMN berupa Aset Tak Berwujud yang sudah tidak digunakan/tidak relevan sesuai dengan Berita Acara Kemanfaatan;
    - Telah dilakukan penghapusan BMN melakui skema penjualan berupa Kendaraan Dinas Operasional yang memiliki kondisi rusak berat;
    - Penetapan Status Penggunaan BMN telah mencapai 100% pada triwulan 3 tahun 2024;

- **Narasi Faktor Kegagalan**

Berikut ini adalah faktor yang dapat menjadi potensi kegagalan tercapainya IKK Tingkat Digitalisasi Arsip di setiap Direktorat Tahun 2025:

1. Kecepatan fasilitas unduh internet masih dibawah standar kecepatan internet dalam memaksimalkan kinerja layanan perkantoran;
2. Terhambatnya Pengguna Barang dalam melakukan penatausahaan yang disebabkan oleh hilangnya sejarah atau *history* aset tercatat untuk aset di bawah tahun 2017;
3. Adanya peralihan dari manual ke digitalisasi arsip sehingga membutuhkan penyesuaian dalam mengimplementasikan digitalisasi arsip di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;
4. Pegawai belum tertib dalam pengelolaan arsip dan belum memahami pentingnya alih media arsip ke digital.
5. Kurangnya pelatihan terkait tata cara alih media, metadata, dan sistem pengelolaan arsip elektronik.
6. Koneksi internet lambat menyebabkan akses untuk membuka aplikasi SRIKANDI menjadi lama/error.

- **Narasi Realisasi Kinerja**

Berdasarkan IKK Tingkat Digitalisasi Arsip Tahun 2025, diperoleh realisasi sebesar 0 sehingga capaian kinerja pada Triwulan III Tahun 2025 masih belum sesuai dengan target PK Tahun 2025.

Sehingga :

$$\frac{\textbf{Jumlah naskah masuk + jumlah naskah keluar yang telah diberkaskan}}{\textbf{Total jumlah naskah masuk + naskah keluar tahun berjalan}}$$

- **Narasi Capaian Kinerja**

Dengan demikian, keberhasilan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Tingkat Digitalisasi Arsip Tahun 2025 terhadap target Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu sebesar:

% Capaian = $\frac{34,50}{85,51} x\, 100\% \;=\; 40,35\%$

- **Narasi Realisasi Anggaran**

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2025 untuk mendukung capaian indikator kinerja kegiatan Tingkat Digitalisasi Arsip Tahun 2025 adalah :

Tabel III. 39 Realisasi Anggaran

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	PAGU AWAL	PAGU TW IV	REALISASI TW I		REALISASI TW II		REALISASI TW III		REALISASI TW IV	
			KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)	KEUANGAN (RP)	PAGU (%)
WA. Program Dukungan Manajemen										
SK 14 Meningkatnya Layanan Perkantoran										
IKK 14.1.3 Tingkat Digitalisasi Arsip Dengan rincian kegiatan pendukung sebagai berikut : 1. Penyusutan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Prasarana Transportasi Jalan; 2. Penyusutan dan Pengiriman Arsip; 3. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Informasi (Belanja Modal); 4. Dukungan Kegiatan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Rp 1.309.974.000,-	Rp 5.929.446.000	Rp1.786.084.402	28,39 %	Rp2.742.912.353	43,04 %	Rp3.568.212.313	59.08 %	Rp4.911.905.778	82,84%

a.4. Upaya Untuk Meningkatkan Capaian Dimasa Yang Akan Datang

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian di masa yang akan datang yaitu:

1. Melakukan evaluasi rutin / pemantauan berkala terhadap progres digitalisasi (jumlah arsip terdigitalisasi, kualitas file, aksesibilitas).
2. Mengedukasi seluruh pegawai tentang pentingnya digitalisasi dan keteraturan arsip.
3. Mengoptimalkan peran arsiparis dalam proses pendigitalan dan pengawasan mutu arsip.

a.5. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020

Realisasi kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan tahun 2024 sebesar 74 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2024 dalam Revisi II Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024 sebesar 74 maka capaian kinerja mencapai 100,00%. Sedangkan realisasi kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan tahun 2023 sebesar 73,44 jika dibandingkan dengan target kinerja pada tahun 2023 dalam Revisi II Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2023 sebesar 73 maka capaian kinerja mencapai 100,60% sedangkan pada tahun sebelumnya tahun 2022 realisasi kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sebesar 74,19 dengan target 73 maka capaian kinerja mencapai 103,04%. Pada tahun 2021 realisasi kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sebesar 71 dengan target 71 maka capaian kinerja mencapai 100%. Pada tahun 2020 realisasi kinerja sebesar 70 dengan target 70 maka capaian kinerja mencapai 100%. Sehingga realisasi kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,75 dari tahun 2022, mengalami kenaikan sebesar 2,44 dari tahun 2021 serta kenaikan sebesar 3,44 dari tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan diagram di bawah ini:

Tabel III. 40 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2024, 2023, 2022, 2021 dan 2020

SK.1 Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel						
No	Tahun	IKK	Target	Realisasi	Capaian (%)	Naik/Turun
1	2020	IKK 1	70	70	100%	Tetap
2	2021	IKK 1	71	71	100%	Tetap
3	2022	IKK 1	72	74,19	103,04%	Naik
4	2023	IKK 1	73	73,44	100,60%	Tetap
5	2024	IKK 1	74	74	100,00%	Tetap

Gambar III.41 Perbandingan Target Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2023, 2022, 2021, 2020

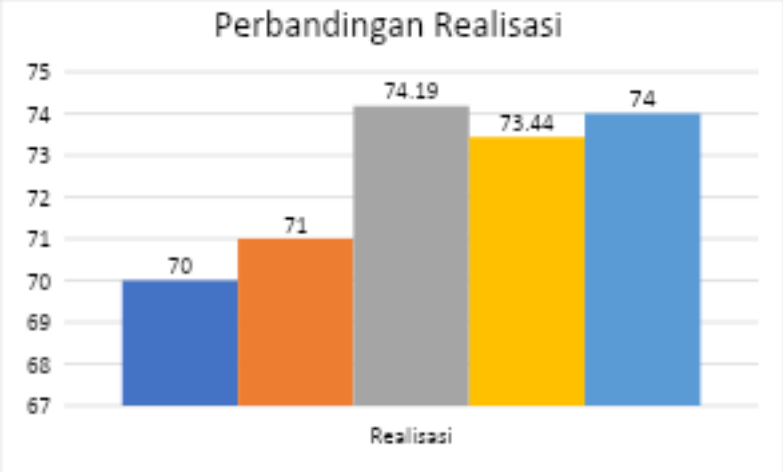

Gambar III.42 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2023, 2022, 2021, 2020

Gambar III.43 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2024 Terhadap Capaian Kinerja Tahun 2023, 2022, 2021, 2020

Capaian Kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan tahun 2024 merupakan komitmen terhadap Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan tahun 2024. Sehingga realisasi Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan tahun 2024 adalah 74 dengan capaian kinerja sebesar 100,00%. Sedangkan realisasi Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan tahun 2023 adalah 73,44 dengan capaian kinerja sebesar 100,60% atau capaian kinerjanya turun apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 dan capaian kinerja naik jika dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2020.

a.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Target Kinerja Tahun 2024 Pada Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020 – 2024

Realisasi Kinerja Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan tahun 2024 sebesar 74 jika dibandingkan dengan target dalam Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2024 sebesar 74 maka capaian kinerja mencapai 100,00%. Pencapaian ini digambarkan pada **Gambar III.44**.

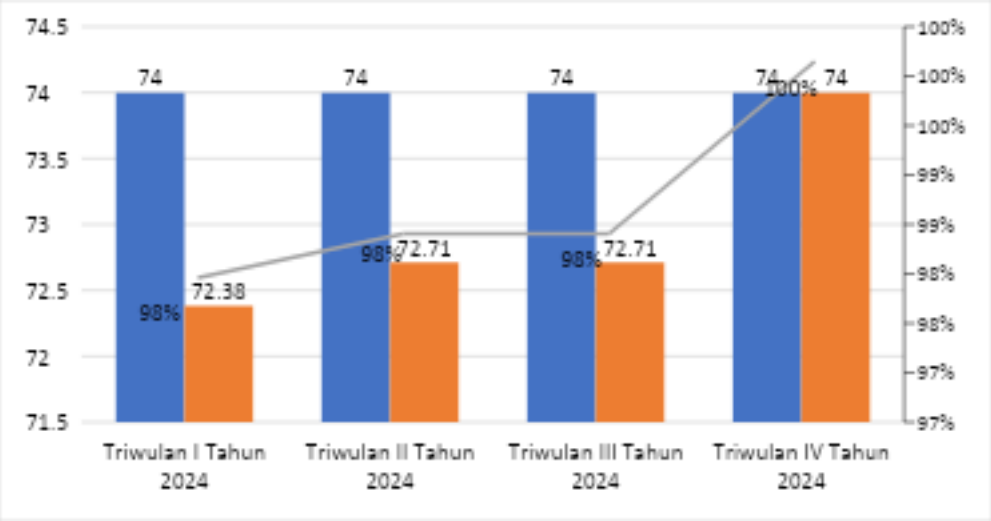

Gambar III.44 Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Target Kinerja Tahun 2024 pada Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2020 - 2024 (IKK 1 Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan tahun 2024)

III.3. Realisasi Anggaran

III.3.1. Alokasi Anggaran Tahun 2024

III.3.1.1. Pagu Anggaran

a.1. Rincian Per Sumber Dana Tahun 2024

1) Pagu Awal DIPA TA. 2024 sebesar **Rp 99.957.401.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III. 41 Rincian per Sumber Dana Pagu Awal Tahun 2024

RM	Rp.	99.957.401.000	100,00%
PNBP	Rp.	0	0,00%
SBSN	Rp.	-	0,00%
Total	**Rp.**	**99.957.401.000**	**100%**

Total Pagu akhir DIPA Direktorat Prasarana Transportasi Jalan per Sumber Dana pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar **Rp98.883.755.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III. 42 Rincian per Sumber Dana Pagu Triwulan IV TA. 2024

RM	Rp.	98.803.755.000	100,00%
PNBP	Rp.	0	0,00%
SBSN	Rp.	0	0,00%
Total	**Rp.**	**98.803.755.000**	**100,00%**

Sumber: Data diolah dari Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Rincian Per Jenis Belanja Tahun 2024

Pagu Awal DIPA TA. 2024 sebesar **Rp 99.957.401.000,-** dengan rincian per Jenis Belanja Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel III. 43 Rincian per Jenis Belanja Pagu Awal Tahun 2024

Belanja Pegawai	Rp.	-	0,00%
Belanja Barang	Rp.	88.063.401.000	88,10%
Belanja Modal	Rp.	11.894.000.000	11,90%
Total	**Rp.**	**99.957.401.000**	**100%**

Total Pagu akhir DIPA Direktorat Prasarana Transportasi Jalan per Jenis Belanja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) T.A. 2024 adalah sebesar **Rp 98.883.755.000,-** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III. 44 Rincian per Jenis Belanja Pagu Triwulan IV TA. 2024

Belanja Pegawai	Rp.	-	0,00%
Belanja Barang	Rp.	84.951.156.000	85,98%

Belanja Modal	Rp.	13.852.599.000	14,02%
Total	**Rp.**	**98.803.755.000**	**100,00%**

Sumber: Data diolah dari Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Uraian Surat Pengesahan Revisi Anggaran

Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 terdapat revisi anggaran pada Satker Direktorat Prasarana Transportasi Jalan berupa Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran Tetap dengan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KU.002/1/17/SKJ/2024 tanggal 18 Januari 2024 tentang Usulan Revisi Anggaran berupa *Automatic Adjustment* Belanja di Lingkungan Ditjet Perhubungan Darat T.A. 2024.

III.3.1.2. Refocussing/*Automatic Adjustment* Anggaran Tahun 2024

Terdapat kebijakan *Automatic Adjustment* Belanja di Lingkungan Ditjen Perhubungan Darat sesuai surat DJA sebagai berikut:

1. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KU.002/1/17/SKJ/2024 tanggal 18 Januari 2024 tentang Usulan Revisi Anggaran berupa *Automatic Adjustment* Belanja di Lingkungan Ditjet Perhubungan Darat T.A. 2024;
2. Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor KU.002/2/SDPTJ/2024 tanggal 27 Februari 2024 tentang Permintaan Pemutakhiran Data Petunjuk Operasional Kegiatan.
3. Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor KU.002/48/SDPTJ/2024 tanggal 14 Maret 2024 tentang Usulan Revisi Anggaran.

Pada Tahun 2024 terdapat *Automatic Adjustment* yang menyebabkan adanya pengurangan pagu dari semula Rp. 99.957.401.000,00 menjadi Rp. 98.803.755.000,00 dengan total *automatic adjustment* sebesar Rp. 1.153.646.000,00.

Tabel III. 45 Histori Revisi Per Sumber Dana Tahun Anggaran 2024

	SUMBER DANA			JUMLAH
	RM	PNBP	SBSN	
PAGU AWAL	99.957.401.000	-	-	99.957.401.000
REVISI KE-1	99.957.401.000	-	-	99.957.401.000
REVISI KE-2	99.957.401.000	-	-	99.957.401.000
REVISI KE-3	99.957.401.000	-	-	99.957.401.000
REVISI KE-4	99.957.401.000	-	-	99.957.401.000
REVISI KE-5	99.957.401.000	-	-	99.957.401.000
REVISI KE-6	99.957.401.000	-	-	99.957.401.000
REVISI KE-7	99.957.401.000	-	-	99.957.401.000
REVISI KE-8	98.883.755.000	-	-	98.883.755.000
REVISI KE-9	98.883.755.000	-	-	98.883.755.000
REVISI KE-10	98.883.755.000	-	-	98.883.755.000
REVISI KE-11	98.883.755.000	-	-	98.883.755.000
REVISI KE-12	98.883.755.000	-	-	98.883.755.000
REVISI KE-13	98.803.755.000	-	-	98.803.755.000

REVISI KE-14	98.803.755.000	-	-	98.803.755.000

Tabel III. 46 Histori Revisi per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2024

	JENIS BELANJA			JUMLAH
	BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	
PAGU AWAL	-	88.063.401.000	11.894.000.000	99.957.401.000
REVISI KE-1	-	86.798.401.000	13.159.000.000	99.957.401.000
REVISI KE-2	-	86.798.401.000	13.159.000.000	99.957.401.000
REVISI KE-3	-	86.798.401.000	13.159.000.000	99.957.401.000
REVISI KE-4	-	88.548.401.000	11.409.000.000	99.957.401.000
REVISI KE-5	-	88.548.401.000	11.409.000.000	99.957.401.000
REVISI KE-6	-	86.548.401.000	13.409.000.000	99.957.401.000
REVISI KE-7	-	86.548.401.000	13.409.000.000	99.957.401.000
REVISI KE-8	-	85.496.798.000	13.386.957.000	98.883.755.000
REVISI KE-9	-	85.496.798.000	13.386.957.000	98.883.755.000
REVISI KE-10	-	85.515.185.000	13.368.570.000	98.883.755.000
REVISI KE-11	-	85.441.436.000	13.852.599.000	99.294.035.000
REVISI KE-12	-	85.041.436.000	13.842.319.000	98.883.755.000
REVISI KE-13	-	84.961.436.000	13.842.319.000	98.803.755.000
REVISI KE-14	-	84.951.156.000	13.852.599.000	98.803.755.000

Tabel III. 47 Rincian Realokasi Per Sumber Dana dan Per Jenis Belanja Tahun Anggaran 2024

	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN I	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN II	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN III	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN IV
Belanja Pegawai	-	-	-	-	-				
Belanja Barang	**88.063.401.000**	**2.566.603.000**	**85.496.798.000**	**-**	**85.496.798.000**	**- 55.362.000**	**85.441.436.000**	**- 490.280.000**	**84.951.156.000**
Belanja Modal	**11.894.000.000**	**- 1.492.957.000**	**13.386.957.000**	**-**	**13.386.957.000**	**465.642.000**	**13.852.599.000**	**-**	**13.852.599.000**
TOTAL	**99.957.401.000**	**1.073.646.000**	**98.883.755.000**	**-**	**98.883.755.000**	**410.280.000**	**99.294.035.000**	**- 490.280.000**	**98.803.755.000**

	PAGU AWAL	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN I	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN II	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN III	PERUBAHAN	PAGU AKHIR PER TRIWULAN IV
Belanja Pegawai	-	-	-	-	-				
Belanja Barang	**88.548.401.000**	**3.051.603.000**	**85.496.798.000**	**-**	**85.496.798.000**	**- 55.362.000**	**85.441.436.000**	**- 490.280.000**	**84.951.156.000**
· RM	88.548.401.000	- 3.051.603.000	85.496.798.000		85.496.798.000	- 55.362.000	85.441.436.000	- 490.280.000	84.951.156.000
· PNBP									
Belanja Modal	**11.409.000.000**	**- 1.977.957.000**	**13.386.957.000**	**-**	**13.386.957.000**	**465.642.000**	**13.852.599.000**	**-**	**13.852.599.000**
· RM	11.409.000.000	1.977.957.000	13.386.957.000		13.386.957.000	465.642.000	13.852.599.000	-	13.852.599.000
· PNBP									
· SBSN									
TOTAL	**99.957.401.000**	**1.073.646.000**	**98.883.755.000**	**-**	**98.883.755.000**	**410.280.000**	**99.294.035.000**	**- 490.280.000**	**98.803.755.000**

Sumber: Data diolah dari Direktorat Prasarana Transportasi Jalan

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi).

Tabel III. 48 Rincian Program – Program Kegiatan DIPA T.A. 2024

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN I	TRIWULAN I		PAGU PER TRIWULAN II	TRIWULAN II	
				REALIASI	%		REALIASI	%
022.03.GA	**Program Infrastruktur Konektivitas**	**77.080.313.000**	**76.006.667.000**	**6.185.849.678**	**10,71 %**	**76.006.667.000**	**15.268.945.652**	**20,09%**
GA.4638	Pelayanan Transportasi Darat	38.406.000.000	37.828.186.000	2.097.464.000	5,54%	37.828.186.000	7.081.575.200	18,72%
GA.4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	38.674.313.000	38.178.481.000	4.088.385.678	10,71%	38.178.481.000	8.187.370.452	21,44%
022.03.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**22.877.088.000**	**22.877.088.000**	**2.143.989.402**	**9,37%**	**22.877.088.000**	**8.172.234.926**	**35,72%**
WA.4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	22.877.088.000	22.877.088.000	2.143.989.402	9,37%	22.877.088.000	8.172.234.926	35,72%
GRAND TOTAL		**99.957.401.000**	**98.883.755.000**	**8.329.839.080**	**8,42%**	**98.883.755.000**	**23.441.180.578**	**23,71%**

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN III	TRIWULAN III		PAGU PER LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)	TRIWULAN IV	
				REALIASI	%		REALIASI	%
022.03.GA	**Program Infrastruktur Konektivitas**	**77.080.313.000**	**76.006.667.000**	**37.925.413.492**	**50,03 %**	**76.006.667.000**	**71.029.957.338**	**93,45%**
GA.4638	Pelayanan Transportasi Darat	38.406.000.000	37.805.203.000	18.813.940.202	49,77%	37.205.203.000	34.204.942.591	91,94%
GA.4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	38.674.313.000	38.201.464.000	19.111.473.290	50,03%	38.801.464.000	36.825.014.747	94,91%
022.03.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**22.877.088.000**	**22.877.088.000**	**14.040.848.993**	**61,38 %**	**22.797.088.000**	**21.778.519.928**	**95,53%**
WA.4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	22.877.088.000	22.877.088.000	14.040.848.993	61,38%	22.797.088.000	21.778.519.928	95,53%
GRAND TOTAL		**99.957.401.000**	**98.883.755.000**	**51.966.262.485**	**52,55 %**	**98.803.755.000**	**92.808.477.266**	**93,93%**

Sumber: Data diolah dari Direktur Prasarana Transportasi Jalan

III.3.1.3. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2024

Adapun data perbandingan pagu dan realisasi dari tahun 2020 – 2024, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 49 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 – Tahun 2024 (Triwulan IV)

No	Tahun	Pagu Awal	Pagu Akhir	Realisasi	
		Rp.	Rp.	Rp.	%
1	2020	339.240.513.000	328.251.389.000	325.147.773.540	99,05%
2	2021	268.304.313.000	190.333.831.000	189.169.538.352	99,39%
3	2022	87.452.162.000	79.063.855.000	78.967.290.000	99,88%
4	2023	58.794.522.000	48.815.972.000	48.764.537.021	99,89%
5	2024	99.957.401.000	98.803.755.000	92.808.477.266	93,93%

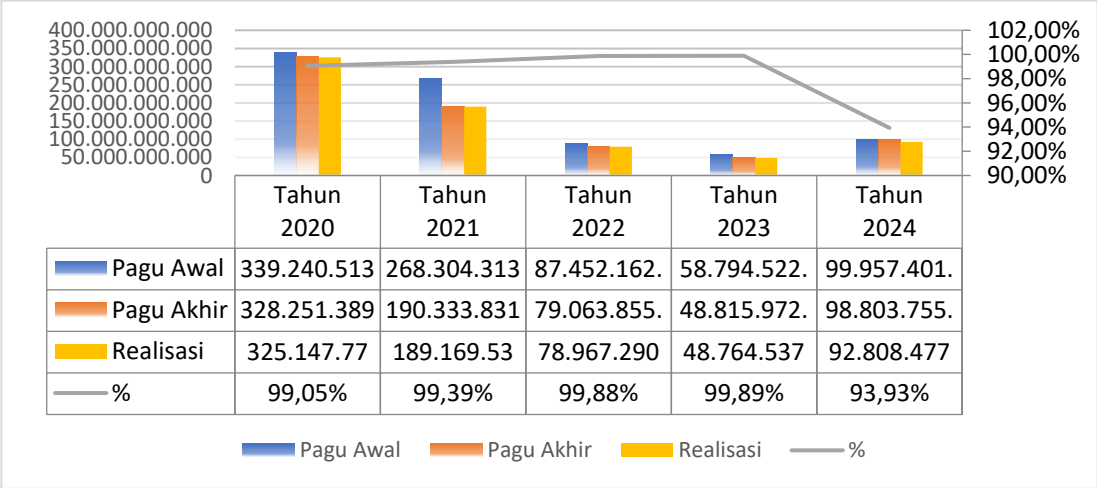

Gambar III. 45 Grafik Perbandingan Pagu Akhir dan Realisasi Anggaran Tahun 2020 – Tahun 2024

Berdasarkan data di atas dapat diketahui nilai pagu awal, pagu akhir, dan realisasi setiap tahunnya, sehingga diketahui masing – masing dana yang terserap setiap tahunnya. Seperti pada tahun 2020 anggaran yang terserap pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 sebesar Rp 325.147.773.540,- atau mencapai 99,05% dari pagu akhir Rp 328.251.389.000,. Sedangkan pada tahun 2021 tingkat serapan anggaran Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021 yaitu sebesar Rp 189.169.538.352,- atau mencapai 99,39% dari pagu akhir tahun 2021 yaitu sebesar Rp 190.333.831.000,-. Sedangkan pada tahun 2022 tingkat serapan anggaran Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 yaitu sebesar Rp 78.967.290.000,- atau mencapai 99,88% dari pagu akhir tahun 2022 yaitu sebesar Rp 79.063.855.000,-. Pada Tahun 2023 tingkat serapan anggaran Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 yaitu sebesar Rp 48.764.537.021,- atau mencapai 99,89% dari pagu akhir Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 yaitu sebesar Rp 48.815.972.000,-. Pada Tahun 2024 tingkat serapan anggaran Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 yaitu sebesar Rp 92.808.477.266,- atau mencapai 93,93%

dari pagu akhir Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 yaitu sebesar Rp 98.803.755.000,-.

III.3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2024

III.3.2.1. Realisasi Anggaran Per Sasaran Program dan Kegiatan Tahun 2024

Pagu tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan program yang ada dalam DIPA Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut (anggaran sesuai dengan yang telah direvisi):

Tabel III.50 Kegiatan Program yang ada dalam DIPA

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN I (Jan-Mar)	TRIWULAN I	
				REALIASI	%
022.03.GA	**Program Infrastruktur Konektivitas**	**77.080.313.000**	**76.006.667.000**	**6.185.849.678**	**10,71%**
GA.4638	Pelayanan Transportasi Darat	38.406.000.000	37.828.186.000	2.097.464.000	5,54%
GA.4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	38.674.313.000	38.178.481.000	4.088.385.678	10,71%
022.03.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**22.877.088.000**	**22.877.088.000**	**2.143.989.402**	**9,37%**
WA.4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	22.877.088.000	22.877.088.000	2.143.989.402	9,37%
GRAND TOTAL		**99.957.401.000**	**98.883.755.000**	**8.329.839.080**	**8,42%**
KODE	**NOMENKLATUR PROGRAM**	**PAGU AWAL**	**PAGU PER TRIWULAN II (Jan-Jun)**	**TRIWULAN II**	
				REALIASI	**%**
022.03.GA	**Program Infrastruktur Konektivitas**	**77.080.313.000**	**76.006.667.000**	**15.268.945.652**	**20,09%**
GA.4638	Pelayanan Transportasi Darat	38.406.000.000	37.828.186.000	7.081.575.200	18,72%
GA.4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	38.674.313.000	38.178.481.000	8.187.370.452	21,44%
022.03.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**22.877.088.000**	**22.877.088.000**	**8.172.234.926**	**35,72%**
WA.4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	22.877.088.000	22.877.088.000	8.172.234.926	35,72%
GRAND TOTAL		**99.957.401.000**	**98.883.755.000**	**23.441.180.578**	**23,71%**
KODE	**NOMENKLATUR PROGRAM**	**PAGU AWAL**	**PAGU PER TRIWULAN III**	**TRIWULAN III**	
				REALIASI	**%**
022.03.GA	**Program Infrastruktur Konektivitas**	**77.080.313.000**	**76.006.667.000**	**37.925.413.492**	**50,03%**
GA.4638	Pelayanan Transportasi Darat	38.406.000.000	37.805.203.000	18.813.940.202	49,77%
GA.4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	38.674.313.000	38.201.464.000	19.111.473.290	50,03%
022.03.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**22.877.088.000**	**22.877.088.000**	**14.040.848.993**	**61,38%**
WA.4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	22.877.088.000	22.877.088.000	14.040.848.993	61,38%
GRAND TOTAL		**99.957.401.000**	**98.883.755.000**	**51.966.262.485**	**52,55%**

KODE	NOMENKLATUR PROGRAM	PAGU AWAL	PAGU PER TRIWULAN IV	TRIWULAN IV	
				REALIASI	%
022.03.GA	**Program Infrastruktur Konektivitas**	**77.080.313.000**	**76.006.667.000**	**71.029.957.338**	**93,45%**
GA.4638	Pelayanan Transportasi Darat	38.406.000.000	37.205.203.000	34.204.942.591	91,94%
GA.4640	Penunjang Teknis Transportasi Darat	38.674.313.000	38.801.464.000	36.825.014.747	94,91%
022.03.WA	**Program Dukungan Manajemen**	**22.877.088.000**	**22.797.088.000**	**21.778.519.928**	**95,53%**
WA.4670	Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	22.877.088.000	22.797.088.000	21.778.519.928	95,53%
GRAND TOTAL		**99.957.401.000**	**98.803.755.000**	**92.808.477.266**	**93,93%**

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui realisasi anggaran per Sasaran Program dan Kegiatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 sebesar Rp92.808.477.266,00 atau sebesar 93,93%%.

III.3.2.2. Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja dan Per Jenis Sumber Dana Tahun 2024

Adapun data realisasi anggaran per jenis belanja pada tahun 2024 yang sudah di analisis per Triwulan IV, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 52 Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2024

NO	JENIS BELANJA	PAGU ALOKASI (TW I)	REALISASI TW I		PAGU ALOKASI (TW II)	REALISASI TW II	
		Rp.	Rp.	%	Rp.	Rp.	%
1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-
2	Belanja Barang	85.496.798.000	6.612.383.120	7,73%	85.496.798.000	20.695.858.950	24,21 %
3	Belanja Modal	13.386.957.000	1.717.455.960	12,83%	13.386.957.000	2.745.321.628	20,51 %
TOTAL		**98.883.755.000**	**8.329.839.080**	**8,42%**	**98.883.755.000**	**23.441.180.578**	**23,71 %**

NO	JENIS BELANJA	PAGU ALOKASI (TW III)	REALISASI TW III		PAGU ALOKASI (TW IV)	REALISASI TW IV	
		Rp.	Rp.	%	Rp.	Rp.	%
1	Belanja Pegawai	-	-	-	-	-	-
2	Belanja Barang	85.441.436.000	44.038.771.453	51,54%	84.951.156.000	78.956.146.666	92,94%
3	Belanja Modal	13.852.599.000	7.927.491.032	57,23%	13.852.599.000	13.852.330.600	100,00 %
TOTAL		**99.294.035.000**	**51.966.262.485**	**52,34%**	**98.803.755.000**	**92.808.477.266**	**93,93%**

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui realisasi anggaran per jenis belanja Tahun 2024 dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebesar Rp 92.808.477.266,- atau sebesar 93,93%.

Tabel III. 53 Realisasi Anggaran Per Jenis Sumber Dana Tahun 2024

NO	SUMBER DANA	PAGU ALOKASI (TW I)	REALISASI TW I		PAGU ALOKASI (TW II)	REALISASI TW II	
		Rp.	Rp.	%	Rp.	Rp.	%
1	Rupiah Murni	98.883.755.000	8.329.839.080	8,42%	98.883.755.000	23.441.180.578	23,71%
2	PNBP	0	-	0,00%	-	-	-
3	SBSN	-	-	0,00%	-	-	-
TOTAL		**98.883.755.000**	**8.329.839.080**	**8,42%**	**98.883.755.000**	**23.441.180.578**	**23,71%**

NO	SUMBER DANA	PAGU ALOKASI (TW III)	REALISASI TW III		PAGU ALOKASI (TW IV)	REALISASI TW IV	
		Rp.	Rp.	%	Rp.	Rp.	%
1	Rupiah Murni	99.294.035.000	51.966.262.485	52,34%	98.803.755.000	92.808.477.266	93,93%
2	PNBP		-	-	-	-	-
3	SBSN	-	-	-	-	-	-
TOTAL		**99.294.035.000**	**51.966.262.485**	**52,34%**	**98.803.755.000**	**92.808.477.266**	**93,93%**

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui realisasi anggaran per sumber dana Tahun 2024 dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebesar Rp 92.808.477.266,- atau sebesar 93,93%

III.3.2.1. Analisis Dana yang Tidak Terserap oleh Unit Kerja

Berikut merupakan data dari dana yang tidak terserap oleh unit kerja berdasarkan per jenis belanja, per sumber dana, dan sisa anggaran pada tahun 2024, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel III. 54 Sisa Anggaran Per Jenis Belanja Tahun 2023

NO	Sisa Anggaran	PAGU AKHIR	REALISASI	SISA
		Rp98,803,755,000	Rp92,808,477,266	Rp5,995,277,734
				Rp-
1	Kegiatan yang tidak Terlaksana	Rp -	Rp -	Rp -
2	Kegiatan yang Terblokir	Rp 5,991,834,000.00	Rp -	Rp 5,991,834,000.00
3	Kontraktual	**Rp73,243,581,000.00**	**Rp73,242,657,885.00**	**Rp 923,115.00**
	a. Belanja Barang	Rp 59,828,456,000.00	Rp 59,827,540,285.00	Rp 915,715.00
	b. Belanja Modal	Rp 13,415,125,000.00	Rp 13,415,117,600.00	Rp 7,400.00
4	Non Kontraktual	**Rp19,568,340,000.00**	**Rp19,565,819,381.00**	**Rp 2,520,619.00**
	a. Belanja Barang	Rp 19,130,866,000.00	Rp 9,128,606,381.00	Rp 2,259,619.00
	b. Belanja Modal	Rp 437,474,000.00	Rp 437,213,000.00	Rp 261,000.00
5	Sisa Belanja Pegawai	Rp -	Rp -	Rp -
TOTAL		**Rp98,803,755,000.00**	**Rp92,808,477,266.00**	**Rp5,995,277,734.00**

Dari total pagu anggaran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sebesar **Rp98,803,755,000.00** (Sembilan Puluh Delapan Milyar Delapan Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu rupiah) yang dapat terealisasi sebesar **Rp92,808,477,266.00** (Sembilan Puluh Dua Milyar Delapan Ratus Delapan Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) atau sebesar 93,93% sehingga total dana yang tidak terserap di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan adalah sebesar **Rp5,995,277,734.00** (Lima Puluh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) atau sebesar 6,07%, dengan rincian sebagai berikut:

1. Tidak ada kegiatan yang tidak terlaksana;
2. Kegiatan yang terblokir sebesar Rp5,991,834,000.00;
3. Sisa Kontraktual sebesar Rp923,115.00 (Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Belas Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
   1) Sisa belanja modal sebesar Rp7,400.00 berasal dari sisa kontrak RM yang sudah tidak dapat di realokasi;
   2) Sisa belanja barang sebesar Rp915,715.00 sisa kontrak yang tidak digunakan untuk kegiatan realokasi.
4. Sisa Non Kontraktual sebesar Rp 2,520,619.00 (Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Belas Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
   1) Sisa belanja modal sebesar Rp261,000.00 berasal dari sisa kegiatan pengadaan langsung yang sisa anggarannya sudah tidak dapat dimanfaatkan;
   2) Sisa belanja barang sebesar Rp2,259,619.00 berasal dari sisa anggaran kegiatan operasional serta kegiatan penunjang berupa layanan perkantoran.

III.3.3. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

IX. 3.3.1 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Keuangan

Berikut merupakan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan sasaran kegiatan per Triwulan IV Tahun 2024, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan rincian sebagai berikut:

Tabel III. 55 Efisiensi Anggaran

No	Sasaran Kegiatan		Triwulan I			Triwulan II		
			% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi triwulan I)	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi triwulan II)
1	SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antamoda Transportasi	96,53%	9,10%	87,43%	96,53%	25,11%	71,42%
2	SK 2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	110,27%	8,10%	102,17%	110,75%	14,08%	96,67%
3	SK 3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	101,40%	2,13%	99,27%	102,08%	20,27%	81,81%
4	SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	95,51%	10,20%	85,31%	97,75%	20,07%	77,68%
5	SK 1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	97,81%	13,95%	83,86%	98,26%	39,04%	59,22%
	Total		**100,30%**	**8,70%**	**91,61%**	**101,08%**	**23,71%**	**77,36%**

No	Sasaran Kegiatan		Triwulan III			Triwulan IV		
			% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi triwulan III)	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	% Capaian Keuangan	Efisiensi (posisi triwulan IV)
1	SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antamoda Transportasi	99,10%	48,51%	50,59%	100,00%	90,43%	9,57%
2	SK 2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	110,50%	39,74%	70,76%	100,00%	99,15%	0,85%
3	SK 3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	101,21%	58,15%	43,06%	100,00%	99,82%	0,18%
4	SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	97,75%	57,25%	40,50%	100,00%	97,41%	2,59%
5	SK 1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	98,26%	59,08%	39,18%	100,00%	82,84%	17,16%
	Total		**101,36%**	**52,55%**	**48,82%**	**100,00%**	**93,93%**	**6,07%**

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui per Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 bahwa dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 100,00%, dengan realisasi anggaran sebesar 93,93% menunjukkan adanya efisiensi anggaran sebesar 6,07%. Berikut merupakan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya berdasarkan Indikator Kinerja Kegiatan per Triwulan IV Tahun 2024, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini dengan rincian sebagai berikut:

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)		SATUAN	TARGET	REALISASI CAPAIAN KINERJA TW IV	CAPAIAN KINERJA TW IV	ALOKASI ANGGARAN IKK	REALISASI ANGGARAN IKK TW IV	CKxAA	(CKxAA)-RA	EFISIENSI
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (7)X(8)	(11) = (10)-(9)	(12) = (11)/(9)
1	SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	rasio	0.64	0.64	100.00%	387,505,000	374,124,470	387,505,000	13,380,530	3.58%
			IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	lokasi	108	108	100.00%	1,144,874,000	649,445,730	1,144,874,000	495,428,270	76.28%
			IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung Integrasi Moda	lokasi	13	13	100.00%	672,512,000	652,395,408	672,512,000	20,116,592	3.08%
2	SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	%	96.34	96.34	100.00%	-	-	-	-	-
			IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	62.27	62.27	100.00%	37,564,004,000	34,071,795,689	37,564,004,000	3,492,208,311	10.25%
			IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	82.44	82.44	100.00%	594,931,000	594,930,700	594,931,000	300	0.00%
3	SK3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jendereal Perhubungan Darat	%	23.94	23.94	100.00%	16,778,159,000	16,747,470,241	16,778,159,000	30,688,759	0.18%
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	91	91	100.00%	35,732,324,000	34,806,409,250	35,732,324,000	925,914,750	2.66%
5	SK1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	74	74	100.00%	5,929,446,000	4,911,905,778	5,929,446,000	1,017,540,222	20.72%

III.3.3.2 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Tabel III. 56 Perbandingan jumlah kebutuhan dan jumlah eksisting SDM

No	Sasaran Kegiatan		Triwulan I				
			Jumlah Kebutuhan SDM	Realisasi SDM	% Capaian SDM	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	Efisiensi (Posisi Triwulan I)
1	SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antamoda Transportasi	25	20	80%	96,53%	16,53%
2	SK 2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	25	15	60%	110,27%	50,27%
3	SK 3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	25	16	64%	101,40%	37,40%
4	SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	30	28	93%	95,51%	2,18%
5	SK 1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	20	10	50%	97,81%	47,81%
	Total		**125**	**89**	**69%**	**100,30%**	**30,84 %**

No	Sasaran Kegiatan		Triwulan II				
			Jumlah Kebutuhan SDM	Realisasi SDM	% Capaian SDM	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	Efisiensi (Posisi Triwulan II)
1	SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antamoda Transportasi	25	20	80%	96,53%	16,53%
2	SK 2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	25	15	60%	110,75%	50,75%
3	SK 3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	25	16	64%	102,08%	38,08%
4	SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	30	29	97%	97,75%	1,09%
5	SK 1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	20	10	50%	98,26%	48,26%
	Total		**125**	**90**	**70,13%**	**101,08 %**	**30,94%**

No	Sasaran Kegiatan		Triwulan III				
			Jumlah Kebutuhan SDM	Realisasi SDM	% Capaian SDM	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	Efisiensi (Posisi Triwulan III)
1	SK 1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antamoda Transportasi	25	20	80,00%	99,10%	19,10%
2	SK 2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	25	15	60,00%	110,50%	50,50%
3	SK 3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	25	17	68,00%	101,21%	33,21%
4	SK 5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	30	28	93,33%	97,75%	4,42%
5	SK 1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	20	11	55,00%	98,26%	43,26%
	Total		**125**	**91**	**71,27%**	**101,36%**	**30,10%**

No	Sasaran Kegiatan		Triwulan IV				
			Jumlah Kebutuhan SDM	Realisasi SDM	% Capaian SDM	% Capaian Rata-Rata Kinerja Sasaran	Efisiensi (Posisi Triwulan IV)
1	SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antamoda Transportasi	25	20	80.00%	100.00%	20.00%
2	SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	25	15	60.00%	100.00%	40.00%
3	SK3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	25	17	68.00%	100.00%	32.00%
4	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	30	28	93.33%	100.00%	6.67%
5	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	20	11	55.00%	100.00%	45.00%
Total			**125**	**91**	**71.27%**	**100.00%**	**28.73%**

Berdasarkan data di atas dapat kita ketahui bahwa dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) sebesar 100,00%, dengan Capaian Sumber Daya Manusia menunjukkan adanya efisiensi Sumber Daya Manusia sebesar 28,73%.

III.3.3.3 Hambatan dan Kendala

Beberapa Hambatan/Kendala pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024:

1. Terdapat *Automatic Adjusment* anggaran sehingga beberapa pekerjaan terjadi pengurangan anggaran, ditunda pelaksanaannya dan/atau diperpanjang waktu pelaksanaanya di tahun selanjutnya.
2. Membutuhan koordinasi yang lebih intens dan komprehensif dengan stakeholder terkait agar kegiatan monitoring atau evaluasi menjadi lebih efektif dan efisien baik dari segi kinerjanya maupun realisasi anggaran.
3. Berdasarkan hasil review secara periodik, dibutuhkan adanya monitoring kinerja dan evaluasi kegiatan sehingga dapat meningkatkan capaian kinerja di masa yang akan datang.
4. Melakukan evaluasi terkait Indikator Kinerja eksisting sebagai dasar pengusulan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan pada Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2025-2029 sebagai upaya dalam peningkatan pengukuran dan capaian kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada periode renstra kedepan.

BAB IV
PENUTUP

IV. 1. Penutup

IV.1.1. Ringkasan Capaian

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020-2024, untuk mendukung tercapainya target Rencana Strategis tersebut, maka dapat dijabarkan secara konkret ke dalam Sasaran Kegiatan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan. Setiap sasaran tersebut disertai dengan ukuran sebagai alat untuk mengetahui pencapaian sasaran dimaksud. Pada tahun 2024, ditetapkan 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK) dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), beserta targetnya.

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan evaluasi kinerja Triwulan III Tahun 2024, secara keseluruhan kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sudah baik. Dari 5 (lima) Sasaran Kegiatan (SK), Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2024, terdapat 2 (dua) Sasaran Kegiatan yang lebih besar atau sama dengan 100% (SK≥100%) dan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan kurang dari 100% (0%≤SK<100%).

Berdasarkan hasil capaian kinerja Tahun 2024, Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2024, dari 9 (sembilan) IKK Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, terdapat 6 (enam) IKK dengan status hijau dengan kondisi lebih besar atau sama dengan 100% (IKP≥100%) dan 3 (tiga) status merah dengan kondisi kurang dari 100% (0%≤IKP<100%). Adapun rincian capaian untuk setiap IKK pada Triwulan III tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Kegiatan lebih besar atau sama dengan 100% (IKK≥100%):

4. Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan terealisasi **0,64** (target tahun 2024 sebesar 0,64), dengan capaian kinerja sebesar **100,00%**;
5. Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi terealisasi sebesar **108** lokasi (target tahun 2024 sebesar 108 lokasi), dengan capaian kinerja sebesar **100,00%**;
6. Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda terealisasi sebesar **13** lokasi (target tahun 2024 sebesar 13 lokasi), dengan capaian kinerja sebesar **100,00%**;
7. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Terminal Tipe A terealisasi sebesar **96,34%** (target tahun 2024 sebesar 96,34) dengan Capaian Kinerja sebesar **100,00%;**
8. Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A terealisasi sebesar **62,27%** (target tahun 2024 sebesar 62,27%), dengan capaian kinerja sebesar **100,00%**;
9. Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A terealisasi **82,44%** (target tahun 2024 sebesar 82,44%), dengan capaian kinerja sebesar **100,00%;**
10. Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terealisasi sebesar **23,94%** (target tahun 2024 sebesar 23,94%), dengan capaian kinerja sebesar **100,00%.**

11. Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat terealisasi sebesar **91** (target tahun 2024 sebesar 91), dengan capaian kinerja sebesar **100,00%;**
12. Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan terealisasi **74** (target tahun 2024 sebesar 74), dengan capaian kinerja sebesar **100,00%.**

Nilai Kinerja Organisasi dengan perhitungan hasil rata-rata pengukuran pencapaian sasaran Kinerja adalah sebesar 100,00% dan perhitungan hasil rata-rata pengukuran pencapaian indikator kinerja kegiatan adalah sebesar 100,00%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan, kegiatan, sasaran, indikator kinerja kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana dengan baik dalam mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan visi dan misi Direktorat Prasarana Transportasi Jalan sebagai mana yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Tahun 2020 – 2024.

Direktorat Prasarana Transportasi Jalan terus berkomitmen untuk melakukan perbaikan manajemen, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan publik dan kepercayaan publik. Hal ini dicerminkan dengan upaya perbaikan atas setiap sistem manajemen yang dimiliki, antara lain melalui pelaksanaan monitoring yang dilakukan secara berkala.

Total pagu akhir DIPA Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) T.A. 2024 adalah sebesar Rp 98.803.755.000 dengan realisasi anggaran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 92.808.477.266;

2. Untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya, Direktorat Prasarana Transportasi Jalan akan melakukan beberapa langkah sebagai berikut:
   a. Melakukan pemetaan dan pemerataan SDM sesuai dengan kebutuhan masing-masing Terminal Tipe A lewat proses penerimaan, mutasi dan promosi ASN;
   b. Melakukan penelaahan teknis terkait penetapan lokasi Terminal Tipe A dan Terminal Barang baru berdasarkan kriteria penetapan lokasi sesuai peraturan yang berlaku;
   c. Meningkatkan kegiatan monitoring pembangunan dan monitoring operasional Terminal Penumpang Tipe A untuk memperluas cakupan pengawasan pada kegiatan pengoperasian Terminal Penumpang Tipe A;
   d. Mengusulkan revitalisasi dan rehabilitasi Terminal Penumpang Tipe A berdasarkan skala prioritas dan target minimal operasi;
   e. Menyusun kajian teknis revitalisasi dan rehabilitasi Terminal Penumpang Tipe A yang belum memiliki kajian teknis pengembangan terminal;
   f. Mengupayakan percepatan penyelesaian administrasi, pembangunan jalan dan penetapan pengelola agar Terminal Barang segera bisa beroperasi;
   g. Tetap mengupayakan penyelesaian pembangunan Terminal Barang untuk Umum sesuai sesuai Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2015 dengan target penyelesaian tahun 2024;
   h. Menyusun kajian teknis penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda berdasarkan skala prioritas;
   i. Menambahkan rincian dokumen teknis dan desain fasilitas pendukung pada etalase pembangunan fasilitas pendukung dalam E–catalog;
   j. Melakukan koordinasi secara intensif dengan stakeholder lain terkait pembangunan fasilitas pendukung yang menjadi prioritas;

k. Meningkatkan kegiatan monitoring pembangunan fasilitas pendukung untuk memperluas cakupan pengawasan pada kegiatan pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda yang dilakukan oleh Balai Pengelola Transportasi Darat;
l. Memprioritaskan lokasi pembangunan fasilitas pendukung yang menjadi target capaian sesuai dengan Renstra;
m. Monitoring dan pemantauan terhadap kegiatan di lingkungan Direktorat Prasarana Transportasi Jalan;
n. Melakukan langkah-langkah percepatan dalam rangka penyerapan realisasi anggaran;
o. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.
p. Memaksimalkan peran SDM dalam menjalankan tugas dan fungsi demi tercapainya target capaian kinerja;
q. Melakukan evaluasi terkait Indikator Kinerja eksisting sebagai dasar pengusulan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan pada Renstra Direktorat Prasarana Transportasi Jalan 2025-2029 sebagai upaya dalam peningkatan pengukuran dan capaian kinerja Direktorat Prasarana Transportasi Jalan pada periode renstra kedepan.

IV. 2. Hasil Evaluasi, Rekomendasi dan Unit Kerja Penanggung Jawab

Adapun hasil evaluasi, rekomendasi dan unit kerja penanggung jawab dijabarkan sebagai berikut:

Tabel IV. 1 Hasil Evaluasi, Rekomendasi, dan Unit Kerja Penanggung Jawab

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)							(12)	(13)	(14)
1	SK1	Meningkatnya Konektivitas Transportasi Darat dan Keterpaduan Antarmoda Transportasi	IKK 1	Rasio kawasan strategis nasional yang terlayani simpul prasarana transportasi jalan	rasio	0,64	0,64	0,64	100,00 %	0,64	0,64	100,00%	0,64	0,64	100,00%	0,64	0,64	100,00%	TERCAPAI	Mengoptimalkan dan memprioritaskan kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan simpul prasarana transportasi jalan.	Subdit Terminal Angkutan Jalan dan Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda
			IKK 2	Jumlah Terminal Tipe A dan Terminal Barang yang beroperasi	Lokasi	108	111	108	97,30%	111	108	97,30%	111	108	97,30%	108	108	100,00%	TERCAPAI	Upaya meningkatkan capaian : 1. Jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi tahun 2024 bertambah tiga dibanding jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang beroperasi tahun 2022 yaitu dari 104 Terminal menjadi 107 untuk Terminal Penumpang Tipe A dan 1 terminal untuk Terminal Barang Umum. 2. Direktorat Prasarana Transportasi Jalan telah meningkatkan operasional Terminal Penumpang Tipe A melalui digitalisasi sistem informasi terminal dan pelaksanaan excellent service. 3. Mengoptimalkan kegiatan Monitoring Operasional	Subdit Terminal Angkutan Jalan

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)							(12)	(13)	(14)
																				Terminal Penumpang Tipe A dengan melakukan pemantauan secara periodik terkait implementasi kegiatan operasional di Terminal Tipe A. 4. Mengoptimalkan SDM yang ada pada terminal sesuai dengan kondisi ideal masing-masing terminal. 5. Melakukan optimalisasii anggaran operasional berdasarkan kondisi ideal sesuai ketersediaan jumlah SDM di lapangan.	
			IKK 3	Persentase Penyediaan Fasilitas Pendukung Integrasi Moda	Lokasi	13	13	12	92,31%	13	12	92,31%	13	13	100,00%	13	13	100,00%	TERCAPAI	4. Menyusun regulasi untuk penyediaan dan pembangunan fasilitas pendukung dan integrasi moda; 5. Menentukan titik lokasi penyediaan fasilitas pendukung dan integrasi moda sesuai skala prioritas yang mengacu pada kebijakan strategis nasionals; 6. Penguatan koordinasi terhadap pihak terkait agar penyediaan fasilitas	Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)							(12)	(13)	(14)
																				pendukung dapat terealisasi sesuai dengan target dan skala prioritas; 7. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan fasilitas pendukung yang dilaksanakan oleh BPTD.	
2	SK2	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi Darat	IKK 1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Terminal Tipe A	%	96,34	81,50	95,60	117,30 %	81,50	96,72	118,67%	81,50	96,72	118,00%	96,34	96,34	100,00	TERCAPAI	Meningkatkan kegiatan pemantauan dan evaluasi terkait pelayanan terminal melalui : 1. Melakukan rekapitulasi Survey Indeks Kepuasan Masyarakat secara berkala dan mengingatkan Satuan Pelayanan Terminal Tipe A untuk selalu melakukan Survey IKM pada Aplikasi IKM IKP Ditjen Perhubungan Darat setiap bulannya. 2. Tersedianya aplikasi Aplikasi 3A IPK-IKM untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi terkait implementasi pelayanan yang dirasakan oleh pengguna jasa Terminal Tipe A. 3. Perbaikan layanan antara lain perbaikan	Subdit Terminal Angkutan Jalan

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)							(12)	(13)	(14)
																				sarana dan prasarana; 4. Mensosialisasikan informasi terkait prosedur layanan dan produk layanan yang ada secara bertahap serta penerapan pelayanan yang berkualitas pada pengguna jasa;	
			IKK 2	Persentase Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Terminal Tipe A	%	62,27	53,75	60,56	112,67%	53,75	60,56	112,67%	53,75	60,56	112,67%	62,27	62,27	100,00	TERCAPAI	Mengoptimalkan fasilitas yang ada pada Terminal Tipe A melalui: 1. Melakukan rehabilitasi dan peningkatan Terminal Tipe A sebanyak mungkin agar standar terminal bisa merata; 2. Meningkatkan kualitas SDM melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis ataupun Training kepada Satuan Pelayanan Terminal; 3. Melaksanakan kegiatan pelayanan prima pada Terminal. 4. Melakukan evaluasi paruh waktu renstra.	Subdit Terminal Angkutan Jalan
			IKK 3	Persentase Penerapan SMART Terminal Tipe A	%	82,44	81,75	82,44	100,84%	81,75	82,44	100,84%	81,75	82,44	100,84%	82,44	82,44	100,00	TERCAPAI	Meningkatkan operasional Terminal Penumpang Tipe A melalui digitalisasi sistem informasi terminal meliputi: 1. Menerapkan Terminal Online System (TOS)	Subdit Terminal Angkutan Jalan

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)							(12)	(13)	(14)
																				pada seluruh Terminal Tipe A; 2. Melakukan peningkatan SDM melalui training dan Bimtek terkait Terminal Online System (TOS); 3. Menambah biaya operasional pada satuan pelayanan untuk mendukung terlaksananya smart terminal sehingga persentase penerapan smart terminal dapat meningkat.	
4	SK3	Meningkatnya Keselamatan Transportasi Darat	IKK 1	Persentase Pelanggaran pada UPPKB Direktorat Jendereal Perhubungan Darat	%	23,94	24	23,75	101,04 %	24	23,50	102,08%	24	23,71	101,21%	23,94	23,94	100,00	TERCAPAI	Mengoptimalkan penurunan persentase pelanggaran angkutan barang pada UPPKB dengan cara : 1. Melakukan penyusunan Road Map operasional UPPKB (Pemanfaatan WIM); 2. Sudah terdapat konsep outlook UPPKB; 3. Terdapat Pedoman Teknis WIM dengan Perdirjen Hubdat No PR DRJD 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor	Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)							(12)	(13)	(14)
																				Metode Dinamis di Jalan; 4. Sudah terdapat konsep Pedoman Teknis Rancang Bangun UPPKB; 5. Meningkatkan koordinasi dengan Satuan Pelayanan UPPKB untuk dapat memenuhi capaian target persentase pelanggaran; 6. Melakukan Revisi Perdirjen SK.736; 7. Melakukan pengawasan kepada Satpel UPPKB melalui adanya pelaporan data penimbangan secara periodik setiap bulan.	
5	SK5	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	IKK 1	Kualitas Penyelenggaraan Dukungan Teknis Transportasi Darat	Nilai	91	89	85	95,51%	89	87	97,75%	89	87	97,75%	91	91	100,00	TERCAPAI	Mengoptimalkan penyelenggaraan kegiatan dukungan teknis transportasi darat pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan dengan cara: 1. Pada aspek perencanaan akan melaksanakan penyusunan dan pengumpulan dokumen perencanaan secara tepat waktu; 2. Pada aspek kepegawaian, melakukan *updating* sistem kepegawaian, membuat laporan bulanan	Subdit Terminal Angkutan Jalan, Subdit Penimbangan Kendaraan Bermotor, Subdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda, Subdit Kepengusahaan Prasarana, Subbag Tata Usaha

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III			TRIWULAN IV			EVALUASI	TINDAK LANJUT	PENANGGUNG JAWAB
							TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN KINERJA			
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)							(12)	(13)	(14)
																				kinerja pegawai setiap bulan melalui AP2Kp, dan membuat penilaian kinerja pegawai setiap akhir tahun. 3. Pada aspek keuangan, melakukan pemantauan dan evaluasi melalui kegiatan rapat Kemajuan Realisasi Kegiatan pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan yang rutin dilaksanakan pada hari senin.	
5	SK1	Meningkatnya Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat Akuntabel	IKK 1	Tingkat Penyelenggaraan Perkantoran Direktorat Prasarana Transportasi Jalan	Nilai	74	74	72,38	97,81%	74	72,71	98,26%	74	72,37	97,80%	74	74	100,00	TERCAPAI	Mengoptimalkan kegiatan layanan perkantoran pada Direktorat Prasarana Transportasi Jalan, meliputi: 1. Terdapat pengadaan PC dan Printer pada Tahun Anggaran 2023; 2. Menambah kecepatan jaringan internet untuk memudahkan kegiatan layanan perkantoran.	Subbag Tata Usaha

LAMPIRAN